

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. LKPD

Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA2018 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2018. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;

- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2018, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Provinsi, Badan, Dinas dan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Badan

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Keuangan Daerah
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7) Badan Penghubung Daerah
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Dinas

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 8) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - 11) Dinas Perkebunan
 - 12) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 13) Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
 - 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 15) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 17) Dinas Kominfo
 - 18) Dinas Lingkungan Hidup
 - 19) Dinas Ketahanan Pangan
 - 20) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - 21) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 22) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Badan Layanan Umum Daerah.
- 1) Akademi Farmasi.
 - 2) Akademi Analisis Kesehatan (AAK)
 - 3) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
 - 4) Rumah Sakit Daerah
 - 5) Rumah Sakit Jiwa.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2018 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan posLaporanKeuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversidan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasiuntuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2018 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2018 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018.

2.1.1. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Jambi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp208.378,55 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp58,36 juta.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 bila dibandingkan tahun sebelumnya (*c-to-c*) tumbuh 4,71%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Inventori yang tumbuh sebesar 16,03%. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-tahun 2018 tumbuh 4,77% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 8,13%. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 14,11%.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 bila dibandingkan triwulan III-2018 (*q-to-q*) meningkat sebesar 3,06%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,85%. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 50,43%.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2018 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 27,57%. Diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian

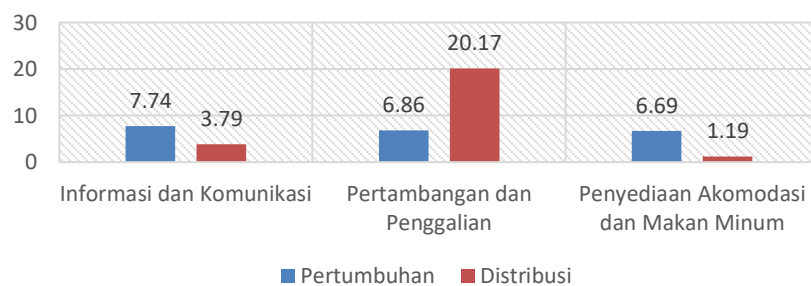
sebesar 20,17%. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan untuk Komponen Pengeluaran Ekspor sebesar 73,79%.

A. PDRB menurut lapangan usaha.

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 (c-to-c)

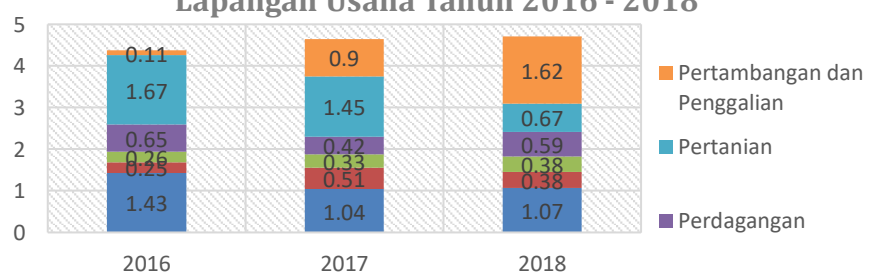
Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2018 tumbuh 4,71 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,86%; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,69%.

Grafik II.1
Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018



Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018, Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,62%, diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,67%; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,59%.

Grafik II.2
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2018

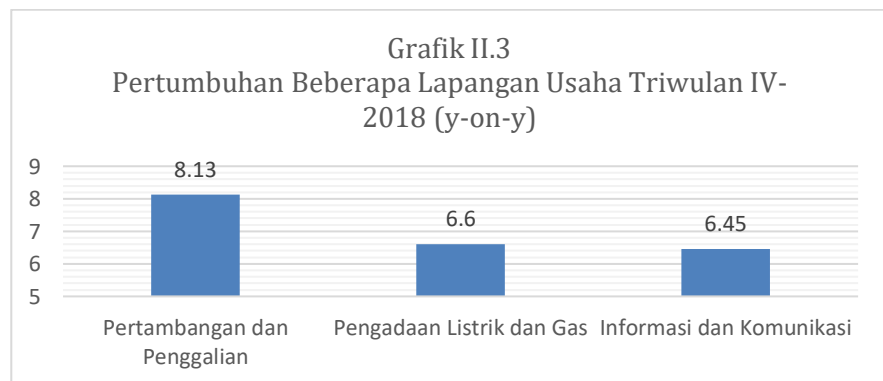


Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut Lapangan Usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,57%); Pertambangan dan Penggalian (20,17%); dan Perdagangan (11,77%).

2. **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan IV-2017 (y-on-y)**

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 dibanding triwulan IV-2017 (y-on-y) tumbuh 4,77%. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,13%; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,60%; serta Informasi dan Komunikasi 6,45%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 (y-on-y), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,86%; diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,66%; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,55%.

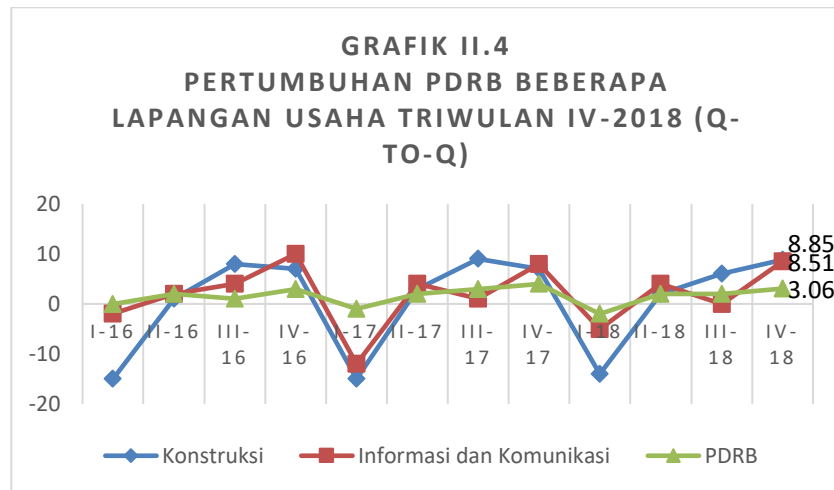


3. **Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan III-2018 (q-to-q)**

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 3,06%. Maraknya pembangunan Konstruksi serta Informasi dan Komunikasi mewarnai pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pembangunan fasilitas umum (terutama oleh pemerintah) maupun pribadi.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 (q-to-q), lapangan usaha Pertanian, Kehutanan,

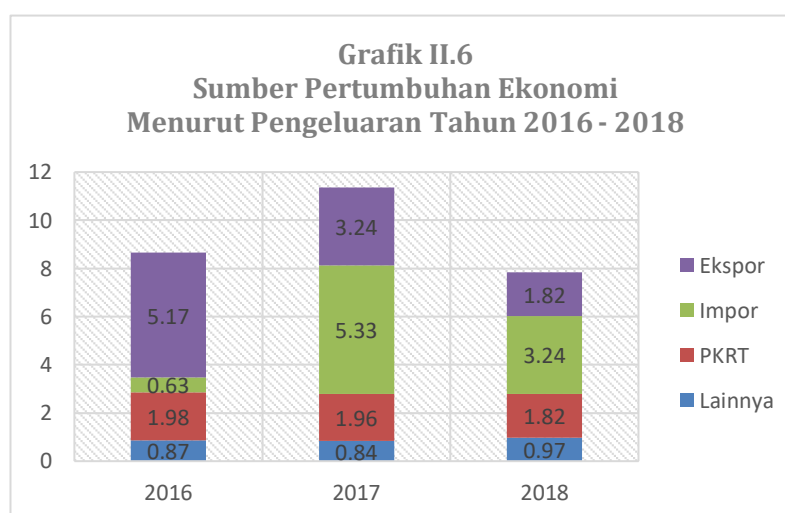
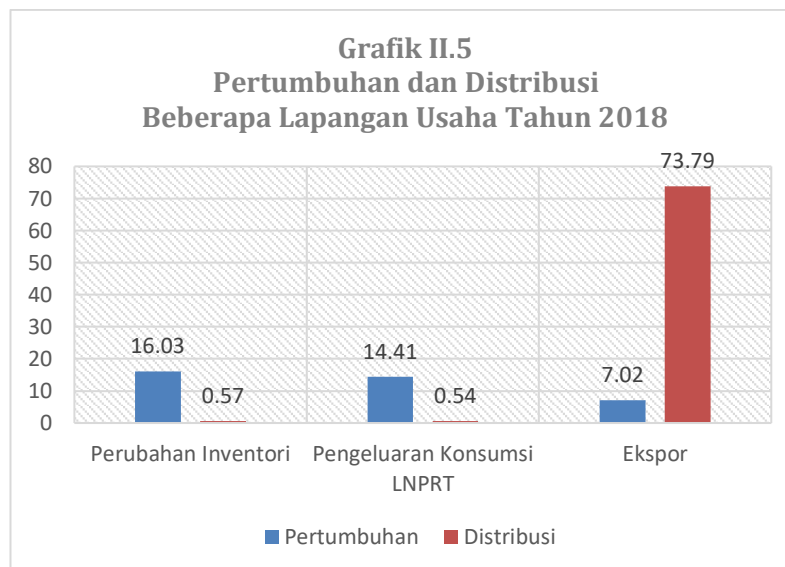
dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,21%; diikuti Konstruksi sebesar 0,64%; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,31%; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,23%.



B. PDRB menurut pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 (c-to-c)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 mencapai 4,71%, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 4,64%. Pertumbuhan tertinggi selama tahun 2018 dicapai oleh Komponen Inventori mencapai 16,03%, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mencapai 14,41%, serta Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,02%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018, Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 5,17% diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,82%, namun terkoreksi oleh Impor Barang dan Jasa sebesar 3,24%. Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2018 didominasi oleh Ekspor Barang dan Jasa (73,79%) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (42,84%).

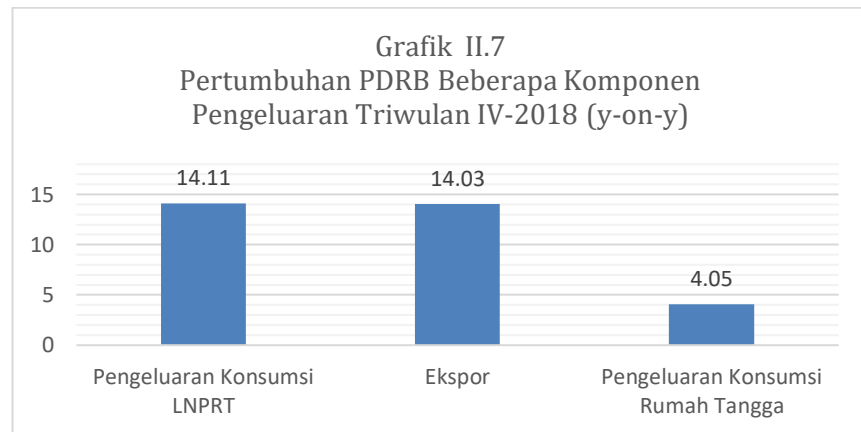


2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan IV-2017 (y-on-y)

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2018 terhadap triwulan IV-2017 (y-on-y) terjadi pada hampir semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 14,11%, kemudian komponen Ekspor sebesar 14,03% tapi terkoreksi dari sisi Impor sebesar 6,01%. Kemudian diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,05%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV- 2018 (y-on-y) pada sisi pengeluaran,

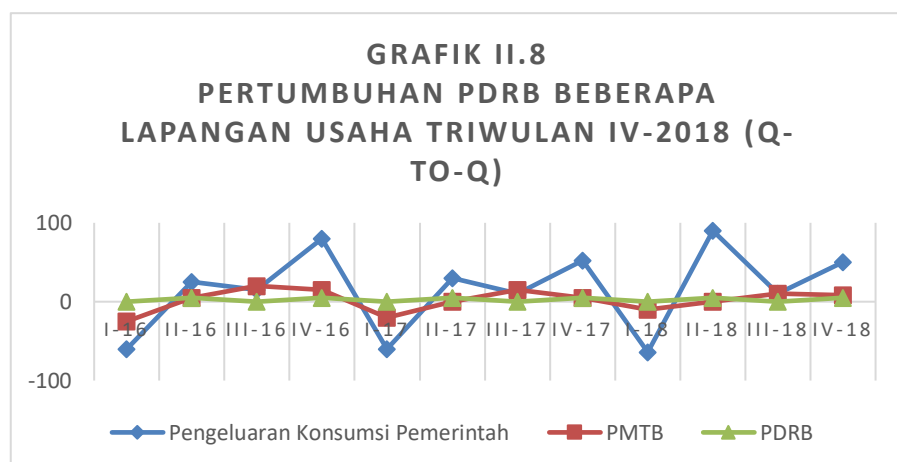
komponen Ekspor merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,98%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari komponen PK-RT sebesar 1,75%.



3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2018 Terhadap Triwulan III-2018 (*q-to-q*)

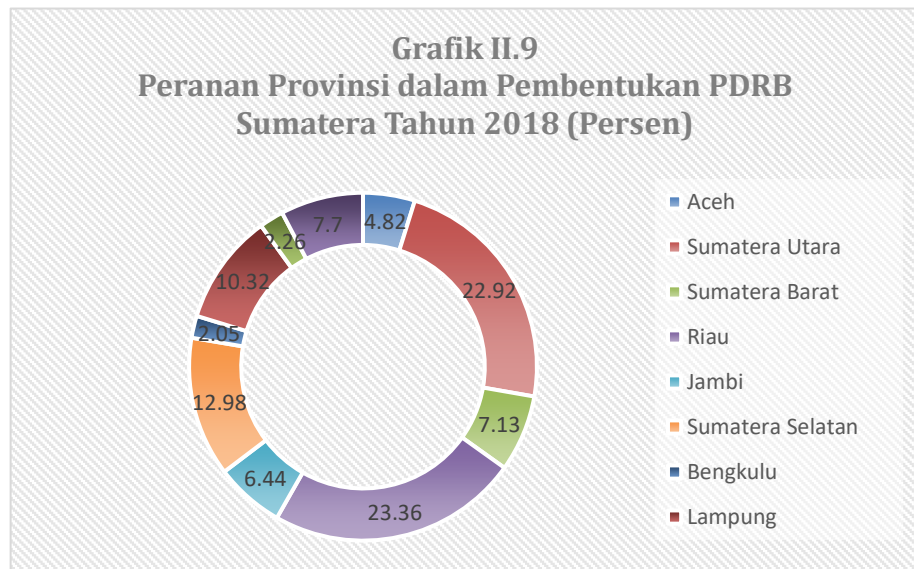
Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2018 terhadap triwulan sebelumnya (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,06%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 50,43%; diikuti oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5,74%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV- 2017 (*q-to-q*), komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,77%, diikuti Ekspor sebesar 2,42%; serta PMTB sebesar 1,25%.



C. Perbandingan PDRB se Sumatera.

Struktur perekonomian Sumatra secara spasial pada tahun 2018 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan share terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 23,36%, Sumatera Utara dengan share sebesar 22,92%, dan Sumatera Selatan sebesar 12,98%. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh, yaitu sebesar 6,44%.



Tabel II.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	51 441,8	56 355,8	57 452,8	34 933,7	36 829,1	37 742,4
B.	Pertambangan dan Penggalian	28 493,8	33 741,8	42 030,6	31 016,9	32 187,0	34 395,2
C.	Industri Pengolahan	18 046,5	19 638,6	20 780,6	14 267,7	14 698,7	15 220,4
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	103,6	121,1	133,1	68,3	69,4	73,3
E.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	247,1	265,0	282,9	178,7	183,3	191,1
F.	Konstruksi	12 065,9	13 308,0	14 732,8	9 157,0	9 818,0	10 330,5
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20 276,4	22 064,5	24 516,9	12 579,1	13 123,4	13 932,9
H.	Transportasi dan Pergudangan	5 747,7	6 231,2	6 648,3	4 235,2	4 485,6	4 696,3
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 033,1	2 293,9	2 483,4	1 406,1	1 517,9	1 619,5

J.	Informasi dan Komunikasi	6 250,8	7 107,2	7 889,6	4 619,7	4 924,7	5 305,7
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4 329,4	4 676,2	4 834,5	3 108,0	3 203,1	3 198,5
L.	Real Estat	2 730,0	2 969,0	3 223,1	1 883,1	1 969,9	2 069,3
M,N.	Jasa Perusahaan	2 072,8	2 297,0	2 489,7	1 376,8	1 436,3	1 503,5
O.	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8 085,2	8 563,1	9 588,2	4 555,7	4 670,6	4 894,8
P.	Jasa Pendidikan	5 727,5	6 309,0	6 975,1	4 277,1	4 458,5	4 680,9
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 888,7	2 091,8	2 321,7	1 491,0	1 572,9	1 660,0
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1 659,1	1 834,9	1 995,1	1 347,1	1 408,3	1 481,0
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		171 199,5	189 868,1	208 378,6	130 501,1	136 556,7	142 995,3

Tabel II.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (persen)

Lapangan Usaha		TriwIII-2018 Terhadap TriwII- 2018	TriwIV-2018 Terhadap TriwIII-2018	TriwIII-2018 Terhadap TriwII-2017	TriwIV-2018 Terhadap TriwIII-2017	Laju Pertumbu- han 2018	Sumber Pertumbuhan 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A .	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,45	4,65	2,97	2,02	2,48	0,67
B .	Pertambangan dan Penggalian	1,92	0,60	7,61	8,13	6,86	1,62
C .	Industri Pengolahan	4,28	-1,44	4,18	6,36	3,55	0,38
D .	Pengadaan Listrik dan Gas	2,69	0,37	6,38	6,60	5,61	0,00
E .	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,44	4,67	5,35	2,62	4,24	0,01
F .	Konstruksi	6,77	8,85	2,11	3,39	5,22	0,38
G .	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,60	2,29	6,33	5,54	6,17	0,59
H .	Transportasi dan Pergudangan	-1,95	4,00	2,89	2,23	4,70	0,15
I .	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,50	8,47	5,50	6,32	6,69	0,07
J .	Informasi dan Komunikasi	0,01	8,51	7,74	6,45	7,74	0,28
K .	Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,78	1,65	-2,33	-2,52	-0,14	0,00
L .	Real Estat	-0,22	2,69	4,99	4,68	5,04	0,07
M , N .	Jasa Perusahaan	0,76	5,43	4,86	5,34	4,67	0,05
O .	Administrasi Pemerintahan,	-0,12	6,83	4,87	4,72	4,80	0,16

	Pertahanan dan Jaminan SosialWajib						
P	JasaPendidikan	0,05	0,22	4,99	5,10	4,99	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	0,05	1,28	5,99	4,76	5,54	0,06
R	JasaLainnya	-3,69	6,75	4,92	4,97	5,17	0,05
S							
T							
U							
	Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)	1,76	3,06	4,77	4,77	4,71	4,71

Tabel II.3
PDRB Per Kapita Tahun 2016 -2018

Uraian		2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
-	Nilai (juta rupiah)	49,49	54,02	58,36
-	Nilai (US\$)	3 719,4	4 035,8	4 096,8
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan				
-	Nilai (juta rupiah)	37,73	38,85	40,05
-	Nilai (US\$)	2 835,2	2 902,7	2 811,3

Tabel II.4
Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018
(persen)

LapanganUsaha		Laju PertumbuhanADHK (2010=100)			DistribusiADHB		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan danPerikanan	6,36	5,43	2,48	30,05	29,68	27,57
B	Pertambangan danPenggalian	0,44	3,77	6,86	16,64	17,77	20,17
C	IndustriPengolahan	2,29	3,02	3,55	10,54	10,34	9,97
D	Pengadaan Listrik danGas	6,16	1,70	5,61	0,06	0,06	0,06

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	5,02	2,60	4,2 4	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	3,54	7,22	5,2 2	7,05	7,01	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SepedaMotor	6,94	4,33	6,1 7	11,84	11,62	11,77
H	Transportasi danPergudangan	8,29	5,91	4,7 0	3,36	3,28	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	7,65	7,95	6,6 9	1,19	1,21	1,19
J	Informasi danKomunikasi	8,51	6,60	7,7 4	3,65	3,74	3,79
K	Jasa Keuangan danAsuransi	10,38	3,06	- 0,14	2,53	2,46	2,32
L	RealEstat	4,31	4,61	5,0 4	1,59	1,56	1,55
M,N	JasaPerusahaan	5,24	4,32	4,6 7	1,21	1,21	1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jami- nan SosialWajib	3,01	2,52	4,8 0	4,72	4,51	4,60
P	JasaPendidikan	6,04	4,24	4,9 9	3,35	3,32	3,35
Q	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	6,64	5,49	5,5 4	1,10	1,10	1,11
R,S,T,U	JasaLainnya	6,59	4,54	5,1 7	0,97	0,97	0,96
Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)		4,37	4,64	4,7 1	100,00	100,00	100,00

Tabel II.5
PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

LapanganUsaha		Berlaku			Konstan		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	76982,3	83274,3	89274,2	57609,6	60166,1	62653,1
2.	Pengeluaran KonsumsiLNPR T	882,5	950,4	1124,7	668,9	686,6	785,5
3.	Pengeluaran KonsumsiPeme- rintah	14664,0	15936,6	16886,4	9754,4	10232,6	10689,6
4.	Pembentukan Modal TetapBruto	38980,9	41131,9	43304,1	29039,0	30127,5	30766,0

5.	Perubahan Inventori	1765,4	988,6	1192,6	1256,6	772,9	896,8
6.	Ekspor Barang dan Jasa	113780,1	135920,6	153766,0	91157,0	100514,5	107568,1
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	75855,7	88334,4	97169,5	58984,4	65943,4	70363,8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		171199,5	189868,1	208378,6	130501,1	136556,7	142995,3

Tabel II. 6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018 (persen)

Lapangan Usaha		TriwIII- 2018 Terhadap TriwII- 2018	TriwIV- 2018 Terhadap TriwIII- 2018	TriwIII- 2018 Terhadap TriwIII- 2017	TriwIV- 2018 Terhadap TriwIV- 2017	Laju Pertumbuhan 2018	Sumber Pertumbuhan 2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,90	0,03	4,00	4,05	4,13	1,82
2.	Pengeluaran Konsumsi LN PRT	1,54	4,54	14,85	14,11	14,41	0,07
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,29	50,43	12,30	0,44	4,47	0,33
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,02	5,74	0,08	0,21	2,12	0,47
5.	Perubahan Inventori	84,21	-	-	-	16,03	0,09
6.	Ekspor Barang dan Jasa	10,48	187,08	256,61	196,41	7,02	5,17
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	19,69	3,40	1,69	14,03	6,70	3,24
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1,76	3,06	4,77	4,77	4,71	4,71

Tabel II.7
Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan ADHK (2010=100)			Distribusi ADHB		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,49	4,44	4,13	44,97	43,86	42,84
2.	Pengeluaran Konsumsi LN PRT	2,35	2,64	14,41	0,52	0,50	0,54
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,89	4,90	4,47	8,57	8,39	8,10

4.	Pembentukan Modal TetapBruto	4,33	3,75	2,12	22,77	21,66	20,78
5.	PerubahanInventori	-3,26	-38,50	16,03	1,03	0,52	0,57
6.	Ekspor Barang danJasa	3,03	10,27	7,02	66,46	71,59	73,79
7.	Dikurangi Impor Barang danJasa	1,35	11,80	6,70	44,31	46,52	46,63
Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)		4,37	4,64	4,71	100,00	100,00	100,00

Tabel II.8
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera (persen)

Provinsi	Tahun2018	
	LajuPertumbuhan	Distribusi
(1)	(2)	(3)
Aceh	4,61	4,82
SumatraUtara	5,18	22,92
SumatraBarat	5,14	7,13
Riau	2,34	23,36
Jambi	4,71	6,44
SumatraSelatan	6,04	12,98
Bengkulu	4,99	2,05
Lampung	5,25	10,32
Kepulauan BangkaBelitung	4,45	2,26
KepulauanRiau	4,56	7,70

D. INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2018 tercatat 2,97% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya sebesar 3,34% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,13% (yoy). Perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 3,02% (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 2,46% (yoy).

Inflasi di Kota Jambi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4,73% (yoy) dengan memberikan kontribusiterhadap inflasi sebesar 0,86%. Inflasi pada

kelompok ini disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring tingginya permintaan selama Natal dan libur akhir tahun. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,78% dengan laju inflasi 3,49% (yoy).

Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian tarif air minum PAM menyusul keputusan Walikota Jambi yang menetapkan kenaikan tarif bulan Agustus 2018. Lebih lanjut, inflasi juga bersumber dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 4,10% (yoy) berkontribusi sebesar 0,72%. Inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan cukai rokok.

Inflasi Bungo pada Triwulan IV 2018 terutama dipicu oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,81% (yoy) atau berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,81%. Inflasi kelompok tersebut disebabkan oleh peningkatan volume konsumsi masyarakat dan kenaikan harga rokok akibat penyesuaian tarif cukai sejak awal tahun 2018.

E. Neraca Perdagangan.

Nilai ekspor Provinsi Jambi kembali menunjukkan peningkatan pada Triwulan IV Tahun 2018 disertai kontraksi disisi impor . Nilai ekspor pada Triwulan IV Tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 50,18% (yoy) sedangkan nilai impor mengalami kontraksi sebesar 34,51% (yoy). Secara nominal, nilai ekspor Provinsi Jambi pada Triwulan IV Tahun 2018 mencapai USD 877,71 juta dan nilai impor sebesar USD 13,62 juta. Pertumbuhan nilai ekspor terutama kontribusi dari peningkatan ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan menguatnya permintaan terhadap komoditas energi primer. Ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan menguatnya permintaan terhadap komunitas energi primer. Ekspor komoditas pertambangan tercatat sebesar USD 590,94 juta atau meningkat 126,17% (yoy) pada Triwulan IV- 2018. Sedangkan, kontraksi di sisi impor terutama disebabkan oleh tren penguatan Dollar yang berdampak pada meningkatnya beban importir. Kelompok komoditas yang mengalami kontraksi paling besar adalah mesin dan alat angkut sedangkan komoditas yang tercatat masih mengalami kenaikan adalah bahan kimia. Total nilai impor pada triwulan empat 2018 tercatat sebesar USD 13,62 juta.

Selain komoditas pertambangan, ekspor non migas Provinsi Jambi menunjukkan penurunan sejalan dengan pelemahan harga komoditas pertanian di Pasar Internasional. Pertumbuhan ekspor non migas mengalami kontraksi sebesar 10,10% (yoy) disebabkan oleh penurunan ekspor *pulp* dan karet mentah. Kondisi tersebut sejalan dengan lemahnya permintaan terhadap komoditas pertanian terutama subsektor perkebunan di tengah pasokan yang melimpah.

Ke depan, pertumbuhan ekspor diperkirakan positif pada triwulan pertama 2019 meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor terutama akan didorong oleh permintaan eksternal terhadap komoditas minyak dan batu bara yang diestimasi menguat selama musim dingin di kawasan Eropa, Amerika Serikat dan sebagian Asia. Meskipun kebutuhan energi primer diperkirakan tidak akan melonjak terlalu tinggi, disebabkan suhu musim dingin yang lebih hangat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain komoditas energi primer, permintaan terhadap komoditas kelapa sawit juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Faktor utama yang akan mendorong peningkatan ekspor kelapa sawit adalah penurunan tarif bea masuk per 1 Januari 2019 untuk minyak kelapa sawit menjadi 40% dari sebelumnya 44% dan produk olahan minyak kelapa sawit menjadi 50% dari sebelumnya 54%. Di sisi lain, permintaan eksternal terhadap komoditas *pulp* dan kertas masih prospektif terutama didorong oleh tingginya konsumsi kertas di Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menguasai 26% dari total volume konsumsi kertas dunia dan diperkirakan terus meningkat ke depan. Dalam sepuluh tahun terakhir, konsumsi kertas Tiongkok meningkat signifikan dari rata-rata 60 juta ton menjadi 97 juta ton. Peningkatan konsumsi Tiongkok tersebut akan berdampak positif terhadap komoditas *pulp* and *paper* yang merupakan salah satu unggulan Provinsi Jambi.

1. Ekspor Luar Negeri Non Migas

Menguatnya permintaan eksternal terhadap komoditas kelapa sawit pada Triwulan IV-2018 belum mampu menahan penurunan kinerja ekspor non migas pada Triwulan IV-2018. Sejalan dengan perkembangan ekspor, impor non migas juga tercatat mengalami kontraksi pada triwulan IV 2018.

Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), nilai ekspor luar negeri non migas pada Triwulan IV-2018 tercatat USD 311,21 juta atau terkontraksi 10,10% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 7,79% (yoy). Penurunan kinerja ekspor non migas Provinsi Jambi disebabkan oleh penurunan ekspor hampir seluruh komoditas kecuali minyak nabati dan buah-buahan. Sementara, impor non migas pada Triwulan IV-2018 tercatat sebesar USD12,30 juta atau terkontraksi 37,24% (yoy) lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 34,16% (yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jambi tercatat mengalami net ekspor sebesar USD298,92 Juta atau terkontraksi 8,47% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 6,21% (yoy).

Kontribusi ekspor non migas terbesar masih bersumber dari komoditas karet mentah (*crude rubber*) sebesar USD120,11 juta atau 39% dari total ekspor luar negeri non migas. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas minyak dan lemak nabati sebesar USD53,35 juta atau 17% dari total ekspor. Sedangkan komoditas *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya memiliki pangsa 13% dengan nilai ekspor sebesar USD39,73 juta. Selain itu, ekspor komoditas buah-buahan dan sayuran tercatat sebesar USD37,97 juta dengan pangsa 12%, serta komoditas batu bara, kokas dan briket sebesar USD24,59 juta dengan pangsa 8%.

Penurunan ekspor non migas pada Triwulan IV-2018 terutama disebabkan pada komoditas karet dan komoditas *pulp* disebabkan oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa serta meningkatnya ketegangan perdagangan. Menurunnya aktivitas ekonomi Tiongkok sepanjang tahun 2018 mengakibatkan tekanan pada komoditas pertanian mengingat negara tersebut merupakan mitra dagang utama Provinsi Jambi terutama untuk komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit). Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa yang berdampak pada penurunan industri otomotif mengakibatkan konsumsi karet alam untuk bahan baku ban juga mengalami penurunan. Sementara permasalahan di tingkat regional berkaitan dengan konflik jalur angkutan batu bara dan pembatasan jam operasional angkutan batu bara. Konflik tersebut berdampak pada waktu pengangkutan yang lebih panjang sehingga mengakibatkan peningkatan

biaya operasional dan penurunan kinerja ekspor batu bara pada triwulan empat 2018.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Malaysia tercatat sebagai negara tujuan ekspor utama Provinsi Jambi dengan pangsa sebesar 17% dari total ekspor non migas. Nilai ekspor ke Malaysia pada Triwulan IV-2018 mencapai USD 51,89 juta. Selanjutnya, diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar USD 46,29 juta (pangsa 15% dari total ekspor), Jepang dengan nilai ekspor USD 36,69 juta (pangsa 12% dari total ekspor), India dengan nilai USD 23,98 juta (pangsa 8% dari total ekspor), Eropa dengan nilai ekspor USD 19,07 juta (pangsa 6% dari total ekspor) dan Tiongkok dengan nilai ekspor USD 17,26 juta (pangsa 5% dari total ekspor).

2. Impor Luar Negeri Non Migas

Impor non migas kembali melanjutkan penurunan pada Triwulan IV-2018 setelah pada triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi. Nilai impor non migas pada Triwulan IV-2018 mencapai USD 12,30 juta atau terkontraksi 37,24% (yoy). Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 13,25 juta atau terkontraksi sebesar USD 34,16% (yoy). Penurunan impor terutama bersumber dari kelompok mesin industri dan perlengkapannya, kertas dan bubur kertas serta alat pengangkut lainnya.

Meskipun mengalami penurunan pada Triwulan IV-2018, kelompok kertas dan bubur masih menjadi penyumbang terbesar impor dengan nilai sebesar USD 4,66 juta (pangsa 38% dari total impor). Impor kertas dan bubur kertas digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, kertas karton dan olahannya yang merupakan salah satu komoditas ekspor non migas unggulan Provinsi Jambi. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok kimia non organik dengan nilai impor USD 1,73 juta (pangsa 14% dari total impor), kelompok pupuk dan mineral alam lainnya dengan nilai impor USD 1,24 juta (pangsa 10% dari total impor), serta kelompok mesin industri dan perlengkapannya sebesar USD 1,13 juta (pangsa 9% dari total impor) pengangkutan lainnya.

F. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV-2018 masih tumbuh terbatas setelah triwulan sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan investasi yang dinyatakan dalam PDMTB tumbuh 0,21% (yoy) pada triwulan empat 2018, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,08% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2017 yang berkontraksi sebesar 3,16% (yoy). Berdasarkan andilnya, komponen PDMTB memberikan andil sebesar 0,05% terhadap total pertumbuhan triwulan IV-2018. Pertumbuhan investasi triwulan empat 2018 terutama ditopang oleh ekspansi kegiatan usaha di sektor pertambangan dan industri pengolahan khususnya industri makanan. Beberapa pengerjaan proyek yang berlangsung pada triwulan IV-2018 mencakup pembangunan industri *cement mill* dan pengembangan pusat perbelanjaan. Kondisi tersebut sejalan dengan penyaluran kredit investasi yang mencatat pertumbuhan sebesar 8,55% (yoy) atau secara nominal mencapai Rp8,49 triliun.

Perkembangan kinerja investasi sejalan dengan data realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDM) pada triwulan IV-2018. Realisasi PMA tercatat tumbuh 142,71% (yoy) dengan nilai sebesar USD 37,13 juta. Sebaliknya, penanaman modal oleh investor dalam negeri mengalami kontraksi sebesar 87,50% (yoy) atau dengan nilai investasi sebesar Rp206,57 miliar pada triwulan IV-2018.

Kinerja investasi diperkirakan tumbuh positif pada triwulan I-2019 namun relatif terbatas mengingat pelaku usaha akan melakukan proses konsolidasi awal tahun. Beberapa proyek investasi yang telah berjalan pada tahun 2018 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2019 yaitu pendirian *cement mill*, penambahan jaringan rumah sakit lokal dan pembangunan pusat perbelanjaan. Sementara, dampak penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 diproyeksikan tidak terlalu besar menahan pertumbuhan investasi sesuai tren data historis pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu sebelumnya.

Salah satu masalah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi

terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk mencapai satu satuan produksi dimana semakin kecil nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi makin efisien.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dan sekaligus menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (*Flow of Fund*), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi Jambi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*);
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN;
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

G. Lingkungan Eksternal dan Internal.

Gambaran ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2018 akan dipengaruhi lingkungan eksternal sebagai akibat semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian regional dan nasional serta negara tetangga yang diperkirakan masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
3. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

H. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2018, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan

kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

2.1.2. Arah kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2018

Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2018, meliputi :

1. Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:
 - a) Mendorong perbaikan kinerja sektor perkebunan melalui penciptaan pasar domestik dan melakukan inisiatif penjangkauan perluasan pasar ekspor. Pengembangan pasar domestik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengembangkan pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur.
 - b) Mendorong percepatan realisasi anggaran APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama anggaran belanja modal pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, saluran irigasi dan pelabuhan) dalam rangka peningkatan konektivitas dan perdagangan antar daerah.
 - c) Mengoptimalkan program *cash for work* dana desa untuk pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka perbaikan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan petani, terutama melalui penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.

- d) Mengantisipasi perlambatan konsumsi rumah tangga dengan memastikan bahwa realisasi program bantuan sosial dan/atau subsidi terkait penanggulangan kemiskinan seperti penyaluran Program Keluarga Harapan, program bantuan pangan dan Rastra, serta program jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat *bottom of the pyramid* dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
 - e) Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA melalui :
 - Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif
 - Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/ perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur)
 - Insentif bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan permodalan, bantuan promosi, penyediaan SDM yang unggul melalui kerjasama dengan SMK dan Perguruan Tinggi
 - Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan Jambi
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, melalui :
- a) Pelaksanaan program peremajaan tanaman (*replanting*) tanaman kelapa sawit dan karet berbasis perkebunan rakyat
 - b) Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan :
 - Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang terlalu panjang serta mendorong terciptanya *corporate farming*.
 - Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura)

- Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani
- c) Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan izin, pembiayaan dan pengembangan serta didukung dengan :
- Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna melalui penguatan laboratorium uji SNI dan sertifikasi produk
 - Membangun pendidikan vokasi yang menunjang kebutuhan pengembangan industri karet melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di daerah.
3. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :
- Melakukan pemantauan terhadap penerapan harga acuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan penjualan di Konsumen, termasuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
 - Pengawasan terhadap ketersediaan cadangan bahan pokok melalui pemantauan rutin serta mendorong kerjasama dengan daerah sentra penghasil
 - Pengembangan *database* TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga
 - Mendorong pengembangan sentra produksi lokal untuk komoditas bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi
 - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2018 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2018, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1. Keuangan Daerah.

2.2.1.1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Total Realisasi Pendapatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 104,71% atau Rp4,412 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2018 sebesar Rp4,214 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 2% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp4,309

triliyun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan melalui intensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah, diantaranya dengan melakukan pemutihan PKB dan BBNKB serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Realisasi Pendapatan sebagaimana penjelasan diatas, masing masing bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,657 triliyun atau memiliki kontribusi sebesar 37,55% terhadap total realisasi pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2,754 triliyun atau memiliki kontribusi sebesar 62,41% terhadap total pendapatan serta dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1,548 milyar atau memiliki kontribusi sebesar 0,04% dari total Pendapatan.

Berdasarkan Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp1,657 triliyun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1,577 triliyun, mengalami kenaikan sebesar Rp80 milyar atau 5,07%, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2018 sebesar Rp2,754 triliyun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2,723 triliyun, mengalami kenaikan sebesar Rp31 milyar atau 1,14%, demikian juga realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018 sebesar Rp1,548 milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp8,227 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp6,679 milyar atau 81,18%.

Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp1,657 triliyun, masing-masing bersumber dari ; pajak daerah sebesar Rp1,374 triliyun, retribusi daerah sebesar Rp20,208 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp30,511 milyar serta dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp231,560 milyar.

Realisasi pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp1,374 triliyun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1,316 triliyun mengalami peningkatan sebesar Rp58 milyar atau 4,41%, sedangkan realisasi retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp20,208

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp16,981 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp3,227 milyar atau 19,00% demikian juga realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 sebesar Rp30,511 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp29,054 mengalami peningkatan sebesar Rp1,457 milyar atau 5,01%, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp231,561 milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp215,223 milyar berarti mengalami kenaikan sebesar Rp16,338 milyar atau 7,82%.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 sebesar Rp1,374 triliun, masing-masing bersumber dari ; realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp444,056 milyar, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp406,098 milyar, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp332,619 milyar, realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1,401 milyar dan realisasi Pajak Rokok sebesar Rp190,113 milyar.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 sebesar Rp20,208 milyar, yang bersumber dari ; realisasi retribusi jasa umum sebesar Rp1,243 milyar, realisasi retribusi jasa usaha sebesar Rp18,538 milyar dan dari realisasi retribusi perizinan tertentu sebesar Rp427,132 juta.

Sedangkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2018 sebesar Rp30,511 milyar, yang bersumber dari ; realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (PT. Bank Jambi) sebesar Rp28.764 milyar, realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN (PT. Asuransi Bangun Askrida) sebesar Rp571,714 juta serta kontribusi dari realisasi bagian laba perusahaan swasta sebesar Rp1,175 milyar.

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2018 sebesar Rp231,561 milyar yang bersumber dari ; realisasi Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (pelepasan hak atas tanah)

sebesar Rp2,248 milyar, realisasi penerimaan jasa giro sebesar Rp6,073 milyar, realisasi penerimaan Bunga deposito sebesar Rp45,592 milyar, realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp4,350 juta, realisasi pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp630,928 juta, realisasi pendapatan denda pajak sebesar Rp12,050 milyar, realisasi pendapatan denda retribusi sebesar Rp5,430 juta, realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp146,347 milyar, realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp1,253 milyar, realisasi hasil penjualan aset lainnya Rp628,742 juta dan dari realisasi Penerimaan lain-lain sebesar Rp17,237 milyar.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2018 terdiri dari; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan total penerimaan sebesar Rp2,754 trilyun dengan rincian ; Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,745 trilyun, masing-masing yang bersumber dari ; Bagi Hasil Pajak sebesar Rp168,558 milyar, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp238,247 milyar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,399 trilyun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp939,050 milyar, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp9,125 milyar yang bersumber dari Dana Penyesuaian.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2018 sebesar Rp2,754 trilyun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2,723 trilyun mengalami peningkatan sebesar Rp31 milyar atau 1,14%

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018 sebesar Rp1,548 milyar, bersumber dari realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp1,548 milyar dan realisasi Pendapatan lainnya sebesar Rp0,-. Jika realisasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018 tersebut sebesar Rp1,548 milyar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp8,227 terdapat penurunan sebesar Rp6,679 milyar atau 81,18%

2.2.1.2. Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi ; Belanja operasional, Belanja modal dan Belanja tak terduga.

Total realisasi Belanja Daerah yang dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 89,21% atau Rp3,525 triliun dari anggaran setelah perubahan 2018 sebesar Rp3,951 triliun. Realisasi tersebut secara nominal lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3,550 triliun.

Realisasi Belanja tahun 2018 sebesar Rp3,525 triliun, masing-masing merupakan realisasi dari ; Belanja operasi sebesar Rp2,740 triliun atau memiliki proporsi sebesar 77,723%, Belanja modal sebesar Rp785,23 milyar atau memiliki proporsi sebesar 22,275%, Belanja tidak terduga sebesar Rp96,682 juta atau memiliki proporsi sebesar 0,002%.

2.2.1.3. Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah meliputi ; Transfer bagi hasil pendapatan (transfer Bagi Hasil Pajak Daerah) dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Total realisasi Transfer ke Daerah yang dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 93,54% atau Rp673,476 milyar dari anggaran setelah perubahan 2018 sebesar Rp720,011 milyar. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp583,168 milyar.

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2018 sebesar Rp673,476 milyar, masing-masing merupakan realisasi dari ; Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Bagi Hasil Pajak Daerah) sebesar Rp579,768 milyar atau memiliki proporsi sebesar 86,086% dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa serta

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya) sebesar Rp93,707 milyar atau memiliki proporsi sebesar 13,914%.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 4) Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi
- 5) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan

- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM)
- 8) Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT
- 9) *QuickResponse*
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata
- 11) Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat
- 13) Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 14) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- 15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah
- 16) Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
- 17) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 18) Peningkatan pelestarian budaya lokal
- 19) Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah
- 20) Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan
- 21) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
- 22) Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat
- 23) Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 24) Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat
- 25) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- 26) Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan *entrepreneur*

- 27) Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan *entrepreneur*
- 28) Penguatan budaya IPTEKIN dan *entrepreneur* melalui proses pendidikan dan kebudayaan
- 29) Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan *entrepreneurship*
- 30) Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan *entrepreneurship*
- 31) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 32) Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier
- 33) Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan
- 34) Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
- 35) Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri
- 36) Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
- 37) Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD
- 38) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya
- 39) Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi
- 40) Meningkatkan UMKM binaan
- 41) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 42) Meningkatkan akses terhadap bahan pangan
- 43) Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
- 44) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah
- 45) Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
- 46) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi

- 47) Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan
- 48) Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat
- 49) Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi
- 50) Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi
- 51) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik
- 52) Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
- 53) Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa
- 54) Pengendalian daya rusak air
- 55) Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah
- 56) Menerapkan *goodminingpractice*
- 57) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 58) Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
- 59) Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri
- 60) Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA
- 61) Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya
- 62) Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat
- 63) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- 64) Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan
- 65) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
- 66) Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang
- 67) Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
- 68) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
- 69) Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan

- 70) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
- 71) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja
- 72) Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan
- 73) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya *Total Factor Productivity* (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018, maka anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp4.213.996.839.621,44 anggaran belanja sebesar Rp3.951.057.398.183,80 Transfer Rp720.011.412.320,00 penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp457.071.970.882,36 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	4.213.996.839.621,44	4.412.464.565.281,27	104,71
2	Belanja	3.944.637.398.183,80	3.518.360.175.187,41	89,19
3	Transfer	726.431.412.320,00	679.895.543.087,90	93,59
	Surplus (Defisit)	(457.071.970.882,36)	214.208.847.005,96	(46,87)
4	Pembiayaan			
	- Penerimaan	457.071.970.882,36	457.071.970.882,36	100,00
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0
	Pembiayaan	457.071.970.882,36	457.071.970.882,36	100,00

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp4.213.996.839.621,44 dapat direalisasikan sebesar Rp4.412.464.565.281,27 atau 104,71% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp3.944.637.398.183,80 direalisasikan sebesar Rp3.518.360.175.187,41 atau 89,19% dari anggaran sedangkan transfer yang dianggarkan sebesar Rp726.431.412.320,00 direalisasikan sebesar Rp679.895.543.087,90 Dengan

demikian dari anggaran defisit sebesar Rp457.071.970.882,36 direalisasikan Surplus sebesar Rp214.208.847.005,96.

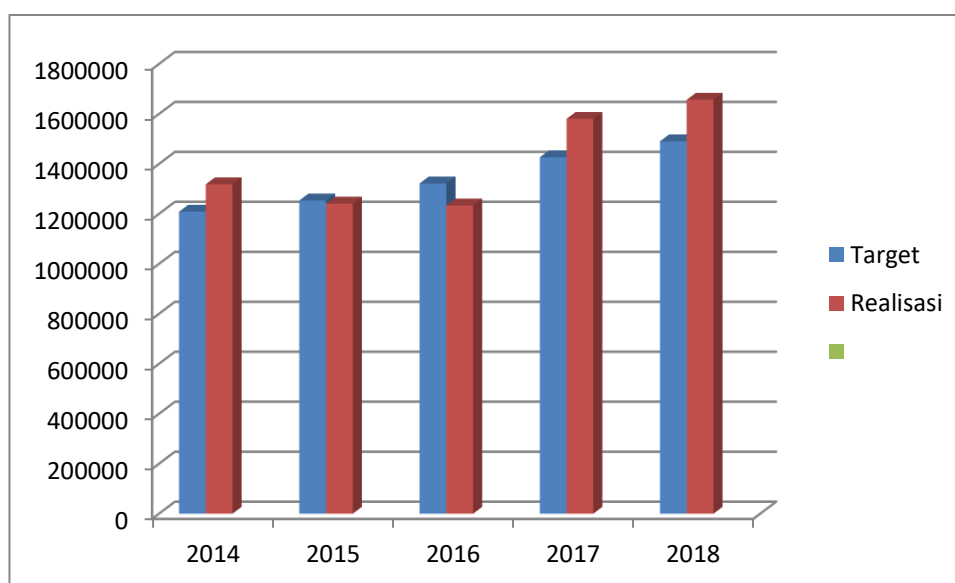
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013 sampai dengan 2018 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2014 s.d. 2018

(dalam rupiah)

No .	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2014	1.208.837.984.507,67	33,94	1.318.523.706.213,24	23,94
2.	2015	1.253.624.335.381,67	3,70	1.241.223.028.011,76	(5,86)
3.	2016	1.321.867.908.750,82	5,44	1.233.514.664.109,54	(0,62)
4.	2017	1.426.696.725.798,00	7,35	1.580.304.867.342,36	21,94
5.	2018	1.490.504.569.321,44	4,48	1.656.569.597.282,27	4,85

**Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi
PAD TA 2014 s.d. 2018**



Secara keseluruhan dari TA 2014 sampai dengan TA 2018 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun di TA 2018 walaupun target mengalami kenaikan tetapi realisasinya mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2014 sampai dengan TA 2015 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp44.786.350.874,00 atau sebesar 3,70%, TA 2015 sampai dengan TA 2016 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp68.243.573.369,15 atau sebesar 5,44%, TA 2016 sampai TA 2017 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp104.828.817.047,18 atau 7,35%, TA 2017 sampai TA 2018 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp63.807.843.523,44 atau 4,48%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, TA 2014 sampai dengan TA 2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp77.300.678.201,48 atau sebesar 5,86%, TA 2015 sampai dengan TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.708.363.902,22 atau 0,62%, TA 2016 sampai dengan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp346.790.203.232,82 atau 21,94%, dan TA 2017 sampai dengan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp76.264.729.939,91 atau 4,85%.

Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp2.754.346.967.999,00 atau 101,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.721.885.858.300,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan grafik 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan
TA 2014 – 2018**

(dalam rupiah)

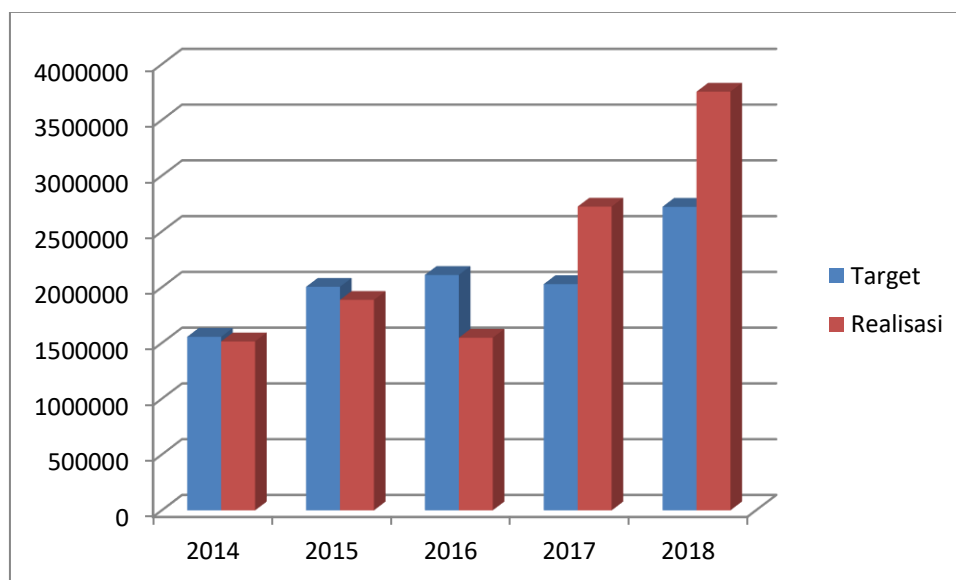
No .	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2014	1.556.188.248.079,00	12,29	1.514.518.389.008,00	1,66
2.	2015	2.004.453.463.653,32	28,81	1.887.051.548.864,00	24,60
3.	2016	2.110.651.958.000,00	5,29	1.547.888.628.454,00	14,44
4.	2017	2.028.612.287.504,00	-4,04	2.723.260.588.950,00	43,16
5.	2018	2.721.885.858.300,00	34,17	2.754.346.967.999,00	1,15

Dilihat dari sisi target anggaran perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer terus mengalami peningkatan dimana pada TA 2014 ke TA 2015 sebesar 28,81%, TA 2015 ke TA 2016 sebesar 5,29%, TA 2016 ke TA 2017 turun sebesar -4,04%, dan TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 34,17%.

Kemudian dari sisi Realisasi Perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan pada TA 2014 ke TA 2015 sebesar 24,60%

, pada TA 2015 ke TA2016 mengalami peningkatan sebesar 14,44% dan TA 2016 ke TA 2017 sebesar 43.16%, dan TA 2017 ke TA 2018 naik sebesar 1.15%.

**Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2014 s.d. 2018**



Penerimaan yang ada pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah. Bila dilihat dari *trend* penerimaan, bahwa Dana Perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2018 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.944.637.398.183,80 dan direalisasikan sebesar Rp3.518.360.175.187,41 atau 89,19% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp426.277.222.996,4. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi TA 2018 dengan target sebesar Rp2.936.556.413.045,80 terealisasi sebesar Rp2.733.539.585.386,48 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Operasi TA 2018
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	1.400.473.431.074,83	1.303.794.986.013,66	93,10
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.032.311.043.970,97	941.766.705.944,82	91,23
3.	Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
4.	Belanja Hibah	503.035.738.000,00	487.359.693.428,00	96,88
5.	Belanja Bantuan Sosial	236.200.000,00	118.200.000,00	50,04
J u m l a h		2.936.556.413.045,80	Rp2.733.539.585.386,48	93,09

Pada TA 2018, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.004.988.485.138,00 dan terealisasi sebesar Rp784.723.907.609,16 atau 78,08% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	14.450.146.100,00	1.477.206.406,00	78,13
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.245.783.253,00	120.900.807.250,20	10,22
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.011.601.201,00	136.265.370.912,44	73,26
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	634.635.466.912,00	505.320.632.964,52	79,62
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	20.645.487.672,00	20.759.890.076,00	100,55
J u m l a h		1.004.988.485.138,00	784.723.907.609,16	78,08

Untuk belanja tidak terduga tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp3.092.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.682.191,77 atau 3,13%.

Terakhir adalah belanja transfer pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp726.431.412.320,00 terealisasi sebesar Rp679.895.543.087,90 atau 93,59% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2018
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
-----	---------------	--------	-----------	---

		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	593.304.017.920,00	579.768.148.687,90	97,72
2.	Transfer Bantuan Keuangan	133.127.394.400,00	100.127.394.400,00	75,21
J u m l a h		720.011.412.320,00	673.475.543.087,90	93,59

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp457.071.970.882,36 dapat direalisasikan sebesar 100%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp457.071.970.882,36) direalisasikan surplus sebesar Rp214.208.847.005,96 yang berasal dari efisiensi belanja sebesar Rp426.277.222.996,4 dan menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp671.283.430.388,32.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*,

yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LOdijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasansecararincimengenai pengakuannya tercantum sebagaimanadalam PeraturanGubernur Jambi Nomor 56 Tahun2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;

- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);

- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk

persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kasdi kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;

- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi Non Permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;

- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain (Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewenangan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya. (Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2018 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2018.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2018, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp4.412.464.565.281,27	Rp4.311.792.610.112,36

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2018 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.213.996.839.621,44 dan terealisasi sebesar Rp4.412.464.565.281,27 atau sebesar 104,71% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2018 dan 2017

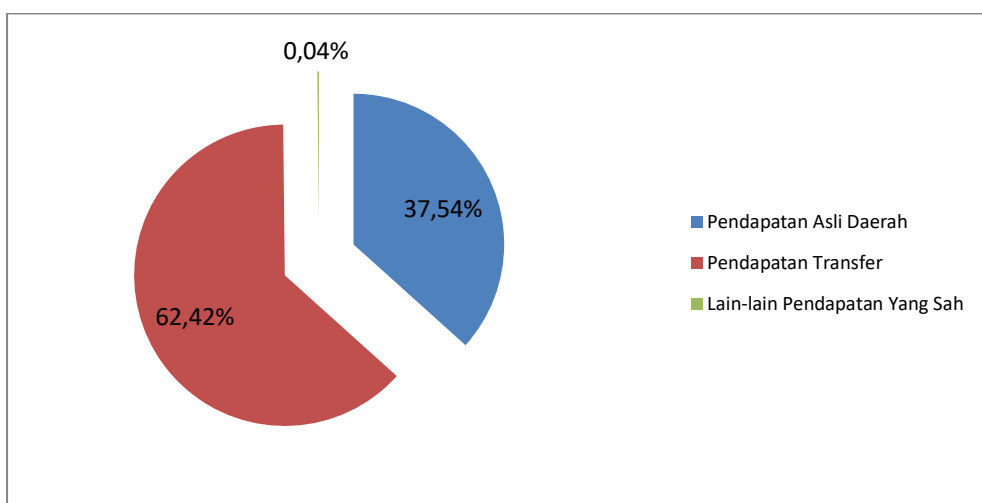
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.490.504.569.321,44	1.656.569.597.282,27	111,14	1.580.304.867.342,36
2.	Pendapatan Transfer	2.721.885.858.300,00	2.754.346.967.999,00	101,19	2.723.260.588.950,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.606.412.000,00	1.548.000.000,00	96,36	8.227.153.820,00
Jumlah		4.213.996.839.621,44	4.412.464.565.281,27	104,71	4.311.792.610.112,36

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan pendapatan mencapai target, namun dilihat dari rincian pendapatan terdapat 1 (satu) komponen yang tidak mencapai realisasi diatas 100%. dibandingkan dengan tahun 2017 naik sebesar Rp100.671.955.168,91 atau sebesar 2,33%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 37,54% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 62,42% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,04% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan – LRA TA 2018



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 62,42% dari keseluruhan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp1.656.569.597.282,27	Rp1.580.304.867.342,36

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp1.490.504.569.321,44 dengan realisasi sebesar Rp1.656.569.597.282,27 atau sebesar 111,14% atau naik sebesar Rp76.264.729.939,91 atau sebesar 4,83% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 sebesar Rp1.580.304.867.342,36. Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 37,54%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	% thd PAD	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.274.595.521.710,44	1.374.289.409.975,47	107,82	82,96	1.316.162.467.485,16
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.898.960.000,00	20.208.219.913,00	96,69	1,22	19.864.952.006,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30.115.495.741,00	30.511.006.521,83	101,31	1,84	29.054.470.466,63
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.894.591.870,00	231.560.960.871,97	140,43	13,98	215.222.977.384,57
	Jumlah	1.490.504.569.321,44	1.656.569.597.282,27	111,14	100	1.580.304.867.342,36

**5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp1.374.289.409.975,47 Rp1.316.162.467.485,16**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jambi Nomor 06 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pada TA 2018, seluruh pendapatan pajak daerah dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah dan merupakan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2018, kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak rokok. Badan Keuangan Daerah membawahi 10 UPTB khusus untuk menangani Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. UPTB tersebut berlokasi di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci.

Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.274.595.521.710,44 dengan realisasi sebesar Rp1.374.289.409.975,47 atau sebesar 107,82%, naik sebesar Rp58.126.942.490,31 atau sebesar 4,42% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp1.316.162.467.485,16. Rincian anggaran dan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
-----	--------	---------------	----------------	---	----------------

1.	Pajak Kendaraan Bermotor	438.223.861.432,00	444.056.622.162,00	101,33	416.706.232.791,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	350.283.133.090,00	406.098.313.000,00	115,93	329.507.745.800,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	315.383.156.381,00	332.619.004.479,47	105,47	300.364.910.839,16
4.	Pajak Air Permukaan	1.426.880.000,00	1.401.946.005,00	98,25	1.227.053.782,00
5.	Pajak Rokok	169.278.490.807,44	190.113.524.329,00	112,31	268.356.524.273,00
Jumlah		1.274.595.521.710,44	1.374.289.409.975,47	107,82	1.316.162.467.485,16

5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp20.208.219.913,00 Rp19.864.952.006,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp20.898.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.208.219.913,00 atau sebesar 96,69%, naik sebesar Rp343.267.907 ,00 atau sebesar 1,73% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 sebesar Rp19.864.952.006,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Retribusi Jasa Umum	1.500.000.000,00	1.243.455.000,00	82,90	1.715.642.500,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	18.938.960.000,00	18.537.632.113,00	97,88	17.239.470.028,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	460.000.000,00	427.132.800,00	92,85	4.200.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				399.871.278,00
5.	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				505.768.200,00
Jumlah		20.898.960.000,00	20.208.219.913,00	96,69	19.864.952.006,00

1. Retribusi Jasa Umum 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp1.243.455.000,00 Rp1.715.642.500,00

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.243.455.000,00 atau sebesar 82,90%, turun sebesar Rp472.187.500,00 atau sebesar 27,52% dari realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2017 sebesar Rp1.715.642.500,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang merupakan pelunasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2018, adapun di tahun 2017 realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan dan direalisasikan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Dinas Pendidikan yang merupakan pelunasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan tahun 2017.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.500.000.000,00	1.243.455.000,00	82,90	1.403.400.000,00
2.	Retribusi Pelayanan	0,00	0,00		0,00
3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00		0,00
4.	Retribusi Pelayanan / Tera Ulang	0,00	0,00		312.242.500,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.243.455.000,00	82,90	1.715.642.500,00

**2. Retribusi Jasa Usaha 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp18.537.632.113,00 Rp17.239.470.028,00**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp18.938.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.537.632.113,00 atau sebesar 97,88% naik sebesar Rp1.298.162.085,00 atau sebesar 7,53% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2017 sebesar Rp17.239.470.028,00.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.812.150.000,00	2.950.324.000,00	104,91%	2.884.095.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	2.812.150.000,00	2.950.324.000,00		2.884.095.000,00
2.	Dinas Perkebunan	1.665.000.000,00	1.662.113.800,00	99,83%	2.843.248.677,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dinas perkebunan)	1.665.000.000,00	1.662.113.800,00		2.843.248.677,00
3	Dinas kelautan dan Perikanan	385.500.000,00	370.247.500,00	96,04%	374.993.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	338.000.000,00	322.647.500,00		329.993.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	47.500.000,00	47.600.000,00		45.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	743.500.000,00	771.532.301,00	103,77%	316.240.400,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Laboratorium (DINAS PU)	320.000.000,00	347.727.487,00		316.240.400,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kendaraan Bermotor (DINAS PU)	423.500.000,00	423.804.814,00		
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%	279.763.500,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan (dinas pariwisata)	481.000.000,00	245.817.000,00		279.763.500,00
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	4.258.746.000,00	3.803.500.000,00	89,31%	3.818.039.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	35.000.000,00	35.553.000,00		13.699.000,00
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.500.000,00	13.350.000,00		20.575.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	500.000,00			
	Retribusi Tempat Rekreasi	2.828.750.000,00	3.197.863.000,00		3.066.542.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.373.496.000,00	549.234.000,00		709.723.000,00
7.	DINAS KOPERASI DAN UMKM	25.000.000,00	4.200.000,00	16,80%	11.000.000,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Ruangan	25.000.000,00	4.200.000,00		11.000.000,00
8.	Badan Penghubung Provinsi Jambi	2.725.464.000,00	1.409.000.000,00	51,70%	1.491.850.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	53.000.000,00	39.100.000,00		31.500.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.672.464.000,00	1.369.900.000,00		1.460.350.000,00
9.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.330.000.000,00	1.350.799.500,00	101,56%	916.348.500,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan	1.330.000.000,00	1.350.799.500,00		916.348.500,00
10.	Dinas Kehutanan	100.000.000,00	110.200.000,00	110,20%	105.800.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	110.200.000,00		105.800.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah				
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	108.000.000,00	964.050.000,00	892,64%	158.900.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Ruangan	108.000.000,00	964.050.000,00		158.900.000,00
12.	Dinas Kesehatan	550.000.000,00	487.620.000,00	88,66%	415.830.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	550.000.000,00	487.620.000,00		415.830.000,00
13.	Dinas Pendidikan	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22%	10.800.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	12.600.000,00	15.400.000,00		10.800.000,00
14.	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.000.000,00	27.500.000,00	85,94%	15.030.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	15.500.000,00	18.700.000,00		4.950.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	16.500.000,00	8.800.000,00		10.080.000,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	3.400.000.000,00	4.141.975.012,00	121,82%	3.597.531.951,00
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Laboratorium	3.400.000.000,00	4.141.975.012,00		3.597.531.951,00
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.000.000,00	223.353.000,00	72,05%	
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Laboratorium	310.000.000,00	223.353.000,00		
	JUMLAH	18.938.960.000,00	18.537.632.113,00	97,88%	17.239.470.028,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2018
Rp427.132.800,00

31 Desember 2017
Rp4.200.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi pemberian izin trayek dari Dinas Perhubungan dan retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta merupakan pelunasan atas SKRD Tahun 2018. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012.

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00 terealisasi sebesar Rp427.132.800,00 atau sebesar 92,85%, naik sebesar Rp422.932.800,00 atau 10.069,83% dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2017 sebesar Rp4.200.000,00

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp 0,00	Rp399.871.278,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dianggarkan di tahun 2018 dikarenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat tahun 2017 masuk ke Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah– Kendaraan Bermotor ke Retribusi Jasa Usaha, adapun dari realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2017 sebesar Rp399.871.278,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Periode 2018 dan 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Sewa Alat Berat (Dinas PU)				399.871.278,00
Jumlah					399.871.278,00

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp 0,00	Rp505.768.200,00

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012.

Retribusi IMTA tidak dianggarkan di tahun 2018 dikarenakan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing masuk ke Retribusi Perizinan tertentu adapun dari realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2017 sebesar Rp505.768.200,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dipungut serta telah disetorkan ke kas daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				505.768.200,00
	Jumlah				505.768.200,00

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp30.511.006.521,83	Rp29.054.470.466,63

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp30.115.495.741,00 dengan realisasi sebesar Rp30.511.006.521,83 atau sebesar 101,31%, naik sebesar Rp1.456.536.055,20 atau sebesar 5,01% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2017 sebesar Rp29.054.470.466,63.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD yang berasal dari:

1. Bagian Laba Penyertaan pada:
 - 1) PT. Bank Jambi.
Akta notaris nomor : 81 tanggal 19 april 2016 tentang pemberian deviden tahun 2018 sebesar Rp28.763.796.289,83
 - 2) PT. Bangun Aksrida.
Resume Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat nomor: 265/IV/2016 tanggal 27 April 2017 dengan deviden yang diperoleh tahun 2018 sebesar Rp571.714.491,00
2. Kontribusi atas Built over Transfer (BOT) dari:
 - 1) PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama.
Surat perjanjian tanggal 27 Juni 1995 Jatuh tempo kontribusi tanggal 21 Januari sebesar Rp750.000.000,-
 - 2) PT. Simotha Putra Parayuda.
Surat perjanjian Nomor : 1A/KB/CHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 pendapatan tahun 2018 sebesar Rp425.495.741,00,-
 - 3) PT Kurnia Properti
Surat perjanjian nomor : 07/PK.GUB/PU/2014 tentang Pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis center dengan pola bangunan serah.

Pada tahun 2016 belum memberikan kontribusi karena masih dalam proses pengajuan Hak pengelolaan lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2018 adalah sebagai berikut

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2018 dan 2017**
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Bank Jambi	28.000.000.000,00	28.763.796.289,83	102,73	27.968.261.014,63.
2.	PT JSMP	500.000.000,00	750.000.000,00	150,00	250.000.000,00.
3.	PT Simota Putra Parayuda	425.495.741,00	425.495.741,00	100,00	209.382.027,00.
4.	PT Bangun Askrida	1.190.000.000,00	571.714.491,00	48,04	626.827.425,00.
5.	Angso Duo	0,00	,00	0,00	,00
6.	Jambi Bisnis Centre	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		30.115.495.741,00	30.511.006.521,83	101,31	29.054.470.466,63

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp231.560.960.871,97 **Rp215.222.977.384,57**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp164.894.591.870,00 dengan realisasi sebesar Rp231.560.960.871,97 atau sebesar 140,43%, naik sebesar Rp16.337.983.487,40 atau sebesar 7,59% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2017 sebesar Rp215.222.977.384,57

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp231.560.960.871,97 termasuk didalamnya :

1. Pendapatan BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp 146.347.288.017,36.
2. Lain-lain Pendapatan yang sah pada SKPKD sebesar Rp 85.213.672.854,61

5.1.1.2 Pendapatan Transfer **31 Desember 2018** **31 Desember 2017** **Rp2.754.346.967.999,00** **Rp2.723.260.588.950,00**

Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Perubahan).

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.721.885.858.300,00 dengan realisasi sebesar Rp2.754.346.967.999,00 atau sebesar 101,19%. Pendapatan Transfer TA 2018 naik sebesar Rp31.086.379.049,00 atau sebesar 1,14% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2017 sebesar Rp2.723.260.588.950,00.

Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA.2017 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.703.635.858.300,00	2.745.221.967.999,00	101,54	2.723.260.588.950,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	18.250.000.000,00	9.125.000.000,00	50,00	0,00
Jumlah		2.721.885.858.300,00	2.754.346.967.999,00	101,19	2.723.260.588.950,00

5.1.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp2.745.221.967.999,00 **Rp2.723.260.588.950,00**

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.703.635.858.300,00 dan terealisasi sebesar Rp2.745.221.967.999,00 naik sebesar Rp21.961.379.049,00 atau sebesar 0,81% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2017 sebesar Rp2.723.260.588.950,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Transfer Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
		TA 2018	TA 2018		TA 2017
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	180.840.738.000,00	168.557.795.503,00	93,21	186.374.450.163,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	139.321.890.300,00	238.247.178.484,00	171,00	204.146.304.551,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.399.367.134.000,00	1.399.367.134.000,00	100,00	1.397.912.161.000,00
4.	Dana Transfer Khusus	984.106.096.000,00	939.049.860.012,00	95,42	934.827.673.236,00
JUMLAH		2.703.635.858.300,00	2.745.221.967.999,00	101,54%	2.723.260.588.950,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Provinsi Jambi dengan pencapaian tertinggi pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 171,00%.

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp168.557.795.503,00 **Rp186.374.450.163,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp180.840.738.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.557.795.503,00 atau sebesar 93,21%, turun sebesar Rp17.816.654.660,00 atau sebesar 9,56% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2017 sebesar Rp186.374.450.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.1. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(%)	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	105.711.787.000,00	107.971.063.085,00	102,14	109.854.896.184,00
2	Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan 25/29	75.128.951.000,00	60.586.732.418,00	80,64	69.604.161.752,00
3	BP-PBB				6.915.392.227,00
	JUMLAH	180.840.738.000,00	168.557.795.503,00	93,21	186.374.450.163,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp238.247.178.484,00 **Rp204.146.304.551,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp139.321.890.300,00 dan realisasi sebesar Rp238.247.178.484,00 atau sebesar 171,00% naik sebesar Rp34.100.873.933,00 atau sebesar 16,70% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2017 sebesar Rp204.146.304.551,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.2. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Iuran Izin Hak Pengusaha Hutan				1.011.677,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	4.488.628.000,00	6.861.202.535,00	152,86	4.468.052.443,00
3	Iuran Tetap (Land Rent)	1.597.896.000,00	1.766.566.260,00	110,56	1.617.903.205,00
4	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	14.636.169.000,00	29.265.588.404,00	199,95	21.180.811.238,00
5	Pertambangan Minyak Bumi				65.698.753.873,00
6	Pertambangan Gas Bumi	112.608.566.000,00	194.353.006.825,00	172,59	107.153.403.428,00
7	Bagi Hasil Cukai Tembakau	2.513.649.300,00	1.885.236.750,00	75,00	2.543.512.937,00
8	Dana Reboisasi	3.476.982.000,00	4.115.577.710,00	118,37	1.482.855.750,00
	JUMLAH	139.321.890.300,00	238.247.178.484,00	171,00	204.146.304.551,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp1.399.367.134.000,00 **Rp1.397.912.161.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.399.367.134.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.399.367.134.000,00 atau sebesar 100,00% naik sebesar Rp1.454.973.000,00 atau sebesar 0,10% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2017 sebesar Rp1.397.912.161.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.3. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.399.367.134.000,00	1.399.367.134.000,00	100,00%	1.397.912.161.000,00
	SUB JUMLAH	1.399.367.134.000,00	1.399.367.134.000,00	100,00%	1.397.912.161.000,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2018
Rp939.049.860.012,00

31 Desember 2017
Rp934.827.673.236,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp984.106.096.000,00 dan realisasi sebesar Rp939.049.860.012,00 atau sebesar 95,42% naik sebesar Rp4.222.186.776,00 atau sebesar 0,45% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2017 sebesar Rp934.827.673.236,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.4. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
I	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	194.413.665.000,00	163.725.089.954,00	84,21
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	48.591.055.000,00	45.943.425.030,00	94,55
	DAK Bidang Pendidikan	27.711.677.000,00	27.143.493.681,00	97,95
	DAK Bidang Kesehatan	3.989.146.000,00	3.148.949.519,00	78,94
	DAK Bidang Pertanian	12.000.986.000,00	10.993.783.031,00	91,61
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	3.795.919.000,00	3.659.325.100,00	96,40
	DAK Bidang Pariwisata	1.093.327.000,00	997.873.699,00	91,27
2.	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	145.043.322.000,00	117.041.376.924,00	80,69
	DAK Bidang Pendidikan SMK	31.578.938.000,00	22.105.256.600,00	70,00
	DAK Bidang Kesehatan-RS Rujukan	77.598.857.000,00	63.885.477.836,00	82,33
	DAK Bidang Irigasi-Pendukung Konektivitas	22.662.075.000,00	20.930.441.000,00	92,36
	DAK Bidang Jalan-Pendukung Kedaulatan Pangan	5.198.090.000,00	4.168.267.000,00	80,19
	DAK Bidang Energi Skala Menengah	789.467.000,00	708.384.988,00	89,73
	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.215.895.000,00	5.243.549.500,00	72,67
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi	779.288.000,00	740.288.000,00	95,00
	DAK Bidang Pendidikan SMA	779.288.000,00	740.288.000,00	95,00
II	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	789.692.431.000,00	775.324.770.058,00	98,18
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	639.393.800.000,00	621.451.830.000,00	97,19
	Tunjangan Profesi Guru	145.315.848.000,00	146.003.926.170,00	100,47
	Tunjangan Penghasilan Guru	558.000.000,00	3.982.500.000,00	713,71
	Tunjangan Khusus Guru	53.708.000,00	29.539.000,00	55,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	1.784.674.000,00	1.784.674.000,00	100,00
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	1.000.000.000,00	985.668.600,00	98,57
	Dana Pelayanan Adm.Kependudukan	1.586.401.000,00	1.086.632.288,00	68,50
	JUMLAH TOTAL	984.106.096.000,00	939.049.860.012,00	95,42

5.1.1.2.b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

31 Desember 2018
Rp9.125.000.000,00

31 Desember 2017
Rp0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp18.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.125.000.000,00 atau sebesar 50,00% naik sebesar Rp9.125.000.000,00 dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2017 sebesar Rp0,00, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya
Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	18.250.000.000,00	9.125.000.000,00	50,00	-
2.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	-	-		-
3.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-		-
	Jumlah	18.250.000.000,00	9.125.000.000,00	50,00	0,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

31 Desember 2018

Rp1.548.000.000,00

31 Desember 2017

Rp8.227.153.820,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.606.412.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.548.000.000,00 atau turun sebesar Rp6.679.153.820,00 atau sebesar 81,18% dari realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2017 sebesar Rp8.227.153.820,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah/ Sumbangan Jasa Raharja	1.406.412.000,00	1.548.000.000,00	110,07	1.470.960.000,00
2.	Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016	-	-	-	187.500.000,00
3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	200.000.000,00	-	-	-
4.	Pendapatan Luar Biasa (saldo dana BOS T.A 2016)	-	-	-	6.568.693.820,00
	Jumlah	1.606.412.000,00	1.548.000.000,00	96,36	8.227.153.820,00

5.1.2. Belanja

31 Desember 2018

Rp3.518.360.175.187,41

31 Desember 2017

Rp3.457.094.021.644,03

Secara garis besar, Belanja terdiri dari tiga bagian yakni Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga.

Belanja Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp3.944.637.398.183,80 dengan realisasi sebesar Rp3.518.360.175.187,41 atau sebesar 89,19%, naik sebesar Rp61.266.153.543,38 atau sebesar 1,77% dari realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp3.457.094.021.644,03. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	2.936.556.413.045,80	2.733.539.585.386,48	93,09	2.561.387.667.311,05
2.	Belanja Modal	1.004.988.485.138,00	784.723.907.609,16	78,08	895.648.009.332,98
3.	Belanja Tak Terduga	3.092.500.000,00	96.682.191,77	3,13	58.345.000,00
	Jumlah	3.944.637.398.183,80	3.518.360.175.187,41	89,19	3.457.094.021.644,03

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2018

Rp2.733.539.585.386,48

31 Desember 2017

Rp2.561.387.667.311,05

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.936.566.413.045,80 dengan realisasi sebesar Rp2.733.539.585.386,48 atau sebesar 93,09%, naik sebesar Rp172,151,918,075.4 atau sebesar 6,72% dari realisasi Belanja Operasi TA 2017 sebesar Rp2.561.387.667.311,05. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	1.400.473.431.074,83	1.303.794.986.013,66	93,10	1.127.581.142.738,60
2.	Belanja Barang	1.032.311.043.970,97	941.766.705.944,82	91,23	847.470.203.952,45
3.	Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
4.	Hibah	503.035.738.000,00	487.359.693.428,00	96,88	586.336.320.620,00
5.	Bantuan Sosial	236.200.000,00	118.200.000,00	50,04	0,00
	Jumlah	2.936.556.413.045,80	2.733.539.585.386,48	93,09	2.561.387.667.311,05

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp1,303,794,986,013,66 **Rp1.127.581.142.738,60**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.400.473.431.074,83 dengan realisasi sebesar Rp1.303.794.986.013,66 atau sebesar 93,10% dari anggarannya, naik sebesar Rp176.213.843.275,06 atau sebesar 15,63% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp1.127.581.142.738,60 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek
Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	809.384.310.805,90	749.134.278.914,14	92,56	889.321.911.987,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	325.504.863.788,48	298.718.646.677,00	91,77	150.667.930.597,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.366.795.099,45	10.670.010.641,00	86,28	8.623.500.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	34.062.627.774,00	34.061.640.708,00	100,00	21.472.461.264,00
5.	Belanja Pegawai BLUD	73.227.277.607,00	65.763.849.573,52	89,81	52.411.280.090,60
6.	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPR	-	6.000.000,00		287.000.000,00
7.	Tunjangan Profesi Guru	145.315.848.000,00	145.073.559.800,00	99,83	-
8.	Tunjangan Penghasilan Guru	558.000.000,00	329.012.500,00	58,96	4.726.500.000,00
9.	Tunjangan Khusus Guru	53.708.000,00	37.987.200,00	70,73	70.558.800,00
	Jumlah	1.400.473.431.074,83	1.303.794.986.013,66	93,10	1.127.581.142.738,60

Atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.303.794.986.013,66 dianggarkan dan direalisasikan oleh 43 SKPD.

Belanja Pegawai sebesar Rp1.303.792.373.513,66 termasuk didalamnya Belanja Pegawai BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp65.763.849.573,52.

Rincian belanja pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.b Belanja Barang **31 Desember 2018**
Rp941.766.705.944,82 **31 Desember 2017**
Rp847.470.203.952,45

Belanja Barang TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.032.311.043.970,97 dengan realisasi sebesar Rp941.766.705.944,82 atau sebesar 91,23% dari anggarannya, naik sebesar Rp94.296.501.992,37 atau sebesar 11,13% dari realisasi Belanja Barang TA 2017 sebesar Rp847.470.203.952,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja bahan pakai habis	44.302.096.741,00	41.411.038.842,00	93,47	84.327.321.102,46
2	Belanja bahan/material	53.383.927.550,17	50.710.827.387,81	94,99	65.990.992.371,54
3	Belanja jasa kantor	157.537.408.491,00	137.727.057.442,00	87,42	167.325.460.576,45
4	Belanja premi asuransi	6.503.281.600,00	5.832.328.176,39	89,68	3.323.046.268,00
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	20.339.661.663,00	18.220.233.629,00	89,58	17.872.756.024,00
6	Belanja cetak dan penggandaan	18.871.972.658,00	16.794.447.850,00	88,99	17.154.309.218,00
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/par kir	4.120.376.200,00	3.605.605.198,00	87,51	6.048.772.966,00
8	Belanja sewa alat berat	680.000.000,00	-		1.082.000.000,00
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	6.861.400.000,00	6.464.051.850,00	94,21	5.975.815.000,00
10	Belanja makanan dan minuman	69.061.924.208,00	59.755.085.314,00	86,52	35.040.597.074,00
11	Belanja Sarana Mobilitas Darat	13.627.850.000,00	12.904.930.000,00	94,70	13.710.846.000,00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	5.924.720.000,00	5.432.889.200,00	91,70	4.816.851.845,00
13	Belanja pakaian kerja	1.168.914.000,00	1.145.248.820,00	97,98	1.350.486.000,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu	3.285.102.700,00	3.127.658.100,00	95,21	2.725.377.750,00
15	Belanja perjalanan dinas	180.427.900.830,00	165.621.246.557,00	91,79	140.893.533.093,00
16	Belanja pemeliharaan	23.934.325.148,00	22.383.936.218,30	93,52	20.961.359.037,00
17	Belanja jasa konsultasi	10.043.259.000,00	6.569.614.908,00	65,41	19.433.992.100,00
18	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.439.000.000,00	1.426.547.500,00	99,13	810.000.000,00
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.306.542.759,00	4.074.579.050,00	76,78	3.865.216.594,00
20	Belanja honorarium PNS	24.396.667.500,00	18.969.571.070,00	77,75	29.038.844.575,00
21	Belanja honorarium non PNS	92.192.940.250,00	90.587.971.762,00	98,26	93.688.296.500,00
22	Belanja barang dana Jasa Bos	137.657.380.000,00	150.460.067.792,00	109,30	112.034.329.858,00

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
23	Belanja honorarium operator LPPK dan TEPRA	575.500.000,00	554.000.000,00	96,26	-
24	Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimtek	1.218.000.000,00	850.350.000,00	69,82	-
25	Belanja beasiswa pendidikan	14.800.000.000,00	14.697.240.000,00	99,31	-
26	Belanja perlengkapan/peralatan kantor	721.550.600,00	691.461.900,00	95,83	-
27	Belanja jasa iuran	96.400.000,00	96.400.000,00	100,00	-
28	Belanja barang dan jasa BLUD	78.605.798.572,80	70.656.254.640,32	89,89	-
29	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.798.095.000,00	3.503.850.000,00	92,25	-
30	Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	51.429.048.500,00	27.492.212.738,00	53,46	-
	Jumlah	1.032.311.043.970,97	941.766.705.944,82	91,23	847.470.203.952,45

Belanja Barang sebesar Rp941.766.705.944,82 termasuk didalamnya Belanja Barang BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp70.656.254.640,32.

Rincian belanja barang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.c Belanja Subsidi **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp500.000.000,00 **Rp0,00**

Belanja Subsidi TA 2018 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00%. Belanja Subsidi tersebut pada TA 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.1.d Belanja Hibah **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp487.359.693.428,00 **Rp586.336.320.620,00**

Belanja Hibah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp503.035.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp487.359.693.428,00 atau sebesar 96,88% turun sebesar Rp98.976.627.192,00 atau sebesar 16,88% dari realisasi Belanja Hibah TA 2017 sebesar Rp586.336.320.620,00.

Anggaran, realisasi, dan penerima hibah TA 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jambi TA 2018

(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		
1.	Belanja Hibah kepada KONI	10.000.000.000,00	9.545.550.930,00
2.	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	600.000.000,00	600.000.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	1.080.000.000,00	1.060.000.000,00
4.	Belanja Hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan	560.000.000,00	560.000.000,00
5.	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka	1.850.000.000,00	1.754.724.498,00
6.	Belanja Hibah kepada lembaga adat melayu jambi	374.888.000,00	374.888.000,00
7.	Belanja Hibah kepada baznas	300.000.000,00	300.000.000,00
8.	Belanja hibah kepada IKA Unja	200.000.000,00	200.000.000,00
9.	Belanja Hibah kepada komisi penyiur indonesia daerah (KPID) Provinsi Jambi	946.750.000,00	919.750.00,00
10.	Belanja Hibah kepada gereja katolik paroki santa teresia	297.500.00,00	297.500.00,00
11.	Belanja hibah kepada pimpinan wilayah dewan mesjid	150.000.000,00	150.000.000,00
	Belanja Hibah Dana BOS		
11.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Batanghari	38.172.800.000,00	36.579.280.000,00
12.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci	27.496.600.000,00	27.202.320.000,00
13.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Merangin	50.050.600.000,00	49.212.600.000,00
14.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Muaro Jambi	49.010.400.000,00	47.663.600.000,00
15.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Sarolangun	38.783.200.000,00	38.183.160.000,00
16.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	41.442.200.000,00	40.052.280.000,00
17.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28.308.600.000,00	27.942.440.000,00
18.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tebo	44.022.200.000,00	42.739.800.000,00
19.	Satuan Pendidikan Dasar Kota Jambi	80.884.000.000,00	76.751.400.000,00
20.	Satuan Pendidikan Dasar Kota Sungai Penuh	12.376.600.000,00	11.861.440.000,00
21.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten bungo	46.880.600.000,00	44.723.760.00,00
22.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Batanghari	935.200.000,00	923.720.00,00
23.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Bungo	1.089.200.000,00	1.089.200.000,00
24.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Kerinci	240.400.000,00	240.320.000,00
25.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Merangin	478.800.000,00	478.800.000,00
26.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Ma. Jambi	2.219.000.000,00	2.219.000.000,00
27.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Sarolangun	2.378.600.000,00	2.334.360.00,00
28.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	968.800.000,00	968.800.000,00
29.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	481.600.000,00	466.200.000,00
30.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tebo	1.534.000.000,00	1.533.760.00,00
31.	Satuan Pendidikan Menengah Kota Jambi	18.735.600.000,00	18.279.560.00,00
32.	Satuan Pendidikan Menengah Kota Sungai Penuh	187.600.000,00	151.480.000,00
	JUMLAH	503.035.738.000,00	487.359.693.428,00

5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2018
Rp118.200.000,00

31 Desember 2017
Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dianggarkan sebesar Rp236.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp118.200.000,00 atau 50,04%. Belanja Bantuan Sosial tersebut pada TA 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp895.648.009.332,98

Belanja Modal TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.004.988.485.138,00 dengan realisasi sebesar Rp784.723.907.609,16 atau sebesar 78,08%, turun sebesar Rp110.924.101.723,82 atau sebesar 12.38% dari realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp895.648.009.332,98.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
TA 2018 dan TA 2017**

					(dalam rupiah)
No	Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Tanah	14.450.146.100,00	1.477.206.406,00	10,22	2.800.947.111,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	149.245.783.253,00	120.900.807.250,20	81,01	109.638.271.560,09
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	186.011.601.201,00	136.265.370.912,44	73,26	108.608.020.183,89
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	634.635.466.912,00	505.320.632.964,52	79,62	658.315.309.836,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.645.487.672,00	20.759.890.076,00	100,55	16.285.460.642,00
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.004.988.485.138,00	784.723.907.609,16	78,08	895.648.009.332,98

Belanja Modal sebesar Rp784.723.907.609,16 termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp14.308.990.734,00.

Rincian belanja modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

31 Desember 2018
Rp96.682.191,77

31 Desember 2017
Rp58.345.000,00

Belanja Tak Terduga TA2018 dianggarkan sebesar Rp3.092.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.682.191,77 atau sebesar 3,13%, naik sebesar Rp38.337.191,77 atau 65,71% dari realisasi Belanja Tak Terduga TA 2017 sebesar Rp58.345.000,00.

5.1.3 Transfer

31 Desember 2018
Rp679.895.543.087,90

31 Desember 2017
Rp675.847.859.443,34

Transfer TA 2018 dianggarkan sebesar Rp726.431.412.320,00 dengan realisasi sebesar Rp679.895.543.087,90 atau sebesar 93,59%, naik sebesar

Rp4.047.683.644,56 atau sebesar 0,60% dari realisasi Transfer TA 2017 sebesar Rp675.847.859.443,34.

Transfer dianggarkan untuk membiayai pengeluaran sebagai wujud pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan kepentingan Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan	593.304.017.920,00	579.768.148.687,90	97,72	517.348.197.874,34
2.	Transfer Bantuan Keuangan	133.127.394.400,00	100.127.394.400,00	75,21	158.499.661.569,00
Jumlah		726.431.412.320,00	679.895.543.087,90	93,59	675.847.859.443,34

5.1.3.a Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2018
Rp579.768.148.687,90

31 Desember 2017
Rp517.348.197.874,34

Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi dialokasikan ke Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp593.304.017.920,00 dengan realisasi sebesar Rp579.768.148.687,90 atau 97,72%, naik sebesar Rp62.419.950.813,56 atau sebesar 12,07% dari Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2017 sebesar Rp517.348.197.874,34. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Provinsi Jambi TA 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Kota Jambi	93,717,186,047.88	92.499.055.800,83	98,70	80.760.495.375,60
2.	Kabupaten Batang Hari	50,813,957,161.94	49.750.801.465,15	97,91	44.588.105.588,43
3.	Kabupaten Muaro Jambi	53,563,045,470.59	52.192.732.708,63	97,44	47.294.939.547,73
4.	Kabupaten Bungo	58,019,548,410.90	56.800.763.747,19	97,90	49.881.377.623,01
5.	Kabupaten Tebo	50,050,702,514.70	48.970.207.541,86	97,84	44.554.180.304,11
6.	Kabupaten Kerinci	44,225,656,495.44	42.963.851.505,93	97,15	38.890.975.691,53
7.	Kabupaten Merangin	54,269,021,047.83	52.220.951.025,90	96,23	47.476.289.497,71
8.	Kabupaten Sarolangun	51,590,371,440.30	49.911.154.169,64	96,75	45.013.879.225,22
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	50,804,719,988.18	49.911.489.707,53	98,24	45.004.123.053,34
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44,407,007,647.58	43.732.150.448,41	98,48	38.985.907.297,17
11.	Kota Sungai Penuh	41,842,801,694.66	40.814.990.566,83	97,54	34.897.924.670,49
Jumlah		593.304.017.920,00	579.768.148.687,90	97,72	517.348.197.874,34

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.

5.1.3.b Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp98.066.500.000,00

Rp156.720.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2018 merupakan konversi dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang dianggarkan sebesar Rp47.126.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp14.126.500.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan sebesar Rp83.940.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp83.940.000.000,00.

Tabel 5.22 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota	Anggaran	Realisasi	%
1	Kota Sungai Penuh	3,240,000,000.00	240.000.000,00	7,41
2	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4,200,000,000.00	1.200.000.000,00	28,57
3	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4,200,000,000.00	1.200.000.000,00	28,57
4	Kabupaten Muaro Jambi	3,300,000,000.00	300.000.000,00	9,09
5	Kabupaten Sarolangun	3,540,000,000.00	540.000.000,00	15,25
6	Kabupaten Bungo	3,720,000,000.00	720.000.000,00	19,35
7	Kabupaten Tebo	3,300,000,000.00	300.000.000,00	9,09
8	Program Sarana dan Prasarana			
9	Kota Jambi	6,720,000,000.00	3.720.000.000,00	55,36
10	Kabupaten Merangin	7,946,500,000.00	4.946.500.000,00	62,25
11	Kabupaten Kerinci	3,120,000,000.00	120.000.000,00	3,85
12	Kabupaten Batanghari	3,840,000,000.00	840.000.000,00	21,88
	Jumlah	47.126.500.000,00	14.126.500.000,00	29,98

Tabel 5.23 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa TA 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Anggaran	Realisasi	%
1	Kabupaten Muaro Jambi	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00
2	Kabupaten Batanghari	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00
3	Kabupaten Sarolangun	8.940.000.000,00	8.940.000.000,00	100,00
4	Kabupaten Bungo	8.460.000.000,00	8.460.000.000,00	100,00
5	Kabupaten Tebo	6.420.000.000,00	6.420.000.000,00	100,00
6	Kabupaten Merangin	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100,00
7	Kabupaten Tanjab Barat	6.840.000.000,00	6.840.000.000,00	100,00
8	Kabupaten Tanjab Timur	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	100,00
9	Kabupaten Kerinci	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	100,00
10	Kota Sungai Penuh	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	100,00
	Jumlah	83.940.000.000,00	83.940.000.000,00	100,00

5.1.3.c Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Rp2.060.894.400,00

Rp1.779.661.569,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik merupakan konversi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp2.060.894.400,00 dengan realisasi sebesar Rp2.060.894.400,00 atau sebesar 100,00%, naik sebesar Rp281.232.831,00 atau sebesar 15,80% dari realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2017 sebesar Rp1.779.661.569,00.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	120.884.400,00	120.884.400,00	100.00
2	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	151.327.200,00	151.327.200,00	100.00
3	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	99.178.800,00	99.178.800,00	100.00
4	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	295.335.600,00	295.335.600,00	100.00
5	Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	239.931.600,00	239.931.600,00	100.00
6	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	345.716.400,00	345.716.400,00	100.00
7	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	204.775.200,00	204.775.200,00	100.00
8	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	110.637.600,00	110.637.600,00	100.00
9	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	147.234.000,00	147.234.000,00	100.00
10	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	72.675.600,00	72.675.600,00	100.00
11	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	273.198.000,00	273.198.000,00	100.00
JUMLAH		2.060.894.400,00	2.060.894.400,00	100.00

5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp457.071.970.882,36 **Rp278.221.241.857,37**

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp457.071.970.882,36 dengan realisasi sebesar Rp457.071.970.882,36 atau naik sebesar Rp178.850.729.024,99 atau sebesar 64,28% dari realisasi Pembiayaan TA 2017 sebesar Rp278.221.241.857,37.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Jambi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Penerimaan Pembiayaan	457.071.970.882,36	457.071.970.882,36	100,00	278.221.241.857,37
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		457.071.970.882,36	457.071.970.882,36	100,00	278.221.241.857,37

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan**31 Desember 2018****Rp457.071.970.882,36****31 Desember 2017****Rp278.221.241.857,37**

Penerimaan Pembiayaan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp457.071.970.882,36 dengan realisasi sebesar Rp457.071.970.882,36 atau sebesar 100%, naik sebesar Rp178.850.729.024,99 atau sebesar 64,28% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2017 sebesar Rp278.221.241.857,37.

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, apabila anggaran Pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran Belanja dan/atau memanfaatkan surplus realisasi APBD tahun sebelumnya guna membiayai Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Jambi TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Pelampuan Penerimaan PAD	20.397.348.923,79	20.397.348.923,79	100,00	0,00
2.	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.597.773.886,57	57.597.773.886,57	100,00	20.238.042.377,69
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	379.076.848.072,00	379.076.848.072,00	100,00	257.983.199.479,68
Jumlah		457.071.970.882,36	457.071.970.882,36	100,00	278.221.241.857,37

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**31 Desember 2018****Rp0,00****31 Desember 2017****Rp0,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut pada TA 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**31 Desember 2018****Rp671.280.817.888,32****31 Desember 2017****Rp457.071.970.882,36**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 adalah sebesar Rp671.280.817.888,32 yang naik sebesar Rp214.208.847.005,96 atau 46,87% dibandingkan dengan SILPA TA 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp671.280.817.888,32	Rp457.071.970.882,36

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 adalah sebesar Rp671.280.817.888,32 yang naik sebesar Rp214.208.847.005,96 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36.

Laporan Perubahan SAL tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2017 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp457.071.970.882,36.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32 Sehingga total SILPA TA 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32.

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar (Rp0,00).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp671.280.817.888,32.

5.3 NERACA

5.3.1. Aset	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp8.495.832.583.828,62	Rp7.922.958.480.710,74

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.495.832.583.828,62 naik sebesar Rp572.874.103.117,88 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.922.958.480.710,74. Aset sebesar Rp8.495.832.583.828,62 ini sudah termasuk Aset yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2018 serta saldo kas BOS 2018 sesuai dengan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS, namun belum dapat mengklasifikasikan dan menempatkan pada posisi yang seharusnya, Aset perolehan P3D jajaran Dinas Pendidikan sebesar Rp545.953.126.099,68 dari 264 sekolah, 114 sekolah dengan nilai sebesar Rp252.063.180.118,10 telah dilakukan verifikasi namun belum sempat untuk menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut kedalam Buku Inventaris dan penyesuaian pada neraca Dinas Pendidikan. Aset sebesar Rp8.495.832.583.828,62 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp995.246.618.335,62	Rp790.298.239.946,44

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp995.246.618.335,62 naik sebesar Rp204.948.378.389,18 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp790.298.239.946,44. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Kas di Kas Daerah	634.661.025.171,00	398.585.189.396,56
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	4.138.000,00	102.067.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	353.036.515,00	351.550,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	31.793.654.294,32	36.175.461.224,80
5.	Kas di Bendahara BOS	4.468.963.908,00	22.208.901.711,00
6.	Kas Lainnya	45.899.624.074,46	43.790.957.011,30
7.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
8.	Piutang Pajak	51.991.300,00	51.991.300,00
9.	Piutang Retribusi	967.656.500,00	976.568.000,00
10.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.197.811.204,00	2.873.306.945,00
11.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.518.912.463,25	28.821.620.144,00
12.	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
13.	Piutang Lainnya	7.465.388.000,00	7.452.488.000,00
14.	Penyisihan Piutang	(8.500.078.414,81)	(3.528.931.411,90)
15.	Belanja Dibayar di Muka	843.812.812,51	1.252.163.261,20
16.	Persediaan	236.520.682.507,89	251.536.105.814,48
Jumlah		995.246.618.335,62	790.298.239.946,44

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp634.661.025.171,00	Rp398.585.189.396,56

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp634.661.025.171,00 naik sebesar Rp 236.075.835.774,44 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017

sebesar Rp398.585.189.396,56. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.28 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	134.661.025.171,00	176.585.189.396,56
2.	Deposito (1 bulan)	500.000.000.000,00	222.000.000.000,00
Jumlah		634.661.025.171,00	398.585.189.396,56

1. Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp134.661.025.171,00 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2018 pada rekening giro Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 101431703. Saldo akhir rekening giro Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp180.560.649.245,46, termasuk didalamnya terdapat Kas Lainnya (CaLK nomor 5.1.1.1.f) sebesar Rp45.899.624.074,46.
2. Deposito (1 bulan) sebesar Rp500.000.000.000,00 merupakan saldo Deposito milik Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dengan jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29 Rincian Deposito

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Deposito Bank Jambi	400.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.	Deposito Bank BRI	-	130.000.000.000,00
3.	Deposito Bank BTN	-	32.000.000.000,00
4.	Deposito Bank BNI	-	20.000.000.000,00
5.	Deposito Bank Jambi Syariah	100.000.000.000,00	
Jumlah		500.000.000.000,00	222.000.000.000,00

1) Deposito Bank Jambi

Deposito pada Bank Jambi adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun dan terdiri dari 15 (lima belas) sertifikat deposito.

2) Deposito Bank Jambi Syariah

Deposito pada Bank Jambi Syariah adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun dan terdiri dari 2 (dua) sertifikat deposito.

Rincian saldo deposito dapat dilihat dalam **Lampiran 5**.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2018
Rp353.036.515,00

31 Desember 2017
Rp351.550,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp353.036.515,00 naik sebesar Rp352.684.965,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp351.550,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat pada OPD :

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp81.581,00 merupakan kurang setor sisa uang persediaan, yang disetor tahun 2019
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp229.861.764,00 merupakan Sisa uang persediaan yang disetor pada tahun 2019
3. Biro Umum Rp650,00 merupakan kurang setor sisa uang persediaan, yang disetor tahun 2019
4. Biro Humas dan Protokol Rp20,00 merupakan kurang setor sisa uang persediaan, yang disetor tahun 2019
5. Badan Keuangan Daerah Rp123.092.500 merupakan kurang setor sisa uang persediaan, yang disetor tahun 2019.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp4.138.000,00	Rp102.067.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.138.000,00, turun sebesar Rp97.929.000,00 dibanding dengan saldo tahun 2017 sebesar Rp102.067.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.138.000,00 terdapat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terlambat setor ke Kas Daerah.

5.3.1.1.d Kas di Bendahara BLUD

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp31.793.654.294,32	Rp36.175.461.224,80

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.793.654.294,32 turun sebesar Rp4.381.806.930,48 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp36.175.461.224,80. Rincian Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No.	BLUD	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	BLUD Akademi Farmasi	1.369.810.464,40	395.207.556,00
2.	BLUD AAK	428.062.950,70	28.648.418,46
3.	BLUD Balai Lab Kesehatan	410.396.264,00	611.122.716,00
4.	BLUD RSUD Raden Mattaher	23.803.670.602,22	31.645.241.204,34
5.	BLUD RSJ	5.781.714.013,00	3.495.241.330,00
Jumlah		31.793.654.294,32	36.175.461.224,80

1) BLUD Akademi Farmasi

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Akademi Farmasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.369.810.464,40 yang disimpan pada Bank Jambi nomor rekening 0101046273 atas nama BLUD Akademi Farmasi.

2) BLUD Akademi Analis Kesehatan (AAK)

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD AAK per 31 Desember 2018 sebesar Rp428.062.950,70 yang disimpan pada Bank Bukopin nomor rekening 2801200149 atas nama BLUD Akademi Analisis Kesehatan.

3) BLUD Balai Laboratorium Kesehatan

Kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp410.396.264,00 yang disimpan pada Bank BNI nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes Jambi.

4) BLUD RSUD Raden Mattaher

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Raden Mattaher per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.803.670.602,22 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSUD Raden Mattaher Jambi.

5) BLUD RSJ Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.781.714.013,00 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

5.3.1.1.e Kas di Bendahara BOS

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp4.468.963.908,00	Rp22.208.901.711,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.468.963.908,00 turun sebesar Rp 17.739.937.803,00 jika dibanding dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.208.901.711,00 Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat dalam **Lampiran 6**.

5.3.1.1.f Kas lainnya

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp45.899.624.074,46	Rp43.790.957.011,30

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas lainnya sebesar Rp45.899.624.074,46 terdiri dari:

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT. WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp4.269.950.313,21 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara;
2. Setoran PT. PKP sebesar Rp 6.023.790.446,48 (Rp5.641.125.000,00 serta jasa gironya Rp382.665.446,48) berupa kontribusi kerjasama BOT Jambi Bisnis Center yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena status objek kerjasama berupa tanah masih dalam sengketa;

3. Uang Bank Mandiri yang lebih transfer ke kas daerah Rp6.800.000,00 (sebesar Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta pada Tahun 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2018 tanggal 14 Februari 2018) dan tahun 2018 sebesar Rp6.300.000,00 .
4. Uang hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berasal dari setoran pihak ketiga atas temuan pemeriksaan BPK yang salah setor ke kas daerah Provinsi Jambi sebesar Rp7.187.409,97 sesuai surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 900/97/BPKAD-IV/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 hal salah setor kode rekening.

5.3.1.1.g Investasi Jangka Pendek **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017.

5.3.1.1.h Piutang Pendapatan **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp40.701.681.052,44 **Rp36.647.042.977,09**

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp49.701.759.467,25 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp8.500.078.414,81 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp40.701.681.052,44 jika dibanding dengan tahun 2017 naik sebesar Rp4.054.638.075,35.

Penyisihan Piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Piutang Pajak PKB dan BBNKB (Dinas Pendapatan)	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Piutang Retribusi	967.656.500,00	976.568.000,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.197.811.204,00	2.873.306.945,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.518.912.463,25	28.821.620.144,00
5.	Piutang Lainnya	7.465.388.000,00	7.452.488.000,00
6.	Penyisihan Piutang	(8.500.228.414,81)	(3.528.931.411,91)
Jumlah		40.701.531.052,44	36.647.042.977,09

5.3.1.1.h.1. Piutang Pendapatan Pajak **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp51.991.300,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp51.991.300,00 sehingga nilai bersih

piutang sebesar Rp0,00 adalah piutang pajak PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Provinsi Jambi. Dengan rincian piutang pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 5.32 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Pajak PKB dan BBNKB	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak	(51.991.300,00)	(51.991.300,00)
Jumlah		0,00	0,00

Rincian Piutang pajak dan BBNKB per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 7.**

5.3.1.1.h.2. Piutang Pendapatan Retribusi **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp19.234.000,00 **Rp15.799.000,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp967.656.500,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp948.422.500,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp19.234.000,00.

Piutang Retribusi dicatat berdasarkan saldo awal piutang saat ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kebijakan akuntansi penyisihan piutang dengan membuat daftar umur piutang (*aging schedule*) menurut jenis piutang untuk menilai umur dan penentuan besaran yang akan disisihkan.

Piutang Retribusi terdiri dari piutang Retribusi 2 (dua) SKPD sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.33 Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Kantor Perwakilan Prov. Jambi	31.300.000,00	36.000.000,00
2.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	936.356.500,00	940.568.000,00
3.	Penyisihan Piutang Retribusi	(948.422.500,00)	(960.769.000,00)
Jumlah		19.234.000,00	15.799.000,00

Rincian Piutang Retribusi per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 8.**

5.3.1.1.h.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp900.000.000,00 **Rp2.292.118.262,30**

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.197.811.204,00. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.297.811.204,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp900.000.000,00. Rincian saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Piutang atas tagihan PD Angso Putih	397.811.204,00	397.811.204,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
2.	Piutang royalti kerja sama BOT	1.800.000.000,00	2.475.495.741,00
3.	Penyisihan Piutang	(1.297.811.204,00)	(581.188.682,70)
Jumlah		900.000.000,00	2.292.118.262,30

1. Piutang atas tagihan PD Angso Putih merupakan tagihan piutang PD Angso Putih yang sudah ditutup sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 dan menjadi Piutang Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Piutang atas tagihan PD Angso Putih

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	58.760.255,00
2.	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	126.805.205,00
3.	AR Siregar	129.165.416,00	129.165.416,00
4.	Istiono/Bambang Sriyono	83.080.328,00	83.080.328,00
	Penyisihan Piutang	(397.811.204,00)	(397.811.204,00)
Jumlah Bersih		0,00	0,00

2. Piutang Royalti kerja sama BOT per 31 Desember 2018 jumlahnya sebesar Rp 900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Piutang Kerjasama (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	PT Simota Putra Parayuda (kerja sama BOT pembangunan WTC)	0,00	425.495.741,00
2.	PT Jambi Sapta Manunggal (kerja sama BOT pembangunan Hotel Tepian Ratu)	0,00	250.000.000,00
3.	PT Eraguna Bumi Nusa (kerja sama BOT pembangunan Pasar Angso Duo)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.	Penyisihan Piutang	(900.000.000,00)	(183.377.478,70)
Jumlah		900.000.000,00	2.292.118.262,30

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 9**.

5.3.1.1.h.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp33.060.747.852,44 **Rp26.923.900.154,80**

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp38.518.912.463,25. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp5.458.164.610,81 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp33.060.747.852,44.

Tabel 5.37 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	22.832.419.010,25	9.828.682.005,00
2.	Piutang Pendapatan RSJ	5.075.638.685,00	1.424.782.635,00
3.	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
4.	Piutang Taspen atas uang Duka Wafat yang belum dibayarkan	0,00	0,00
5	Piutang Samisake	10.595.257.378,00	17.552.558.114,00
6	Penyisihan Piutang	(5.458.164.610,81)	(1.897.719.989,20)
Jumlah		33.060.747.852,44	26.923.900.154,80

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 10.**

5.3.1.1.i Piutang Lainnya **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp6.721.699.200,00 **Rp7.415.225.560,00**

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.465.388.000,00 atas saldo tersebut dilakukan penyisihan sebesar Rp743.688.800,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp6.721.699.200,00. Rincian saldo piutang Lainnya yaitu:

Tabel 5.38 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Piutang Pengembalian Bantuan Keuangan Kabupaten Kerinci	7.435.388.000,00	7.435.388.000,00
2.	Piutang Pengembalian Bantuan Keuangan Kabupaten Bungo	0,00	17.100.000,00
3.	Dinas Perhubungan	30.000.000,00	0,00
4.	Penyisihan Piutang	(743.688.800,00)	(37.262.440,00)
Jumlah		6.721.699.200,00	7.415.225.560,00

Rincian Piutang Lainnya per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 11.**

5.3.1.1.j Beban Dibayar di Muka **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp843.812.812,51 **Rp1.252.163.261,20**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp843.812.812,51 terdiri dari biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Asuransi di Sekretariat Daerah	389.495.493,20	479.196.555,00
2.	Asuransi di Dinas PU	259.203.526,93	210.202.401,00
3.	Asuransi di Inspektorat	0,00	37.739.917,00
4.	Sekretariat Dewan	0,00	347.179.067,20
5.	Dinas Satpol PP dan Damkar	10.678.327,23	0,00
6.	Badan Penghubung	170.200.017,89	177.845.321,00
7.	Dinas koperasi dan UKM	7.778.874,38	
8.	Dinas ESDM	6.456.572,88	

Jumlah	843.812.812,51	1.252.163.261,20
--------	----------------	------------------

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.k Persediaan **31 Desember 2018**
Rp236.520.682.507,89 **31 Desember 2017**
Rp251.536.105.814,48

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp236.520.682.507,89 turun sebesar Rp15.015.423.333,59 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp251.536.105.814,48.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Persediaan per Jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Alat Tulis Kantor	1.354.441.068,33	1.508.495.044,86
2.	Obat-Obatan	16.818.057.014,32	20.205.170.747,95
3.	Bahan Kebersihan	345.043.177,06	502.498.468,7
4.	Bahan Makanan	1.350.600.748,38	1.062.606.251,98
5.	Bibit	1.812.205.960,00	1.706.012.100,00
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	213.464.763.734,53	221.251.133.995,53
7.	Bahan Kimia	539.112.687,00	1.308.842.796,00
8.	Pupuk	83.600.000,00	93.191.950,00
9.	Alat Bengkel	5.480.000,00	2.966.144.125,00
10.	Bahan Bangunan	137.844.110,00	0,00
11.	Sandang/Pakaian	322.953.829,74	203.260.922,13
12.	Alat Kesehatan	140.340.688,53	276.194.269,33
13.	Bahan Listrik	146.239.490,00	452.555.143,00
Jumlah		236.520.682.507,89	251.536.105.814,48

Rincian saldo Persediaan per OPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2018**
Rp386.387.041.199,31 **31 Desember 2017**
Rp344.594.455.582,95

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp386.387.041.199,31 naik sebesar Rp 41.792.585.616,36 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp344.594.455.582,95. Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
-----	--------	----------------------	----------------------

1.	Investasi Nonpermanen	17.348.983.569,62	17.297.176.950,39
	Penyisihan KUPEM tak tertagih	(5.151.916.263,98)	(5.274.825.643,94)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	12.197.067.305,64	12.022.351.306,45
2.	Investasi Permanen	374.189.973.893,67	332.572.104.276,50
	Jumlah	386.387.041.199,31	344.594.455.582,95

5.3.1.2.a Investasi Nonpermanen **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp12.197.067.305,64 **Rp12.022.351.306,45**

Saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.197.067.305,64 naik sebesar Rp174.715.999,19 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp12.022.351.306,45. Saldo Investasi Non permanen ini berupa saldo Investasi Non Permanen Lainnya yang terdiri dari Dana KUPEM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Dana KUPEM	17.348.983.569,62	17.297.176.950,39
	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(5.151.916.263,98)	(5.274.825.643,94)
	Jumlah Bersih Dana KUPEM	12.197.067.305,64	12.022.351.306,45

Saldo dana KUPEM per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.197.067.305,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Rincian Saldo KUPEM

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	KUPEM Pola <i>Channeling</i> (Tunggakan)	3.830.085.821,67	3.953.501.079,67
2.	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	10.132.077.696,92	9.957.468.819,69
3.	Saldo Giro Beku	2.064.989.608,72	2.064.882.486,76
4.	Tunggakan KUPEM Executting	1.246.638.881,31	1.247.246.003,27
5.	Tunggakan KUPEM Executting (pensertifikatan tanah)	75.191.561,00	74.078.561,00
	Jumlah Dana KUPEM	17.348.983.569,62	17.297.176.950,39
1.	penyisihan KUPEM channelling tak tertagih	(3.830.085.821,67)	(3.953.501.079,67)
2.	penyisihan KUPEM executing tak tertagih	(1.246.638.881,31)	(1.247.246.003,27)
3.	penyisihan KUPEM Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(75.191.561,00)	(74.078.561,00)
	Jumlah Penyisihan KUPEM tidak tertagih	(5.151.916.263,98)	(5.274.825.643,94)
	Jumlah Nilai Bersih setelah (penyisihan)	12.197.067.305,64	12.022.351.306,45

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* semua tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.197.067.305,64 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pola *Channeling*, nilai bersih setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 KUPEM Pola *Channeling* (Tunggakan)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem Chanelling Modal kerja per 31 Desember 2018	3.830.085.821,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2018	(3.830.085.821,67)
Jumlah nilai bersih disajikan		0,00

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 sama dengan tahun 2017 sebesar Rp0,00. Saldo sebesar Rp0,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 14**).

Tabel 5.45 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM Chanelling Modal kerja

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2018	Penyisihan per 31 Desember 2018	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	162.951.674,00	174.351.674,00	-
2.	Kabupaten Batang Hari	262.509.323,00	262.509.323,00	-
3.	Kabupaten Muaro Jambi	445.776.130,67	456.726.130,67	-
4.	Kabupaten Kerinci	303.844.736,00	335.715.737,00	-
5.	Kabupaten Merangin	443.239.666,00	483.378.336,00	-
6.	Kabupaten Sarolangun	541.678.605,00	556.628.605,00	-
7.	Kabupaten Bungo	291.450.467,00	301.450.467,00	-
8.	Kabupaten Tebo	236.544.831,00	232.627.081,00	-
9.	Kabupaten Tanjab Barat	257.034.955,00	262.684.955,00	-
10.	Kabupaten Tanjab Timur	885.055.434,00	887.428.771,00	-
Jumlah		3.830.085.821,67	3.953.501.079,67	-

- 2) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp10.132.077.696,92.

Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.132.077.696,92, naik sebesar Rp174.608.877,23 dibandingkan dengan saldo tahun 2017 sebesar Rp9.957.468.819,69. Saldo sebesar Rp10.132.077.696,92 tersebut terdapat pada Bank Jambi di kabupaten dan kota (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**).

- 3) Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.064.989.608,72, naik sebesar Rp107.121,96 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2.064.882.486,76. Saldo Rekening KUPEM di Giro Beku sebesar Rp2.064.989.608,72 merupakan saldo rekening KUPEM di Rekening Giro Beku pada Bank Jambi rekening nomor 0101010546.
- 4) Saldo bersih Dana KUPEM *Executting* per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, sama dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

- 5) Saldo bersih Dana KUPEM *Executting* pensertifikatan tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, sama dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp0,00. Dana KUPEM ini seluruhnya berkategori macet sehingga dilakukan penyisihan Dana KUPEM tak tertagih sebesar 100%.

5.3.1.2.b Investasi Permanen **31 Desember 2018**
Rp374.189.973.893,67 **31 Desember 2017**
Rp332.572.104.276,50

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp374.189.973.893,67 naik sebesar Rp41.617.869.617,17 atau 11,12% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp332.572.104.276,50 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada Bank Jambi, PT JII dan PT Askrida dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Bank Jambi	371.443.091.788,27	329.591.898.232,28
2.	PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)	1.556.882.105,40	1.790.206.044,22
3.	PT Asuransi ASKRIDA	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
Jumlah		374.189.973.893,67	332.572.104.276,50

Hal-hal yang berkaitan dengan Investasi Permanen sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di Bank Jambi sebesar Rp173.364.000.000,00 yang terdiri dari modal dasar 173.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dimiliki Bank Jambi adalah Rp681.778.000.000,00. Persentasi kepemilikan saham sebesar 60%. Berdasarkan kepemilikan saham yang lebih dari 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan maka pencatatan atas investasi menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Provinsi Jambi menjadi Rp371.443.091.788,27.

Tabel 5.47 Rincian Ekuitas Bank Jambi

(dalam rupiah)

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 Desember 2018	per 31 Desember 2017
1.	Modal saham	719.469.000.000,00	681.778.000.000,00
2.	modal donasi	-	-
3.	Tambahan Modal Disetor	12.255.024.736,00	12.971.986.736,00
4.	Saldo Laba rugi yang belum direalisasikan atas penerapan perhitungan kembali PSAK 24	-	573.696.737,00
5.	Saldo Laba di tahan yang telah ditentukan Penggunaannya	491.596.803.741,00	354.865.153.261,00
6.	Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	260.226.163.366,00	245.977.063.873,00
7.	Keuntungan (Kerugian) surat berharga tersedia untuk dijual	(16.867.490.963,00)	-
8.	Keuntungan (Kerugian) atas liabilitas Imbalan Pasca kerja	(5.927.970.959,00)	-
TOTAL EKUITAS		1.460.751.529.921,00	1.296.165.900.607,00

Sumber dari Laporan Posisi Keuangan Bank Jambi Per 31 Desember 2018 (audited)

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah
 $\text{Rp}173.364.000.000,00 / \text{Rp}681.778.000.000,00 \times \text{Rp}1.460.751.529.921,00 = \text{Rp}371.443.091.788,27$.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII) sebesar Rp13.787.500.000,00. Persentasi saham sebesar 99,55%. Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode Ekuitas, sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII menjadi Rp1.556.882.105,40 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Penyertaan Modal di PT JII

(dalam rupiah)

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2018	per 31 Desember 2017
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
2.	Modal saham Afrizal	62.500.000,00	62.500.000,00
	Jumlah Saham	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
3.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.051.678.787,85)	(11.660.681.262,87)
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(231.291.627,60)	(390.997.524,98)
5.	Lab (rugi) tahun 2017 kurang saji dikarenakan sampai dengan Pemeriksaan beakhir belum didapat Laporan Keuangan PT JII Audited.	(3.089.990,00)	
	TOTAL EKUITAS	1.563.939.594,55	1.798.321.212,15

Sumber dari Laporan Keuangan PT. JII per 31 Desember 2018

Nilai Investasi di PT. JII dengan Metode Ekuitas adalah
 $\text{Rp}13.787.500.000,00 / \text{Rp}13.850.000.000,00 \times \text{Rp}1.563.939.594,55 = \text{Rp}1.556.882.105,40$.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT. ASKRIDA per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentasi kepemilikan saham sebesar 0,60%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (*Cost Method*) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp6.138.019.136.778,04	Rp5.869.792.729.936,48

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.138.019.136.778,04 naik sebesar Rp268.226.406.841,53 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.869.792.729.936,48. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Tanah	782.603.827.388,47	755.588.163.101,47
2.	Peralatan dan Mesin	1.276.370.389.402,12	1.059.612.798.143,19
3.	Gedung dan Bangunan	1.422.186.530.462,79	1.309.278.538.420,19
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.953.653.854.201,34	6.447.316.543.350,08
5.	Aset Tetap Lainnya	458.019.324.660,14	409.861.419.365,05
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	60.307.829.961,00	59.944.575.231,99
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.815.122.619.297,82)	(4.171.809.307.675,49)
Jumlah		6.138.019.136.778,04	5.869.792.729.936,48

5.3.1.3.a Tanah

31 Desember 2018
Rp782.603.827.388,47

31 Desember 2017
Rp755.588.163.101,47

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp782.603.827.388,47, naik sebesar Rp27.015.664.287,00, dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp755.588.163.101,47. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	755.588.163.101,47
Mutasi Tambah	Rp	29.139.829.506,00
Mutasi Kurang	Rp	(2.124.165.219,00)
Jumlah	Rp	782.603.827.388,47

Mutasi tambah sebesar Rp29.139.829.506,00 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.477.206.406;
2. Mutasi tambah (hibah dari masyarakat) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp5.845.000,00;
3. Mutasi tambah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp26.849.333.100,00 yang merupakan Tanah P3d Kabupten/Kota Sebesar Rp26.711.383.100,00 dan mutasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp137.950.000,00;
4. Mutasi Tambah berupa Hibah dari Kementerian Pertanian pada Dinas Perkebunan sebesar Rp807.445.000,00

Mutasi Kurang sebesar Rp2.124.165.219,00 terdiri dari:

1. Mutasi kurang sebesar Rp137.950.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang dimutasikan ke Biro PBMD.
2. Reklas kurang ke Aset Tetap Lainnya Rp282.968.000,00 pada Dinas PUPR karena belum berupa aset tetap tanah, masih berbentuk biaya appraisal.
3. Mutasi Kurang Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah pada Biro PBMD ke Pengadilan Tinggi Negeri sebesar Rp1.703.247.219,00.

Beberapa permasalahan tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut adalah:

1. Terdapat bangunan-bangunan permanen dan kios-kios milik masyarakat yang berada di atas tanah seluas 9.626 m² terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura dengan sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 seluas 1.100.923 m² terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, juga sebagian dikuasai oleh masyarakat.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 413/KEP.GUB/SETDA. BPAKD.3.2/2013 tanggal 11 Juni 2013.

Tim telah melakukan:

- 1) Melakukan pendataan aset Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, tumpang tindih, terutama Tanah HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 1972 yang sudah diganti dengan HP Nomor 8 Tahun 2010;
- 2) Menyiapkan action plan untuk langkah-langkah konkrit;
- 3) Menyurati pihak BPN untuk mendapat penjelasan tentang riwayat dan risalah Tanah yang bermasalah/dikuasai masyarakat atau tumpang tindih mengenai kepemilikan;
- 4) Membentuk Tim Kecil untuk melakukan Inventarisasi terhadap HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 2010 dengan melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Camat, Lurat, RT dan masyarakat untuk melakukan inventarisasi, investigasi, pengukuran dilapangan dan melaksanakan negosiasi dengan masyarakat. Terhadap tanah dalam penguasaan masyarakat, penyelesaiannya diusahakan dengan musyawarah/mediasi untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan secara hukum dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut;
- 5) Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi agar dapat mengeluarkan hasil inventarisasi/pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Nomor 31/03-15.71/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, perihal permohonan mengeluarkan hasil inventarisasi dilapangan. Pihak BPN Kota Jambi telah mengeluarkan hasil inventarisasi dan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Nomor : 82/03-15.71/II/2014 perihal Permohonan Penjelasan Data dan Luas Tanah dan dilampiri dengan peta dan data lengkap yang nantinya akan dijadikan bahan oleh Biro Hukum untuk penyelesaian selanjutnya;
- 6) Dalam pengamanan Aset Tanah tersebut telah dilakukan pemasangan papan merk pada lokasi HP Nomor 40 Tahun 1972 dan Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010.
- 7) Untuk tanah HP Nomor 8 Tahun 2010 telah dilakukan pendataan nama pemakai/pemilik kios-kios/toko yang berdiri di atas tanah tersebut sesuai

dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 593/31/SETDA.PBMD-2.2/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang mohon bantuan data pedagang, dan sesuai dengan surat Ketua RT 18 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi tanggal 25 Februari 2019 tentang Penyampaian data warga. Selanjutnya akan diberlakukan dengan sewa pakai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Tanah seluas 45.710 m² terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 5 Tahun 1970 diantaranya seluas 19.668 m² digunakan untuk Cadika/Gedung Pramuka dan sisanya sebanyak 13 bidang tanah dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengamanan melalui pemasangan papan nama sejak tahun 2013.
3. Tanah seluas 72.660 m² terletak di Kelurahan Simpang IV Sipin dengan Sertifikat HP Nomor 6 Tahun 1970 digunakan untuk Kompleks Perumahan DPRD Tingkat I dan Perumahan Pegawai Golongan III sebanyak 13 rumah, sedangkan sisanya merupakan tanah kosong yang ditempat oleh 5 kepala keluarga sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 180/SETDA.PBMD-2.2/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 hal penyampaian data nama yang menempati tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1987, untuk penyelesaian lebih lanjut.
4. Tanah seluas 264.320 m² terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 58 Tahun 1989 digunakan untuk lapangan golf, tanah kosong dan sebagian dikuasai oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan terhadap tanah dimaksud diatas yaitu telah dilakukan pengamanan dengan cara pemasangan papan nama pada tahun 2013002C selanjutnya secara bertahap akan diselesaikan apabila penyelesaian tanah HP Nomor 8 tahun 2010 dan HP Nomor 40 tahun 1972 tuntas.

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp1.276.370.389.402,12 Rp1.059.612.798.143,19

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.276.370.389.402,12 naik sebesar Rp216.757.591.258,93 atau 20,45% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.059.612.798.143,19. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	1.059.612.798.143,19
Mutasi Tambah	Rp	342.507.191.250,61
Mutasi Kurang	Rp	(125.749.599.991,68)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	1.276.370.389.402,12

Mutasi tambah sebesar Rp342.507.191.250,61 terdiri dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar **Rp120.900.807.250,20** tersebar pada 36 OPD (Rincian dapat dilihat pada **(Lampiran 16)**).
2. Reklasifikasi dari aset selain peralatan dan mesin sebesar **Rp2.026.150.115,00** terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan

- Dinas Kelautan dan Perikanan	4.000.000,00
- Dinas Pendidikan	1.977.278.615,00
Jumlah (1)	1.981.278.615,00
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan Irigasi

- Dinas Perhubungan	19.871.500,00
Jumlah (2)	19.871.500,00
 - 3) Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya

- Biro PBMD	25.000.000,00
Jumlah (3)	25.000.000,00
Jumlah (1+2+3)	2.026.150.115,00
3. Mutasi Tambah antar OPD sebesar **Rp106.753.484.449,41** terdiri dari:

1) Biro Kesramas	58.947.000,00
2) Biro APSDA	73.613.500,00
3) Biro APKS	111.213.000,00
4) Biro Organisasi	15.729.000,00
5) Biro Umum	7.020.101.109,38
6) BPBD	222.500.000,00
7) Biro Humas	341.446.000,00
8) Badan Kepegawaian Daerah	274.613.082,00
9) Biro PBMD	1.959.600.000,00
10) Biro Hukum	66.003.000,00
11) Dinas Kominfo	222.700.000,00
12) Biro Pemerintahan	50.538.000,00
13) Dinas Penanaman Modal PTSP	168.700.000,00
14) Dinas Pendidikan	88.583.536.228,03
15) Badan Keuangan Daerah	61.100.000,00
16) Dinas Kehutanan	7.292.627.530,00
17) Dinas ESDM	207.021.000,00
18) Dinas Perhubungan	23.496.000,00
Jumlah	Rp106.753.484.449,41
4. Hibah sebesar **Rp111.176.409.441,00** terdiri dari :

1) Hibah dari KKP Kemenkes RI ke Dinas Kelautan dan Perikanan	326.386.400,00
2) Hibah dari Kemenkes RI ke Dinas Kesehatan	9.973.504.900,00
3) Hibah dari Kemendikbud RI ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.180.989.500,00

4)	Hibah dari BNPB ke BPBD	2.575.069.200,00
5)	Hibah dari Sosnakertran Kab. Tanjab Barat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	234.500.000,00
6)	Hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	185.129.120,00
7)	Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI ke Dinas PPPAPP	37.842.000,00
8)	Hibah dari Kemenkes RI ke RSUD Rd. Mattaheer	90.753.073.134,00
9)	Hibah dari PT. Jasa Raharja ke RSUD Rd. Mattaheer	421.545.900,00
10)	Hibah dari Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan ke Dinas Kehutanan	1.898.679.500,00
11)	Hibah dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi ke Dinas Kehutanan	481.299.000,00
12)	Hibah dari Millenium Challenge Account Indonesia ke Dinas Kehutanan	325.247.930,00
13)	Hibah dari Kementerian Pertanian ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.783.142.857,00

JUMLAH

Rp111.176.409.441,00

5. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin yang dibiayai dari Hutang terdapat pada RSUD Rd. Mattaheer sebesar **Rp1.378.626.795,00**
6. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat salah penganggaran yang terdapat pada Biro PBMD sebesar **Rp 271.713.200,00.**

Mutasi kurang sebesar **Rp125.749.599.991,68** terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset selain Peralatan dan Mesin sebesar **Rp3.115.684.272,42** sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi Ke Aset Gedung dan Bangunan

- Dinas Penanaman Modal PTSP	164.520.000,00
Jumlah (1)	164.520.000,00
 - 2) Reklasifikasi Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Biro PBMD	71.795.800,00
- RSUD Rd. Mattaheer	257.488.300,00
- Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	149.468.000,00
Jumlah (2)	478.752.100,00
 - 3) Reklasifikasi Ke KDP

- Badan Keuangan Daerah	14.300.000,00
Jumlah (3)	14.300.000,00
 - 4) Reklasifikasi Ke Aset Lainnya

- Dinas Sosial Dukcapil	3.800.000,00
-------------------------	--------------

- Biro PBMD	1.177.229.482,02
- Inspektorat	726.346.690,40
- RSUD Rd. Mattaher	49.700.000,00
- Sekretariat Dewan	430.494.000,00
- Badan Keuangan Daerah	15.617.000,00
Jumlah (4)	2.403.187.172,42
5) Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	
- Biro PBMD	54.925.000,00
Jumlah (5)	54.925.000,00
JUMLAH (1+2+3+4+5)	Rp3.115.684.272,42

2. Pengurangan atas barang yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar **Rp10.160.071.988,17** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) Dinas Sosial Dukcapil	14.998.500,00
2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.050.000,00
3) Dinas Kelautan dan Perikanan	157.840.000,00
4) Biro Keramas	5.599.000,00
5) Biro APSDA	7.275.000,00
6) BPSDM	7.918.400,00
7) Dinas Kesehatan	80.645.000,00
8) Dinas Ketahanan Pangan	3.207.600,00
9) Dinas Koperasi UKM	44.420.000,00
10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	750.000,00
11) Dinas ESDM	68.400.000,00
12) Nakertran	117.841.504,00
13) Dinas Pemberdayan Perempuan	9.758.400,00
14) DLH	9.000.000,00
15) Biro Humas	5.820.000,00
16) inspektorat	2.030.000,00
17) balitbangda	12.341.470,00
18) RSUD	411.822.605,00
19) Dinas Kehutanan	161.340.850,00
20) Rs Jiwa	141.840.000,00
21) Kominfo	8.000.000,00
22) Dinas Pekerjaan Umum	24.757.580,00
23) Badan Penghubung Daerah	6.790.000,00
24) Badan Keuangan Daerah	12.453.700,00
25) DPM dan PTSP	12.624.750,00
26) BKD	72.271.900,00

27) Sekretariat Dewan	55.900.000,00
28) Biro PBMD	75.063.000,00
29) Dinas Pendidikan	7.692.965.260,82
30) Dinas Pendidikan	897.347.468,35
JUMLAH	Rp10.160.071.988,17

3. Mutasi Kurang antar OPD sebesar **Rp108.713.125.162,73** terdiri dari :

1) Biro Umum	677.093.237,70
2) Biro PBMD	100.583.519.090,03
3) Dinas Perhubungan	4.985.862.835,00
4) Sekretariat DPRD	2.340.750.000,00
5) Badan Kepegawaian Daerah	125.900.000,00
Jumlah	Rp108.713.125.162,73

4. Pengurangan aset atas Kehilangan (TPTGR) total sebesar **Rp186.550.000,00** yang terdapat pada Badan Kesbangpol berupa Laptop Sebesar 17.850.000,00 dan pada Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Roda 4 sebesar 168.700.000,00.
5. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan KEPGUB Nomor 650/KEP-GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 Tahun 2018 sebesar **Rp853.515.594,66**.
6. Pengurangan aset Akibat Koreksi Nilai Pencatatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar **Rp1,00**
7. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada RSUD Rd. Mattaher yang mana aset tersebut telah tercatat pada tahun lalu sebesar **Rp2.263.342.735,00**.
8. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD Rd. Mattaher karena *Double* Pencatatan sebesar **Rp44.775.000,00**
9. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD yang dilelang sebesar **Rp412.535.237,70**

Beberapa permasalahan terkait peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 51 unit sebesar Rp429.103.194,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum, dengan rincian pada sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Kendaraan Dinas Roda Dua yang Tidak Dapat Diuji Keberadaannya pada Biro Umum

(dalam rupiah)			
No.	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Total

	Nama OPD/Biro	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	Biro Umum	51	429.103.194,30				
	Jumlah	51	429.103.194,30				

2. Terdapat Kendaraan Dinas Roda Dua Sebanyak 23 Unit dan Kendaraan Roda Empat Sebanyak 6 Unit Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD

(dalam rupiah)

No	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-4)
	Kendaraan Roda Dua				
1.	Biro Umum	22	0	0	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	0	0	23
	Kendaraan Roda Empat				
1.	Biro Umum	6	6		6
	Jumlah	29	6	0	29

3. Terdapat permasalahan terkait peminjaman kendaraan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 26 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp4.915.607.777,55 yang dimanfaatkan oleh pihak lain telah kadaluarsa waktu perjanjian pinjam pakainya karena telah melebihi dua tahun dan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.642.750.680,87 dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung dengan dokumen pinjam pakai.
- 2) Sebanyak 7 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp91.618.238,00 digunakan oleh PNS yang telah pensiun sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Kendaraan Digunakan oleh PNS yang Telah Pensiun

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4	
		Jml (buah)	Nilai (Rp)	Jml (buah)	Nilai (Rp)
1.	Bappeda	1	6.200.000,00		-
2.	Dinas Kesehatan	1	4.500.000,00		-
3.	Disperindag	-	-	1	32.100.000,00
4.	Biro Umum	3	18.050.000,00		
5.	BPBMD	-	-	1	30.768.238,00
	Jumlah	5	28.750.000,00	2	62.868.238,00

- 3) Terdapat kendaraan dinas sebanyak 22 unit dengan nilai sebesar Rp4.013.619.601,86 yang digunakan oleh pegawai yang sudah dimutasi ke OPD lain sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Kendaraan Dinas yang Digunakan oleh Pegawai yang Sudah Dimutasi ke OPD Lain

(dalam rupiah)

No.	Dicatat pada KIB OPD	Jumlah	Nilai	Digunakan pegawai pada OPD
	Kendaraan Roda Dua			
1.	Dinas Pekerjaan Umum	2	89.200.000,00	BPKAD

2.	Badan Ketahanan Pangan	2	18.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah A	4	107.200.000,00	
	Kendaraan Roda Empat			
1.	Biro Umum	15	2.961.019.601,86	Disbudpar, DPRD, Bandiklatda, Set Korpri
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2	695.400.000,00	Bappeda, BPKAD
3.	Badan Ketahanan Pangan	1	250.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah B	18	3.906.419.601,86	
	Jumlah (A+B)	22	4.013.619.601,86	

4. Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 18 unit sebesar Rp213.424.913,00 di sembilan OPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD Yang Hilang Belum Diproses Penghapusan dari KIB dan Belum Diproses TP TGR

(dalam rupiah)

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Disbudpar	Laptop Toshiba	1	10.000.000,00	19-Nop-14
2.	RSJD	Laptop Sony Vaio Tahun 2014	1	10.400.000,00	10-Nop-14
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	03-Nop-11
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	20-Mei-11
		Printer Canon MP 287	1	955.000,00	21-Jun-12
3.	Bandiklatda	Televisi 24 Inci merk Sharp	7	24.255.000,00	17-Jun-14
4.	Dinas PU	Motor Kawasaki BH 4150 HZ	1	24.200.000,00	24-Feb-15
5.	Dinkes	Honda NF 125 TRF	1	15.050.000,00	30-Mrt-15
6.	Dinas Perkebunan	Yamaha Vixion BH 3647 HZ	1	21.546.500,00	15-Mei-15
	Jumlah		15	119.355.500,00	

Tabel 5.55 Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD Yang Hilang Sudah Proses TPTGR Namun Belum Dihapus pada Buku KIB

(dalam rupiah)

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Dispenda	Honda Supra X 125, BH 3740 HZ	1	15.617.000,00	27-Jun-14
2.	Biro Humas	Kamera vidio Sony	1	29.900.000,00	11-Dec-14
3.	Biro Umum	Infokus	1	48.552.413,39	12-Nop-13
	Jumlah		3	94.069.413,39	

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp1.422.186.530.462,79 **Rp1.309.278.538.420,19**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.186.530.462,79 naik sebesar Rp112.907.992.042,60 atau 8,62% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.309.278.538.420,19. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2017	Rp	1.309.278.538.420,19
Mutasi Tambah	Rp	631.964.347.954,01
Mutasi Kurang	Rp	(519.056.355.911,41)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	1.422.186.530.462,79

Mutasi tambah sebesar **Rp631.964.347.954,01** terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 yang tersebar pada 25 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp136.430.626.143,34** (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 17**).
2. Reklasifikasi sebesar **Rp802.239.999,99** terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:

- Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	<u>164.520.000,00</u>
Jumlah 1)	Rp164.520.000,00
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:

- Dinas Kelautan dan Perikanan	<u>56.890.000,00</u>
Jumlah 2)	Rp56.890.000,00
 - 3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:

- Badan Keuangan Daerah	137.430.000,00
- Rumah Sakit Jiwa	48.850.000,00
- Set. DPRD	<u>91.089.999,99</u>
Jumlah 3)	Rp277.369.999,99
 - 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya

- Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	<u>303.460.000,00</u>
Jumlah 4)	Rp303.460.000,00
3. Pertambahan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp462.767.591.319,40** terdiri dari:

1) Biro Umum	16.466.077.619,53
2) Dinas Perhubungan	4.595.759.800,00
3) Dinas Kehutanan	1.001.411.388,00
4) Dinas Pendidikan	<u>440.704.342.511,87</u>
Jumlah	Rp462.767.591.319,40
4. Pertambahan yang berasal dari hibah sebesar **Rp13.045.892.572,00** terdiri dari:

1) Dinas Kelautan dan Perikanan	4.175.344.572,00
2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.497.500.000,00
3) RSUD	4.960.508.000,00
4) Dinas Kehutanan	2.412.540.000,00
Jumlah	Rp13.045.892.572,00

5. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang dibiayai dari Hutang ada terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebesar **Rp1.680.967.569,28**
6. Mutasi tambah dari Belanja Barang dan Jasa karena tersebut merupakan aset tetap sebesar **Rp243.630.000,00**.
 - 1) *Dinas Penanaman Modal dan PTSP* 9.800.000,00
 - 2) *Dinas Koperasi dan UMKM* 149.680.000,00
 - 3) *Badan Kesbangpol* 84.150.000,00
 - Jumlah **Rp243.630.000,00**
7. Mutasi tambah mencatat Gedung yang belum tercatat pada Dinas Sosial Dukcapil sebesar **Rp724.468.550,00**
8. Mutasi tambah mencatat Gedung penilaian KPKNL pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar **Rp16.247.361.000,00**
9. Mutasi tambah mencatat Gedung dan Bangunan yang mencatat kekurangan nilai pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial dan Dukcapil sebesar **Rp21.570.800,00**

Mutasi kurang sebesar **Rp519.056.355.911,41** terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke aset selain gedung dan bangunan sebesar **Rp35.415.602.721,11**
 - 1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:
 - *Dinas Kelautan dan Perikanan* 4.000.000,00
 - *Dinas Pendidikan* 1.977.278.615,00
 - Jumlah 1) **Rp1.981.278.615,00**
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:
 - *RSUD* 1.932.931.672,02
 - *Dinas Perhubungan* 1.506.729.830,00
 - *Dinas Pendidikan* 199.700.000,00
 - Jumlah 2) **Rp3.639.361.502,02**
 - 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:
 - *RSUD* 9.890.180.343,09
 - *Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan* 199.820.000,00
 - *Dinas PU* 16.914.621.576,00
 - *Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah* 888.825.300,00
 - Jumlah 3) **Rp27.893.447.219,09**
 - 4) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:

- RSUD Rd. Mattaher	1.654.399.385,00
- Rumah Sakit Jiwa	158.036.000,00
- Dinas Perhubungan	49.500.000,00
- Badan Keuangan Daerah	23.650.000,00
- Sekretariat DPRD	<u>15.930.000,00</u>
Jumlah 4)	1.901.515.385,00

2. Pengurangan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp463.468.597.319,40** terdiri dari:

1) Dinas Perhubungan	16.267.077.619,53
2) Biro PMBD	<u>447.201.519.699,87</u>
Jumlah	Rp463.468.597.319,40

3. Mutasi kurang karena nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp1.377.740.970,00** terdapat pada:

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00
2) RSJ	20.000.000,00
3) Dinas Kehutanan	20.000.000,00
4) Dinas Perhubungan	1.257.590.970,00
5) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	15.000.000,00
6) Dinas Pemuda dan Olahraga	37.900.000,00
7) Badan Kepegawaian Daerah	<u>2.250.000,00</u>
Jumlah	Rp1.377.740.970,00

4. Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan karena pengembalian belanja melalui potongan SP2D sebesar **Rp165.255.230,90** terdapat pada:

1) Rumah Sakit Umum Daerah	108.955.359,03
2) Rumah Sakit Jiwa	46.305.371,87
3) Dinas Pendidikan	<u>9.994.500,00</u>
Jumlah	Rp165.255.230,90

5. Penghapusan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 368/KEP-GUB/SETDA.PBMD/2018 tahun 2018 pada Biro PBMD sebesar **Rp1.147.979.000,00**.

6. Penghapusan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 650/KEP-GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 tahun 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp1.032.351.500,00**.

7. Mutasi Kurang pada RSUD mengeluarkan Aset Gedung Bangunan yang telah tercatat tahun lalu sebesar Rp194.136.000,00.

8. Mutasi Kurang karena temuan BPK berupa pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.332.170,00.

9. Mutasi kurang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga karena pencatatan tidak memadai (hasil Revaluasi BMD) sebesar Rp16.247.361.000,00

Beberapa permasalahan terkait Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Terdapat 10 unit Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp1.924.752.000,00 yang dalam proses penghapusan.

Tabel 5.56 Rincian Gedung dan Bangunan dalam Proses Penghapusan
(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Jumlah (unit)	Nilai	Pengajuan Usulan Penghapusan
1.	Biro PBMD	6	1.139.016.000,00	24 April 2014
2.	Dinsosnakertrans	3	18.900.000,00	-
3.	BPSDM	1	766.836.000,00	Tahun 2013
	Jumlah	10	1.924.752.000,00	

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Rp6.953.653.854.201,34	Rp
6.447.316.543.350,08		

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.953.653.854.201,34 naik sebesar Rp506.337.310.851,26 atau 7,85% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.447.316.543.350,08. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	6.447.316.543.350,08
Mutasi Tambah	Rp	886.278.798.686,62
Mutasi Kurang	Rp	(379.941.487.835,36)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	6.953.653.854.201,34

Mutasi tambah sebesar **Rp886.278.798.686,62** terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar **Rp505.320.632.964,52** yang tersebar pada 9 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**).
2. Mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi di Dinas Pendidikan sebesar **Rp2.188.591.747,21**.
3. Reklasifikasi sebesar **Rp13.645.410.202,02** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:

<i>Dinas Pekerjaan Umum</i>	<i>Rp</i>	<i>9.328.617.600,00</i>
-----------------------------	-----------	-------------------------

- 2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar **Rp478.752.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

	Rp	257.488.300,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>		
<i>Biro PBMD</i>	Rp	71.795.800,00
<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</i>	Rp	149.468.000,00
Jumlah	Rp	478.752.100,00

- 3) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:

<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	Rp	1.932.931.672,02
<i>Dinas Perhubungan</i>	Rp	1.506.729.830,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	Rp	199.700.000,00
Jumlah	Rp	3.639.361.502,02

- 4) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke belanja modal pada:

<i>Kominfo</i>	Rp	<u>198.679.000,00</u>
Jumlah	Rp	198.679.000,00

4. Mutasi tambah dari yang berasal dari Hibah sebesar Rp364.798.282.074,47.

<i>Dinas Kehutanan</i>	Rp	4.840.404.000,00
<i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i>	Rp	1.032.620.352,00
<i>Dinas ESDM</i>	Rp	<u>358.925.257.722,47</u>
Jumlah	Rp	364.798.282.074,47

5. Mutasi tambah antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp325.881.698,40** terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah pada Biro PBMD dari Dinas Perhubungan sebesar Rp322.881.698,40 berupa jaringan.
- 2) Mutasi tambah pada Biro Humas dan Protokol dari Biro PBMD sebesar Rp3.000.000,00 berupa jaringan.

Mutasi kurang sebesar **Rp379.941.487.835,36** terdiri dari:

1. Reklasifikasi kurang pada Dinas PUPR sebesar Rp8.003.816.944,00 ke KDP.
2. Mutasi kurang pada Dinas PUPR sebesar Rp4.992.149.500,68 karena Hasil Temuan.
3. Reklasifikasi kurang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp19.871.500,00 ke Peralatan dan Mesin dan sebesar Rp 397.456.000,00 mutasi ke Biro PBMD
4. Mutasi kurang pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebesar Rp9.880.000,00 karena di reklas ke Rusak Berat.
5. Mutasi kurang pada Biro PBMD sebesar Rp361.844.856.889,68 ke Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan.
6. Reklasifikasi kurang pada Dinas PUPR sebesar Rp4.673.457.001,00 ke beban pemeliharaan.

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp458.019.324.660,14 **Rp409.861.419.365,05**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp458.019.324.660,14 naik sebesar Rp48.157.905.295,09 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp409.861.419.365,05 Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	409.861.419.365,05
Mutasi Tambah	Rp	63.892.323.938,66
Mutasi Kurang	Rp	(15.734.418.643,57)
Jumlah	Rp	458.019.324.660,14

Mutasi tambah sebesar **Rp63.892.323.938,66** diatas terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar **Rp20.759.890.076,00** yang tersebar pada 9 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**).

2. Reklasifikasi sebesar **Rp27.893.447.219,09** terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:	
- Rumah Sakit Umum Daerah	9.890.180.343,09
- Dinas PU PR	16.914.621.576,00
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	199.820.000,00
- Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	<u>888.825.300,00</u>
Jumlah	27.893.447.219,09

3. Pertambahan Aset Tetap Lainnya dari Hibah Organisasi atau Instansi lain sebesar **Rp1.518.764.000,00** yaitu pada Dinas Kehutanan.

4. Mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi sebesar **Rp13.720.222.643,57** terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan	13.497.917.680,57
2) Dinas Kehutanan	<u>222.304.963,00</u>
Jumlah	13.720.222.643,57

Mutasi kurang sebesar **Rp15.734.418.643,57** terdiri dari:

1. Reklasifikasi sebesar **Rp485.290.000,00** terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

- Dinas Penanaman Modan dan PTSP	303.460.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	<u>56.890.000,00</u>
Jumlah 1)	360.350.000,00
 - 2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada:

- Dinas Kehutanan	<u>25.000.000,00</u>
Jumlah 2)	25.000.000,00
 - 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya lain-lain pada:

- Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	99.940.000,00
Jumlah 3)	99.940.000,00
2. Pengurangan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp13.730.202.643,57** dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pengurangan karena Kapitalisasi di Dinas Kehutanan dengan nilai sebesar **Rp1.518.926.000,00**.

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp60.307.829.961,00	Rp59.944.575.231,99

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.307.829.961,00 naik sebesar Rp363.254.729,01 atau 0,60% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.944.575.231,99. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2017	Rp	59.944.575.231,99
Mutasi Tambah	Rp	11.231.021.261,00
Mutasi Kurang	Rp	<u>(10.867.766.531,99)</u>
Jumlah	Rp	60.307.829.961,00

Mutasi tambah sebesar **Rp11.231.021.261,00** terdiri dari :

1. Reklasifikasi sebesar **Rp9.919.632.329,00** pada:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:
 - RSUD Rd. Mattaher 1.654.399.385,00
 - Rumah Sakit Jiwa 158.036.000,00
 - Dinas Perhubungan 49.500.000,00
 - Sekretariat DPRD 15.930.000,00
 - Badan Keuangan Daerah 23.650.000,00
 - Jumlah 1.901.515.385,00**
- 2) Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:
 - Dinas PU PR 8.003.816.944,00
 - Jumlah 8.003.816.944,00**
- 3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada:
 - Badan Keuangan Daerah 14.300.000,00
 - Jumlah 14.300.000,00**

2. Mutasi tambah (P3D) Kabupaten/Kota dari Biro Pengeloan Barang Milik Daerah sebesar **Rp1.261.778.932,00** dengan rincin sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan 978.737.932,00
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 283.041.000,00
- Jumlah 1.261.778.932,00**

3. Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset tetap sebesar Rp49.610.000,00

Mutasi kurang sebesar **Rp10.867.766.531,99** yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke aset selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp9.605.987.599,99** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:
 - Rumah sakit Jiwa 48.850.000,00
 - Sekretariat DPRD 91.089.999,99
 - Badan Keuangan Daerah 137.430.000,00
 - Jumlah 277.369.999,99**
- 2) Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:
 - Dinas PU PR 9.328.617.600,00
 - Jumlah 9.328.617.600,00**

2. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp1.261.778.932,00** pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah ke Dinas Pendidikan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

KDP berada pada 12 OPD sebesar Rp60.307.829.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo 2018
1	Dinas Pendidikan	2.018.028.932,00
2	Dinas Kesehatan	247.460.000,00
3	RSUD Rd. Mattaheer	46.884.136.085,00
4	Rumah Sakit Jiwa	158.036.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum PR	8.003.816.944,00
6	Dinas Perhubungan	2.498.716.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.720.000,00
8	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	13.950.000,00
9	Dinas Perkebunan	29.285.000,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	332.941.000,00
12	Sekretariat DPRD	15.930.000,00
13	Badan Keuangan Daerah	55.810.000,00
	Jumlah	60.307.829.961,00

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
(Rp4.815.122.619.297,82) **(Rp4.171.809.307.675,49)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp4.815.122.619.297,82) naik sebesar (Rp643.313.311.622,33) dibandingkan dengan tahun 2017 (Rp4.171.809.307.675,49). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018.

Tabel 5.58 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2018
1.	Peralatan dan Mesin	(920.745.305.824,44)
2.	Gedung dan Bangunan	(309.115.614.169,54)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.585.261.699.303,84)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	JUMLAH	(4.815.122.619.297,82)

Rincian atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2018

31 Desember 2017

-

-

Dana Cadangan per 31 Desember 2018 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2018
Rp976.179.787.515,65

31 Desember 2017
Rp918.273.055.244,87

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp976.179.787.515,65 atau naik sebesar Rp57.906.732.370,78 atau 6,31% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp918.273.055.244,87. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	918.273.055.244,87
Mutasi Tambah	Rp	75.219.704.322,76
Mutasi Kurang	Rp	(17.743.380.099,75)
Akumulasi Amortisasi	Rp	(412.947.076,67)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -		
Aset Lain-lain	Rp	843.355.124,44
Jumlah	Rp	976.179.787.515,65

Tabel 5.59 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	156.062.000,00	165.725.500,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	189.742.089.055,00	189.742.089.055,00
4.	Aset Tidak berwujud	9.532.845.680,46	11.167.077.438,66
5.	Aset Lain-lain	793.799.303.969,51	734.679.084.488,30
6.	Akumulasi Amortisasi	(6.861.088.450,47)	(6.448.141.373,80)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(10.189.424.738,85)	(11.032.779.863,29)
Jumlah		976.179.787.515,65	918.273.055.244,87

5.3.1.5.a Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2018
Rp156.062.000,00

31 Desember 2017
Rp165.725.500,00

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp156.062.000,00 turun sebesar Rp9.663.500,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp165.725.500,00 merupakan saldo tagihan piutang Ganti Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan surat pembebanan. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdapat pada:

1. Biro Humas dan Protokol	Rp	29.900.000,00
2. Bakeuda	Rp	78.345.500,00
3. Badan Kesbangpol	Rp	12.316.500,00
4. Dinas Kehutanan	RP	35.500.000,00
Jumlah	Rp	156.062.000,00

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

31 Desember 2018
Rp189.742.089.055,00

31 Desember 2017
Rp189.742.089.055,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing jumlahnya sebesar Rp189.742.089.055,00 dan Rp189.742.089.055,00 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT (*BuildOperateTransfer*/Bangun Guna Serah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal	8.333.440.000,00	8.333.440.000,00
2.	BOT dengan PT Simota Putra Prayudha (WTC)	13.986.560.000,00	13.986.560.000,00
3.	BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa	167.422.089.055,00	167.422.089.055,00
Jumlah		189.742.089.055,00	189.742.089.055,00

Hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kerjasama BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu *River View & Resort* di Jalan Slamet Riyadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT pada tanggal 27 Januari 1995.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi, untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas 92 kamar dalam jangka waktu 5 tahun. PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian. Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu Rp8.333.440.000,00 yaitu seluas 52.084 m² dengan Nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m².

2. BOT dengan PT Simota Putra Prayudha sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang telah diubah dalam *Addendum I* Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 28 April 2006. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah*).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri dari pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m² senilai Rp13.986.560.000,00. PT Simota Putra Prayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/*grand opening*. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

3. BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 – Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah*).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m² senilai Rp167.422.089.055,00. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp146.176.200.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp14.617.000.000,00 selama jangka waktu BOT tersebut selama 5 tahun.

Selain BOT di atas, Pemprov Jambi juga mengadakan kerjasama BOT dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian

Nomor :PK.GUB/PU/2014
Nomor :001/JBC-PKP/VI/2014

 tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah*) dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemprov Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m² dan bangunan di atasnya dengan nilai appraisal sebesar Rp208.000.000.000,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola Jambi Bisnis Center dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun. Sampai 31 Desember 2017, status tanah yang dikerjasamakan masih berupa hak pakai dan belum menjadi hak pengelolaan serta masih dalam sengketa yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Jambi No. 62/PDT/2014/PT.JMB tanggal 26 Januari 2015 dan sekarang masih dalam

proses banding di Mahkamah Agung. Oleh karena itu nilai BOT dengan PT Putra Kurnia Properti belum dapat dicatat sebagai Aset Lainnya.

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp9.532.845.680,46	Rp11.167.077.438,66

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.532.845.680,46 turun sebesar Rp1.634.231.758,20 atau 14,63% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.167.077.438,66

Saldo Tahun 2017	Rp	11.167.077.438,66
Mutasi Tambah	Rp	217.650.000,00
Mutasi Kurang	Rp	(1.851.881.758,20)
Jumlah	Rp	9.532.845.680,46

Mutasi Tambah sebesar **Rp217.650.000,00** terdiri dari:

- 1) Reklas tambah dari Peralatan dan Mesin pada RSUD sebesar Rp49.700.000,00.
- 2) Reklas tambah dari Peralatan dan Mesin pada Biro PBMD sebesar Rp54.925.000,00.
- 3) Mutasi tambah pada Biro Umum yang berasal dari Biro PBMD sebesar Rp113.025.000,00

Mutasi Kurang sebesar **Rp1.851.881.758,20** yang merupakan:

- Reklas dari Aset Lain-lain pada Dinas Sosdukcipil sebesar Rp1.851.881.758,20 karena kesalahan input tahun sebelumnya saat pemisahan OPD eks Sosnakertrans.

5.3.1.5.d Aset Lain-lain

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp793.799.303.969,51	Rp734.679.084.488,30

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp793.799.303.969,51 naik sebesar Rp59.120.219.481,21 atau 8,05% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp734.679.084.488,30. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	734.679.084.488,30
Mutasi Tambah	Rp	74.978.634.322,76
Mutasi Kurang	Rp	(15.858.414.841,55)
Jumlah	Rp	793.799.303.969,51

Mutasi tambah sebesar **Rp74.978.634.322,76** yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi :

1	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud pada Dinas Sosdukcapi	Rp	1.851.881.758,20
2	Reklasifikasi dari Aset tetap lainnya pada Dinas Sosdukcapi	Rp	99.940.000,00
3	Reklasifikasi dari PM pada Biro PBMD	Rp	1.177.229.482,02
4	Reklasifikasi dari JIJ pada Biro PBMD	Rp	39.800.000,00
5	Reklasifikasi dari TPTGR pada Biro PBMD	Rp	15.150.000,00
6	Reklasifikasi dari PM pada Inspektorat	Rp	726.346.690,40
7	Reklasifikasi dari PM pada Bakeuda	Rp	15.617.000,00
8	Reklasifikasi dari PM pada Dinas Sosdukcapi	Rp	3.800.000,00
9	Reklasifikasi dari PM pada Set DPRD	Rp	430.494.000,00
10	Reklasifikasi dari JIJ pada Set DPRD	Rp	9.880.000,00
11	Reklasifikasi dari Tanah pada Dinas PU	Rp	282.968.000,00
Jumlah			Rp 4.653.106.930,62

2. Penambahan Piutang lainnya (hasil pemeriksaan) pada Dinas PU Pera sebesar Rp6.510.343.743,16 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp7.332.170,00.

3. Mutasi tambah karena kurang pencatatan tahun sebelumnya pada Dinas PU sebesar Rp172.922.017,98

4. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pada Dinas ESDM Sebesar Rp63.634.929.461,00

Mutasi kurang sebesar **Rp15.858.414.841,55** terdiri dari:

1. Penghapusan:

1	Penghapusan Aset pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp	1.869.099.934,83
2	Penghapusan pada Dinas ESDM	Rp	1.023.108.948,00
3	Penghapusan pada Dinas Perhubungan	Rp	305.050.000,00
4	Penghapusan pada Dinas Tanaman Pangan	Rp	998.662.172,10
5	Penghapusan pada Bakeuda	Rp	1.068.606.807,58
6	Penghapusan pada Set. DPRD	Rp	828.800.000,00
7	Penghapusan pada RSJ	Rp	25.000.000,00
Jumlah			Rp 6.118.327.862,51

2. Pengurangan Karena pelunasan Temuan Pemeriksaan pada Biro Umum sebesar Rp144.483.500,00 Dinas PU sebesar Rp4.128.674.901,02 dan Dinas Tanaman Pangan sebesar Rp77.570.394,75 .

(Rp6.448.141.373,80). Adapun Rincian Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel 5.61 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017
1.	Dinas Pendidikan	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
2.	Dinas kesehatan	(12.958.000,00)	(7.942.000,00)
3.	Rumah Sakit Umum	(82.975.000,00)	(61.870.000,00)
4.	Pekerjaan Umum	(1.170.064.000,00)	(1.079.844.000,00)
5.	Dinas Perhubungan	(1.704.608.000,00)	(1.704.608.000,00)
6.	BPMD & PPT	(91.833.333,33)	(53.833.333,33)
7.	Biro Hukum	(129.480.000,00)	(129.480.000,00)
8.	Biro Pembangunan dan kerja sama	(57.120.800,00)	(45.696.640,00)
9.	biro umum	(77.285.380,47)	(65.982.880,47)
11.	Biro PBMD	(38.355.416,67)	(37.440.000,00)
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.096.408.520,00)	(861.444.520,00)
Jumlah		(6.861.088.450,47)	(6.448.141.373,80)

5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
(Rp10.189.424.738,85) **(Rp11.032.779.863,29)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp10.189.424.738,85), turun sebesar (Rp843.355.124,44) dibanding tahun 2017 (Rp11.032.779.863,29). Adapun Rincian Akumulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel 5.62 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017
1.	Satpol PP	(20.852.295,00)	(20.852.295,00)
2.	Biro Umum	(7.429.978.921,35)	(8.282.720.585,29)
3.	Kominfo	(41.942.736,00)	(41.942.736,00)
4.	RSJ	(476.044.858,00)	(501.044.858,00)
5.	Set DPRD	(1.790.383.389,00)	(2.186.219.389,00)
6.	Badan Kesbangpol	(208.084.101,50)	-
7.	Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP	(204.952.438,00)	-
8.	Bakeuda	(13.386.000,00)	-
9.	Dinas Sosial Dukcapil	(3.800.000,00)	-
Jumlah		(10.189.424.738,85)	(11.032.779.863,29)

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp445.044.323.195,12 **Rp347.596.657.213,20**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2018, kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp445.044.323.195,12 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Rincian mutasi kewajiban sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp445.044.323.195,12 **Rp347.596.657.213,20**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp445.044.323.195,12 atau naik sebesar Rp97.447.665.981,92 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp347.596.657.213,20. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.63 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Utang PFK	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	45.899.624.074,46	43.790.957.011,30
3.	Utang Belanja	1.810.228.744,00	1.705.840.898,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	397.334.470.376,66	302.099.859.303,90
Jumlah		445.044.323.195,12	347.596.657.213,20

5.3.2.1.a Utang PFK **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.3.2.1.b Utang Kepada Pihak Ketiga **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
Rp45.899.624.074,46 **Rp43.790.957.011,30**

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.899.624.074,46 atau naik sebesar Rp2.108.667.063,16 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.790.957.011,30. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara.
2. Setoran dari PT Putra Kurnia Properti sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.641.125.000,00 (sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 4.653.337.500, dan tahun 2018 sebesar Rp987.787.500,00 sebagai kontribusi perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan Jambi Bisnis Center. Namun perjanjian ini belum efektif berjalan karena status tanah yang dikerjasamakan masih sengketa kepemilikan dengan masyarakat.

3. Penambahan Jasa Giro dari PT WKS sebesar Rp 4.269.950.313,21 (tahun 2014 S/d 2017 sebesar Rp3.286.769.681,29 dan tahun 2018 sebesar Rp983.180.631,92).
4. Penambahan Jasa Giro dari PT Kurnia Property sebesar Rp382.665.446,48 (sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp258.453.925,21 dan tahun 2018 sebesar Rp124.211.521,27).
5. Kelebihan transfer ke kas daerah sebesar Rp6.800.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta tahun 2017 (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2018 tanggal 14 Februari 2018, dan Rp6.300.000 di tahun 2018.
6. Utang kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berasal dari setoran pihak ketiga atas temuan pemeriksaan BPK yang salah setor ke kas daerah Provinsi Jambi sebesar Rp7.187.409,97 sesuai surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 900/97/BPKAD-IV/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 hal salah setor kode rekening.

5.3.2.1.c Utang Belanja

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp1.810.228.744,00	Rp1.705.840.898,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.810.228.744,00 atau naik sebesar Rp104.387.846,00 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.705.840.898,00. (Rincian bisa dilihat pada **Lampiran 22**).

5.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp397.334.470.376,66	Rp302.099.859.303,90

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp397.334.470.376,66 naik sebesar Rp95.234.611.072,76 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp302.099.859.303,90.

Adapun rincian utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut :

1. Utang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp40.982.270.241,28.

<i>(dalam rupiah)</i>		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.461.435.707,00
2	Hutang Belanja Pegawai BLUD	17.461.240.170,00
3	Hutang Belanja Modal BLUD	3.059.594.364,28
	Jumlah	40.982.270.241,28

2. Utang pada Bakeuda-SKPKD sebesar Rp290.942.980.974,38 yang merupakan utang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Air Permukaan

dan Pajak Rokok serta kurang salur PBB-KB tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

2.a. Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Air Permukaan Tahun 2018 (Triwulan II, III dan IV) sebesar Rp263.750.772.095,50 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Utang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Air Permukaan Tahun 2018 (Triwulan II, III dan IV)

(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	TW II	TW III	TW IV
1	KOTA	2.821.630.161,45	20.280.785.272,48	20.598.990.943,92
2	BATANGHARI	1.377.185.425,64	10.520.477.824,61	10.579.920.727,29
3	BUNGO	1.708.342.682,19	12.191.821.133,43	12.273.158.775,11
4	TEBO	1.434.854.937,41	10.184.198.799,38	10.241.629.335,39
5	MERANGIN	1.618.921.438,19	10.841.005.314,76	10.914.137.118,08
6	SAROLANGUN	1.397.390.953,20	10.469.477.179,15	10.523.994.057,64
7	MUARO JAMBI	1.358.071.132,01	10.905.834.096,04	10.975.443.353,05
8	TANJAB. BARAT	1.396.315.869,01	10.479.711.245,23	10.526.097.534,25
9	TANJAB. TIMUR	1.069.385.912,41	9.383.334.984,84	9.403.417.322,83
10	KOTA SEI. PENUH	926.924.165,33	9.137.234.611,83	9.139.867.658,91
11	KAB. KERINCI	1.135.211.198,14	8.960.767.863,92	8.975.233.068,38
	JUMLAH	16.244.233.874,98	123.354.648.325,67	124.151.889.894,85
JUMLAH TW II + III + IV				263.750.772.095,50

2.b. Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2018, sebesar Rp 27.061.198.244,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Utang Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2018

(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	TW IV PAJAK ROKOK
1	KOTA	3.861.539.570,41
2	BATANGHARI	2.603.431.112,90
3	BUNGO	2.051.400.914,38
4	TEBO	2.684.502.172,31
5	MERANGIN	2.310.181.644,46
6	SAROLANGUN	2.624.821.849,69
7	MUARO JAMBI	2.110.557.490,37
8	TANJAB. BARAT	2.575.413.878,11
9	TANJAB. TIMUR	2.189.908.259,86
10	KOTA SEI. PENUH	1.748.728.406,35
11	KAB. KERINCI	2.300.712.945,96
	JUMLAH	27.061.198.244,80

- 2.c. Kurang salur PBB-KB tahun 2016 Kabupaten/Kota sebesar Rp111.595.151,08.

Tabel 5.66 Kurang salur PBB-KB Tahun 2016

(dalam rupiah)

No	KAB/ KOTA	2016
1	KOTA	16.513.733,00
2	BATANGHARI	9.174.934,21
3	BUNGO	12.109.603,33
4	TEBO	8.944.929,66
5	MERANGIN	10.291.573,02
6	SAROLANGUN	9.721.897,77
7	MUARO JAMBI	10.160.070,49
8	TANJAB. BARAT	9.673.517,64
9	TANJAB. TIMUR	8.665.778,71
10	KOTA SEI. PENUH	8.637.225,72
11	KAB. KERINCI	7.701.887,53
	JUMLAH	111.595.151,08

- 2.d. Utang Pemerintah Provinsi Jambi kepada BPJS Kesehatan atas kekurangan potong IWP BPJS sebesar Rp19.415.483,00.
3. Utang Dinas Pendidikan sebesar Rp62.610.000,00 merupakan biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan RKB tahun 2017.
4. Utang pada Dinas PUPR sebesar Rp1.711.679.700,00 berupa Pekerjaan Eskalasi ruas jalan Simpang Pulau Rengas-Dusun Tuo-Jangkat yang semula pada 31 Desember 2017 sebesar Rp12.711.679.700, pada tahun 2018 sudah dibayar sebesar Rp 11.000.000.000,00.
5. Nilai Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp63.634.929.461,00. Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi ini merupakan Jaminan Pasca tambang yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pasca tambang di bidang pertambangan umum. Jaminan pasca tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp8.050.788.260.633,50 Rp7.575.361.823.497,54

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2017	Rp	7.575.361.823.497,54
Mutasi Tambah	Rp	475.426.437.135,96
Saldo Tahun 2018	Rp	8.050.788.260.633,50

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp4.429.102.691.626,36 **Rp4.286.145.484.565,36**

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.429.102.691.626,36naik sebesar Rp142.957.207.061,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp4.286.145.484.565,36. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.Pada TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

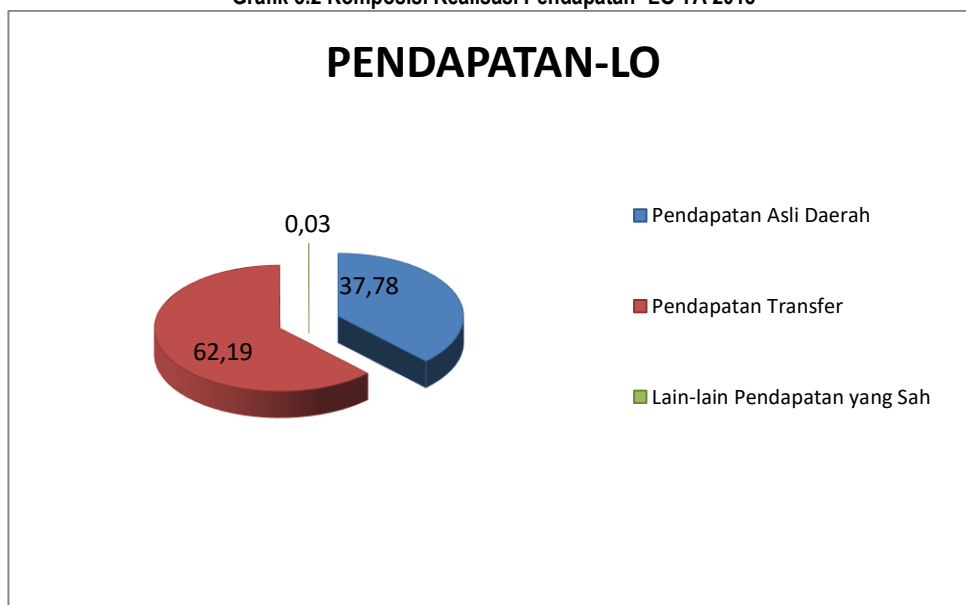
Tabel 5.67 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.673.207.723.627,36	1.560.050.184.265,36
2.	Pendapatan Transfer	2.754.346.967.999,00	2.723.260.588.950,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.548.000.000,00	2.834.711.350,00
Jumlah		4.429.102.691.626,36	4.286.145.484.565,36

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 37,78% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 62,19% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,03% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2018



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 62,19% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp1.673.207.723.627,36 **Rp1.560.050.184.265,36**

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.673.207.723.627,36 naik sebesar Rp113.157.539.362,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.560.050.184.265,36. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.68 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	% thd PAD	Realisasi 2017	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.381.931.751.242,31	82,59	1.316.162.467.485,16	84,37%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.199.308.413,00	1,21	19.878.635.906,00	1,27%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.835.510.780,83	1,78	29.270.584.180,63	1,88%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	241.241.153.191,22	14,42	194.738.496.693,57	12,48%
Jumlah		1.673.207.723.627,36	100,00%	1.560.050.184.265,36	100,00%

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp1.381.931.751.242,31 **Rp1.316.162.467.485,16**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp1.381.931.751.242,31 atau sebesar 5,00% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 naik sebesar Rp65.769.283.757,15 jika dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp1.316.162.467.485,16

Tabel 5.69 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Periode 2017 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	444.056.622.162,00	416.706.232.791,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	406.098.313.000,00	329.507.745.800,00

3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	332.619.004.479,47	300.364.910.839,16
4.	Pajak Air Permukaan	1.401.946.005,00	1.227.053.782,00
4.	Pajak Rokok	197.755.865.595,84	268.356.524.273,00
Jumlah		1.381.931.751.242,31	1.316.162.467.485,16

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2018

Rp20.199.308.413,00

31 Desember 2017

Rp19.878.635.906,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp20.199.308.413,00 atau sebesar 1,61% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 naik sebesar Rp320.672.507,00 dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp19.878.635.906,00.

Tabel 5.70 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang	-	312.242.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.243.455.000,00	1.403.400.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.592.405.000,00	1.292.760.000,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	322.647.500,00	329.993.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan	1.365.200.000,00	1.455.950.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.974.524.000,00	2.904.975.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.211.347.800,00	3.552.971.677,00
10	Retribusi Izin Trayek	13.500.000,00	4.200.000,00
11	Retribusi Perpanjangan IMTA	413.632.800,00	505.768.200,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	4.748.608.499,00	3.859.907.251,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	1.513.670.000,00	611.180.000,00
14	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.350.000,00	20.575.000,00
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	47.600.000,00	45.000.000,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi	3.308.063.000,00	3.172.342.000,00
17	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	7.500.000,00	7.500.000,00
18	Sewa Alat Berat		399.871.278,00
19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	423.804.814,00	-
20	Sewa Tempat di TMII	-	-
21	Sewa Aula Bandiklatda	-	-
22	Sewa kamar Asrama 1 dan 2	-	-
23	Sewa Ruang Belajar	-	-
24	Taman Hutan Kenali	-	-
Jumlah		20.199.308.413,00	19.878.635.906,00

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2018

Rp29.835.510.780,83

31 Desember 2017

Rp29.270.584.180,63

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp29.835.510.780,83 atau sebesar 1,93% naik sebesar Rp564.926.600,20 dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2017 sebesar Rp29.270.584.180,63.

Tabel 5.71 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta	571.714.491,00	626.827.425,00
2	Bagi Laba penyertaan pada BPD Jambi	28.763.796.289,83	27.968.261.014,63
3	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. JSP Jambi	500.000.000,00	250.000.000,00
4	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Simota Putra Parayuda	-	425.495.741,00
5	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Eraguna Bumi Nusa	-	-
6	Bagi Laba atas penyertaan Modal pada PT. JBC	-	-
Jumlah		29.835.510.780,83	29.270.584.180,63

5.4.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**
Rp241.241.153.191,22 **Rp194.738.496.693,57**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp241.241.153.191,22 atau sebesar 23,88% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 naik sebesar Rp46.502.656.497,65 dibandingkan TA 2017 sebesar Rp194.738.496.693,57.

Tabel 5.72 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	2.247.711.058,65	1.552.676.984,66
2	Penerimaan Jasa Giro	6.073.068.828,46	5.991.200.949,26
3	Pendapatan bunga	45.592.230.450,36	39.669.093.747,62
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.350.000,00	23.712.080,00
5	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	630.927.599,00	904.720.421,00
6	Pendapatan Denda Pajak	12.050.801.052,00	19.545.188.420,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	5.429.500,00	7.136.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	-	58.300,00
9	Pendapatan Zakat	-	2.380.356.451,17
10	Pendapatan BLUD	163.001.881.072,61	117.422.599.982,86
11	Pendapatan pengambilan gaji/tunjangan/Taspen	0.00	179.586.303,00
12	Pendapatan Pengembalian Setoran Pihak ke 3	0.00	10.196.733.768,00
	Lain-lain PAD yang Sah	(6.213.568.041,93)	(3.134.566.714,00)
13	Hasil Penjualan Aset lainnya	628.742.000,00	-
14	Penerimaan Lain-lain	17.219.579.672,07	-
15	Pendapatan Uang Duka dari PT. Taspen	-	-
Jumlah		241.241.153.191,22	194.738.496.693,57

5.4.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp2.754.346.967.999,00	Rp2.723.260.588.950,00

Pendapatan Transfer-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.754.346.967.999,00. Naik sebesar Rp31.086.379.049,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.723.260.588.950,00 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.73 Pendapatan Transfer -LO Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.745.221.967.999,00	99,67	2.723.260.588.950,00	100,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	9.125.000.000,00	0,33	0,00	0,00
Jumlah		2.754.346.967.999,00	100,00	2.723.260.588.950,00	100,00

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp2.745.221.967.999,00	Rp2.723.260.588.950,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.745.221.967.999,00 atau sebesar 0,81% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 naik sebesar Rp21.961.379.049,00 dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp2.723.260.588.950,00.

Tabel 5.74 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Bagi Hasil Pajak	229.619.409.689,00	186.374.450.163,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	177.185.564.298,00	204.146.304.551,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.399.367.134.000,00	1.397.912.161.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	939.049.860.012,00	934.827.673.236,00
Jumlah		2.745.221.967.999,00	2.723.260.588.950,00

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya– LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp9.125.000.000,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp9.125.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 naik sebesar Rp9.125.000.000,00 dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp0,00.

5.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp1.548.000.000,00	Rp2.834.711.350,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.548.000.000,00 turun sebesar Rp1.286.711.350,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2.834.711.350,00. Realisasi Lain - lain Pendapatan yang Sah tersebut didalamnya adalah pendapatan hibah dari Jasa Raharja sebesar Rp1.548.000.000,00.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah – LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp1.548.000.000,00	Rp2.834.711.350,00

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2018 sebesar Rp1.548.000.000,00 turun sebesar Rp1.286.711.350,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2.834.711.350,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.75 Pendapatan Hibah Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan ke Dinas Kesehatan	-	-
2	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	1.548.000.000,00	2.834.711.350,00
Jumlah		1.548.000.000,00	2.834.711.350,00

5.4.3.2 Pendapatan Lainnya – LO

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2018 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2017 naik sebesar Rp0,00.

5.4.4 BEBAN

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp3.796.302.233.200,48	Rp3.592.663.168.207,45

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.796.302.233.200,48 naik sebesar Rp203.639.064.993,03 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3.592.663.168.207,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018
1	Beban Operasi	3.116.406.690.112,58
2	Beban Transfer	679.895.543.087,90
Jumlah		3.796.302.233.200,48

Beban Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp3.116.406.690.112,58 terdiri dari:

Tabel 5.77 Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2018
(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai	1.304.348.986.013,66
2	Beban Persediaan	217.929.952.513,40
3	Beban Jasa	529.589.354.503,40
4	Beban Pemeliharaan	48.243.770.973,30
5	Beban Perjalanan Dinas	165.621.246.557,00
6	Beban Bunga	0
7	Beban Subsidi	500.000.000
8	Beban Hibah	487.359.693.428,00
9	Beban Bantuan Sosial	7.760.541.266,84
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	350.081.997.854,08
11	Beban Penyisihan Piutang	4.971.147.002,90
Jumlah Beban Operasi		3.116.406.690.112,58

Beban Transfer Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp679.895.543.087,90 terdiri dari:

Tabel 5.78 Realisasi Beban Transfer Provinsi Jambi Periode 2018
(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	579.768.148.687,90
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	14.126.500.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya	86.000.894.400,00
Jumlah Beban Transfer		679.895.543.087,90

5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp1.304.348.986.013,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2018
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	749.134.278.914,14	746.528.026.587,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	298.718.646.677,00	150.667.930.597,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	10.670.010.641,00	8.623.500.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	34.061.640.708,00	21.472.461.264,00
5	Beban Belanja Pegawai BLUD	65.763.849.573,52	52.505.590.890,60
6	Beban Honorarium LPPK/TEPRA	560.000.000,00	287.000.000,00
7	Beban Tunjangan Profesi Guru	145.073.559.800,00	142.793.885.400,00
8	Beban Tunjangan Penghasilan Guru	329.012.500,00	4.726.500.000,00
9	Beban Tunjangan Khusus Guru	37.987.200,00	70.558.800,00
10	Beban Uang Lembur - LO	0	0,00
Jumlah		1.304.348.986.013,66	1.127.675.453.538,60

5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp217.929.952.513,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Bahan Pakai Habis	45.644.019.814,85	84.766.324.517,71
2	Beban Persediaan Bahan/Material	51.411.461.118,55	423.331.760.021,33
3	Beban Cetak dan Penggandaan	16.135.007.147,00	17.144.526.458,00
4	Beban Makanan dan Minuman	59.755.085.314,00	35.040.597.074,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	5.432.889.200	4.816.851.845,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.145.248.820,00	1.350.486.000,00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	3.127.658.100,00	2.725.377.750,00
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga	35.278.582.999,00	(322.535.794.207,53)
Jumlah Beban Persediaan		217.929.952.513,40	246.640.129.458,51

5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp529.589.354.503,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Jasa Kantor	137.801.445.288,00	169.812.699.029,45
2	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.426.547.500,00	810.000.000,00
3	Beban Honorarium PNS	19.563.438.082,00	29.038.844.575,00
4	Beban honorarium Non PNS	89.994.104.750,00	93.688.296.500,00
5	Beban Premi Asuransi	6.240.678.625,08	3.074.093.893,55
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.605.605.198,00	6.048.772.966,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	12.904.930.000,00	13.710.846.000,00
8	Beban Sewa Alat Berat	0	1.082.000.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.144.248.670,00	5.617.843.100,00
10	Beban Jasa konsultasi	6.569.614.908,00	19.433.992.100,00
11	Beban kursus, pelatihan, Bimbingan teknis PNS	4.924.929.050,00	3.865.216.594,00
12	Beban Barang Dana BOS	150.460.067.792,00	112.034.329.858,00
13	Beban uang untuk diberikan Kepada kepada Pihak Ketiga/ masyarakat	3.503.850.000,00	
14	Beban Jasa luran	96.400.000,00	
16	Beban Bea Siswa Pendidikan	14.697.240.000,00	
17	Beban barang dan Jasa BLUD	70.656.254.640,32	
Jumlah Beban Jasa		529.589.354.503,40	458.216.934.616,00

5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp48.243.770.973,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	21.186.377.754,00	17.872.756.024,00
2	Beban Pemeliharaan	27.057.393.219,30	18.678.155.537,00

Jumlah Beban Pemeliharaan	48.243.770.973,30	36.550.911.561,00
---------------------------	-------------------	-------------------

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan sebesar Rp165.621.246.557,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Beban Perjalanan Dinas	165.621.246.557,00	140.893.533.093,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		165.621.246.557,00	140.893.533.093,00

5.4.4.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 merupakan subsidi sembako untukantisipasi lonjakan harga pada hari besar keagamaan kepada Perum BULOG Devisi Regional Jambi.

5.4.4.7 Beban Hibah

Beban Hibah sebesar Rp487.359.693.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
2	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	90.704.277.632,00
3	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	15.762.413.428,00	23.994.202.988,00
4	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan dasar	471.597.280.000,00	471.637.840.000,00
Jumlah		487.359.693.428,00	586.336.320.620,00

5.4.4.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp350.081.997.854,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	86.354.838.171,12	97.963.275.217,69
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.785.101.557,76	24.865.119.381,88
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.324.158.610,53	201.313.414.435,35
4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	0,00	(204.952.438,00)
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	204.952.438,00	508.430.858,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	412.947.076,67	768.919.000,00
Jumlah		350.081.997.854,08	325.214.206.454,93

Tabel 5.86 Realisasi Beban Penyusutan OPD Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Pendidikan	-10.298.720.979,39	12.484.255.444,53	212.687.094,09	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	2.910.685.729,55	455.667.626,81	81.911.231,36	0,00	0,00
3.	Rumah Sakit Daerah	36.510.308.469,94	2.439.790.978,61	130.315.326,99	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	2.266.167.566,30	1.196.004.266,52	189.402.462,93	0,00	0,00
5.	Dinas Sosial	401.035.986,20	256.944.853,34	4.089.197,82	0,00	0,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana	4.627.730.376,20	44.989.125,00	7.378.544,16	0,00	0,00
7.	Badan Kesbangpol	325.625.600,00	16.467.710,72	1.676.425,00	0,00	0,00
8.	Satpol PP	427.344.174,75	24.744.952,24	3.313.971,26	0,00	0,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum	8.718.090.981,39	1.124.048.608,04	223.848.428.696,29	0,00	0,00
10.	Dinas Sosnakertrans	807.698.625,36	112.209.934,36	300.000	0,00	0,00
11.	BPMPP	222.239.229,54	13.255.760,00	400.000,00	0,00	0,00
12.	Badan Ketahanan Pangan	143.918.994,48	12.517.100,00	1.376.287,50	0,00	0,00
13.	BLHD	1.192.530.233,32	117.251.564,16	13.144.283,34	0,00	0,00
14.	Dinas Perhubungan	1.480.490.569,19	511.439.227,23	4.869.105.753,02	0,00	0,00
15.	Dinas Kominfo	1.347.282.692,04	8.676.520,00	11.012.981,35	0,00	0,00
16.	Dinas Koperasi	530.139.840,00	185.856.302,93	12.385.265,34	0,00	0,00
17.	Badan Penanaman Modal Daerah	468.870.522,62	69.483.419,10	0	0,00	204.952.438,00
18.	Dispora	613.259.988,57	820.517.071,32	3.727.440,00	0,00	0,00
19.	Dinas Kebudayaan	1.401.327.375,01	280.033.662,68	12.177.234,20	0,00	0,00
20.	Dinas Perpustakaan	770.668.899,44	51.040.350,00	14.868.888,90	0,00	0,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.213.048.485,58	731.851.783,07	398.518.815,86	0,00	0,00
22.	Dinas Tanaman Pangan	3.254.268.937,73	1.182.824.844,89	161.307.588,50	0,00	0,00
23.	Dinas Perkebunan	876.302.627,53	43.606.693,33	2.130.054.520,80	0,00	0,00
24.	Dinas Kehutanan	8.697.149.068,69	693.368.993,64	252.718.266,26	0,00	0,00
25.	Dinas ESDM	563.438.813,12	40.640.918,67	2.783.162.313,59	0,00	0,00
26.	Dinas Perindag	856.908.316,22	242.226.792,87	3.230.300,00	0,00	0,00
27.	Bappeda	534.446.749,07	64.352.317,21	22.179.050,00	0,00	0,00
28.	Bakeuda	2.557.981.252,49	644.512.106,66	27.555.033,76	0,00	0,00
29.	Bakeuda SKPKD	0	0	0	0,00	0,00
30.	Badan Kepegawaian Daerah	300.363.629,68	15.021.440,76	1.239.550,00	0,00	0,00
31.	Badan PSDM	969.377.287,13	324.089.800,41	32.460.999,50	0,00	0,00
32.	Balitbangda	205.649.225,86	0	0	0,00	0,00
33.	Inspektorat	445.868.240,50	87.657.817,54	499.250,00	0,00	0,00
34.	Sekretariat DPRD	3.275.248.769,77	561.121.636,77	247.000,00	0,00	0,00
35.	Biro Pemerintahan	23.656.800,00	0	0	0,00	0,00
36.	Biro Kesramas	72.343.633,33	0	0	0,00	0,00
37.	Biro APSDA	38.357.350,00	0	0	0,00	0,00
38.	Biro APKS	46.022.240,00	0	0	0,00	0,00
39.	Biro Umum	4.676.450.479,66	1.133.042.322,06	84.518.167,46	0,00	0,00
40.	Biro Humas dan Protokol	117.392.050,00	0	650.000,00	0,00	0,00
41.	Biro PBMD	992.346.608,52	885.735.491,75	1.283.671,25	0,00	0,00
42.	Biro Hukum	50.344.966,67	0	0	0,00	0,00
43.	Biro Organisasi	63.511.050,00	0	0	0,00	0,00
44.	Badan Penghubung	657.666.715,06	909.854.120,54	6.833.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	86.354.838.171,12	27.785.101.557,76	235.324.158.610,53	0,00	204.952.438,00

Tabel 5.87 Realisasi Beban Amortisasi per OPD Provinsi Jambi Periode 2018

(dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Amortisasi TA 2018	Beban Amortisasi TA 2017
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	5.016.000,00	5.016.000,00
3.	Rumah Sakit Daerah	21.105.000,00	17.650.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	90.220.000,00	206.682.800,00
6.	Dinas Perhubungan	0,00	340.921.600,00
7.	Biro APKS	11.424.160,00	5.712.080,00
8.	Badan keuangan daerah	0,00	0,00
9.	Biro PBMD	915.416,67	37.440.000,00
10.	Dinas Kominfo	234.964.000,00	117.496.520,00
11.	Biro Umum	11.302.500	0,00
12.	Biro Hukum	0,00	0,00
13.	Dinas Penanaman Modal	38.000.000,00	38.000.000,00
Jumlah		412.947.076,67	768.919.000,00

5.4.4.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 sebesar Rp4.971.147.002,90 merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada 8 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per OPD Periode 2018

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	
		Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	8.474.993,59	(47.687.215,31)
2.	Rumah Sakit Jiwa	9.596.750,43	7.355.651,95
3.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(33.424.808,50)
4.	Badan Keuangan Daerah	1.487.227.600,00	25.995.650,00
5.	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	3.478.044.158,88	1.845.884.073,94
6.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	(7.646.500,00)	924.769.000,00
7.	Badan Penghubung Daerah	(4.700.000,00)	(4.400.000,00)
8.	Dinas Perhubungan	150.000,00	(4.400.000,00)
JUMLAH		4.971.147.002,90	2.718.492.352,08

5.4.4.10 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Rp0,00.

5.4.4.11 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp579.768.148.687,90 yang merupakan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp14.126.500.000,00 yang merupakan beban transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.13 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Rp86.000.894.400,00 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) yang merupakan beban bantuan keuangan kepada bantuan keuangan kepada Partai Politik.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2018 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp632.800.458.425,88**

5.4.6 POS LUAR BIASA

Jumlah Pendapatan Luar Biasa Tahun 2018 sebesar **Rp0,00**

Jumlah Beban Luar Biasa untuk Tahun 2018 sebesar **Rp96.682.191,77**

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2018 **Rp632.703.776.234,11**

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2018 31 Desember 2017 **Rp1.002.718.779.544,95 Rp1.039.652.240.215,96**

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.002.718.779.544,95 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.002.718.779.544,95 dan Rp1.039.652.240.215,96 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2018	Tahun 2017
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	1.374.289.409.975,47	1.316.162.467.485,16
Penerimaan Retribusi Daerah	20.204.081.913,00	19.864.952.006,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.511.006.521,83	29.054.470.466,63

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.337.219.795,96	51.189.044.237,05
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	406.804.973.987,00	390.520.754.714,00
Dana Alokasi Umum	1.399.367.134.000,00	1.397.912.161.000,00
Dana Alokasi Khusus	939.049.860.012,00	934.827.673.236,00
Dana Penyesuaian	9.125.000.000,00	0
Pendapatan Hibah	1.548.000.000,00	1.658.460.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.263.236.686.205,26	4.141.189.983.144,84
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.238.031.136.440,14	1.075.169.862.648,00
Belanja Barang	854.516.651.512,50	764.125.355.217,54
Subsidi	500.000.000,00	0,00
Hibah	487.359.693.428,00	586.336.320.620,00
Bantuan Sosial	118.200.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	96.682.191,77	58.345.000,00
Bagi Hasil Pajak	579.768.148.687,90	517.348.197.874,34
Belanja Bantuan Keuangan	98.066.500.000,00	156.720.000.000,00
Bantuan Keuangan Partai Politik	2.060.894.400,00	1.779.661.569,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.260.517.906.660,31	3.101.537.742.928,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.002.718.779.544,95	1.039.652.240.215,96

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2014</u>
(Rp766.392.325.805,51)	(Rp885.794.535.971,32)

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2018 defisit sebesar (Rp766.392.325.805,51). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp766.392.325.805,51) dan (Rp885.794.535.971,32) berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2018	Tahun 2017
<i>Arus Kas Masuk</i>		

Pelepasan Hak Atas Tanah	2.247.711.058,65	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	628.742.000,00	1.552.676.984,66
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	2.876.453.058,65	1.552.676.984,66
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	1.477.206.406,00	2.800.947.111,00
Belanja Peralatan dan Mesin	111.313.374.516,20	103.928.668.183,09
Belanja Gedung dan Bangunan	131.543.812.912,44	106.016.827.183,89
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	505.320.632.964,52	658.315.309.836,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.613.752.065,00	16.285.460.642,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	769.268.778.864,16	887.347.212.955,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp766.392.325.805,51)	(Rp885.794.535.971,32)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Rp1.858.049.098,16	Rp2.043.234.590,99

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.858.049.098,16 dan sebesar Rp2.043.234.590,99 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2018	Tahun 2017
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	213.101.193.123,83	217.507.576.671,00
Penerimaan Utang Pihak Ketiga	2.108.667.063,16	2.043.234.590,99
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	102.418.550,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	215.312.278.736,99	219.550.811.261,99
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	213.101.193.123,83	217.507.576.671,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	353.036.515,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	213.454.229.638,83	217.507.576.671,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	1.858.049.098,16	2.043.234.590,99

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.858.049.098,16 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dan Penerimaan Utang Pihak Ketiga milik PT. WKS, PT. PKP dan Bank mandiri kelebihan transfer ke Kas Daerah sebesar Rp6.800.000,00. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

5.5.4 Saldo Akhir Kas **31 Desember 2018**
Rp717.180.441.962,78 **31 Desember 2017**
Rp500.862.927.893,66

Saldo Akhir Kas Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp Rp717.180.441.962,78 dan sebesar Rp500.862.927.893,66 dapat dirinci sebagai berikut:

	<i>(dalam rupiah)</i>	
	Tahun 2018	Tahun 2017
Kenaikan/Penurunan Kas	238.184.502.837,60	155.900.938.835,63
Saldo Awal Kas di BUD	442.376.146.407,86	286.475.207.572,23
Saldo Akhir Kas di BUD	680.560.649.245,46	442.376.146.407,86
Kas di Bendahara Penerimaan	4.138.000,00	102.067.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	353.036.515,00	351.550,00
Kas di Bendahara BLUD	31.793.654.294,32	36.175.461.224,80
Kas Di Bendahara BOS	4.468.963.908,00	22.208.901.711,00
Saldo Akhir Kas	717.180.441.962,78	500.862.927.893,66

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2018 sebesar **Rp7.575.361.823.497,54** merupakan saldo akhir Tahun 2017.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp632.703.776.234,11**.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2018 adalah sebesar **(Rp157.277.339.098,15)**, yang terdiri dari:

a) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap Rp140.763.137.212,95

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Tetap terdiri dari:

- (a) Penambahan dari mutasi masuk antarOPD sebesar Rp941.773.355.912,46 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.89 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Penambahan Dari Mutasi Masuk AntarOPD**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	106.272.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	102.843.082,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222.500.000,00	Dari Biro Umum
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50.538.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Biro Pembangunan dan Kerjasama	111.213.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
6	Biro Hukum	66.003.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.231.313.200,00	– Dari Badan Kepegawaian Daerah – Dari Sekretariat DPRD
8	Biro Humas dan Protokol	344.446.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
9	Biro Umum	23.809.060.427,31	Dari Dinas Perhubungan
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	168.700.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Biro Organisasi	15.729.000,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
12	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26.288.500,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	359.415.319.722,47	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
14	Dinas Kehutanan	9.150.003.881,00	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
15	Dinas Pendidikan	545.953.126.099,68	Dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah (Rp)	941.773.355.912,46	

- (b) Penambahan dari hibah sebesar Rp113.253.703.345,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –

Penambahan Dari Hibah

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.678.489.500,00	Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.540.196.324,00	– Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan – Dari Masyarakat
3	Dinas Kesehatan	9.973.504.900,00	Dari Kementerian Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah	82.165.850.634,00	Dari Kementerian Kesehatan
5	Dinas Kehutanan	6.730.004.930,00	– Dari MCAI (Millenium Challenge Account – Indonesia) – Dari BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.575.069.200,00	Dari Badan Nasional Penanggulan Bencana
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	2.783.142.857,00	Dari Kementerian Pertanian
8	Dinas Perkebunan	807.445.000,00	Dari Kementerian Pertanian
	Jumlah (Rp)	113.253.703.345,00	

- (c) Penambahan dari aset yang belum tercatat sebesar Rp25.892.125.231 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.91 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Penambahan Dari Aset Yang Belum Tercatat**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.146.085.881,00	Tanah
2	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	746.039.350,00	Gedung dan Bangunan
	Jumlah (Rp)	25.892.125.231,00	

- (d) Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp293.240.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.92 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Penambahan Dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.150.000,00	Gedung dan Bangunan
2	Badan Keuangan Daerah	49.610.000,00	Konstruksi Dalam Pekerjaan
3	Dinas Koperasi dan UKM	149.680.000,00	Gedung dan Bangunan
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.800.000,00	Gedung dan Bangunan
	Jumlah (Rp)	293.240.000,00	

- (e) Pengurangan karena belanja modal ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi) sebesar Rp12.832.598.918,17 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.93 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Pengurangan Karena Belanja Modal Ekstrakomptabel (Dibawah Nilai Kapitalisasi)**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	68.400.000,00	Peralatan dan Mesin
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	750.000,00	Peralatan dan Mesin
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	157.840.000,00	Peralatan dan Mesin
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah	161.840.001,00	– Gedung dan Bangunan – Peralatan dan Mesin
5	Dinas Kesehatan	80.645.000,00	Peralatan dan Mesin
6	Rumah Sakit Umum Daerah	411.822.605,00	Peralatan dan Mesin
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.207.600,00	Peralatan dan Mesin
8	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	14.998.500,00	Peralatan dan Mesin
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.852.864,00	Peralatan dan Mesin

No	OPD	Jumlah	Keterangan
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.624.750,00	Peralatan dan Mesin
11	Dinas Koperasi dan UKM	44.420.000,00	Peralatan dan Mesin
12	Sekretariat DPRD	55.900.000,00	Peralatan dan Mesin
13	Dinas Perhubungan	1.257.590.970,00	Gedung dan Bangunan
14	Badan Penghubung Daerah	6.790.000,00	Peralatan dan Mesin
15	Badan Kepegawaian Daerah	74.521.900,00	Peralatan dan Mesin
16	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7.275.000,00	Peralatan dan Mesin
17	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	5.599.000,00	Peralatan dan Mesin
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.918.400,00	Peralatan dan Mesin
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.050.000,00	Peralatan dan Mesin
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	Peralatan dan Mesin
21	Dinas Kehutanan	1.700.266.850,00	– Gedung dan Bangunan – Peralatan dan Mesin – Aset Tetap Lainnya
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	Gedung dan Bangunan
23	Badan Keuangan Daerah	12.453.700,00	Peralatan dan Mesin
24	Biro Humas dan Protokol	5.820.000,00	Peralatan dan Mesin
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.341.470,00	Peralatan dan Mesin
26	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	24.757.580,00	Peralatan dan Mesin
27	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	15.000.000,00	Gedung dan Bangunan
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.600.000,00	Gedung dan Bangunan
29	Dinas Pendidikan	8.590.312.728,17	Peralatan dan Mesin
	Jumlah	12.832.598.918,17	

- (f) Pengurangan karena pembayaran hutang yang asetnya telah dicatat oleh Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp2.457.478.735,00.
- (g) Pengurangan karena mutasi keluar antarOPD sebesar Rp912.808.901.917,28 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.94 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Pengurangan Karena Mutasi Keluar Antar OPD**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	125.900.000,00	Ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	909.665.158.679,58	– Ke Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan – Ke Badan Kepegawaian Daerah – Ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ke Biro Pembangunan dan Kerjasama – Ke Biro Hukum – Ke Biro Humas dan Protokol – Ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP – Ke Biro Organisasi – Ke Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam – Ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral – Ke Dinas Kehutanan – Ke Dinas Pendidikan
3	Biro Umum	677.093.237,70	– Ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral – Ke Dinas Lingkungan Hidup – Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Ke Badan Keuangan Daerah
4	Sekretariat DPRD	2.340.750.000,00	– Ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah – Ke Dinas Komunikasi dan Informatika – Ke Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah	912.808.901.917,28	

- (h) Pengurangan karena koreksi sebesar Rp69.075.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.95 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Pengurangan Karena Koreksi**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	24.300.000,00	Lebih Catat
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,00	Lebih Catat
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44.775.000,00	Lebih Catat
	Jumlah	69.075.001,00	

- (i) Pengurangan karena reklasifikasi keluar sebesar Rp3.674.001.871,02 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.96 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Pengurangan Karena Reklasifikasi Keluar**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.271.954.482,02	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
2	Rumah Sakit Umum Daerah	49.700.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.850.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
4	Sekretariat DPRD	2.230.757.389,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
5	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	103.740.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
	Jumlah	3.674.001.871,02	

- (j) Pengurangan karena temuan pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.992.149.500,68.
- (k) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp3.615.081.332,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.97 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap –
Pengurangan Karena Penghapusan**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.885.867.094,66	– Peralatan dan Mesin – Lelang
2	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.147.979.000,00	Gedung dan Bangunan
4	Sekretariat DPRD	581.235.237,70	– Pelunasan TGR – Lelang
	Jumlah	3.615.081.332,36	

b) Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp299.422.188.938,00)

Penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.98 Rincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	(8.706.984.044,70)	– Kurang Catat – Hibah dari Kementerian Kesehatan
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(1.609.523,81)	Kurang Catat
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(91.985.172.374,00)	Hibah dari Kementerian Kesehatan
4	Dinas Perhubungan	103.691.671,63	Lebih Catat
5	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	(278.743.549,00)	Kurang Catat
6	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(231.926.882,16)	– Hibah dari Kementerian Pertanian – Lebih Catat
7	Sekretariat DPRD	3.162.484.704,37	– Kurang Catat – Penghapusan – Reklasifikasi ke Aset Lainnya

No	OPD	Jumlah	Keterangan
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,51	Lebih Catat
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.309.813.268,73	Penghapusan
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(58.945.613.378,08)	Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.361.267.986,59)	Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
12	Biro Umum	(6.430.845.956,40)	Mutasi dari Dinas Perhubungan
13	Badan Keuangan Daerah	(61.829.088,56)	– Kurang Catat – Mutasi dari Biro Umum
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.850.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
15	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	63.112.674,57	Lebih Catat
16	Badan Kepegawaian Daerah	(48.982.474,26)	Kurang Catat
17	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.086.320.170,94	– Kurang Catat – Mutasi ke 12 OPD
18	Biro Humas dan Protokol	5.885.000,00	Lebih Catat
19	Dinas Pendidikan	(181.118.371.171,19)	Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah	(299.422.188.938,00)	

c) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya (Rp4.987.249.709,39)

Penambahan dan pengurangan Aset Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.99 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(1.981.825.659,21)	– Lebih Catat – Temuan
2	Dinas Kehutanan	(200.000,00)	Lebih Catat
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.400.000,00)	Penghapusan
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1.023.108.948,00)	Penghapusan
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(1.869.099.934,83)	Penghapusan
6	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(1.076.232.566,85)	– Penghapusan – Temuan
7	Badan Keuangan Daerah	(1.063.036.807,58)	– Penghapusan – Kurang Catat
8	Biro Umum	(884.200.163,94)	– Penghapusan – Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah – Temuan
9	Dinas Perhubungan	(305.050.000,00)	Penghapusan
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.316.500,00	– Penghapusan – Reklasifikasi dari Aset Tetap
11	Sekretariat DPRD	1.797.793.389,00	– Penghapusan – Reklasifikasi dari Aset Tetap
12	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.271.954.482,02	Reklasifikasi dari Aset Tetap
13	Rumah Sakit Umum Daerah	49.700.000,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap
14	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	96.140.000,00	
	Jumlah	(4.987.249.709,39)	

d) Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp840.425.163,94

Penambahan dan pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

Tabel 5.100 Rincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Biro Umum	852.741.663,94	Penghapusan
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(12.316.500,00)	– Penghapusan – Reklasifikasi dari Aset Tetap
	Jumlah	840.425.163,94	

e) Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap (Rp7.723.961.196,53)

Penambahan dan pengurangan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.101 Rincian Penambahan dan Pengurangan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	13.969.276.400,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan
2	Dinas Kehutanan	4.113.269.500,00	Hibah dari BPKH (Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan)
3	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	28.083.600,00	Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	315.640.480,00	– Hibah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Hibah dari Kementerian Tenaga Kerja
5	Dinas Perhubungan	(11.663.518.600,96)	– Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah – Mutasi ke Biro Umum
6	Badan Kepegawaian Daerah	171.770.000,00	Mutasi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	421.379.000,00	– Mutasi dari Sekretariat DPRD – Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa
8	Badan Keuangan Daerah	61.100.000,00	Mutasi dari Biro Umum
9	Inspektorat Daerah	(2.030.000,00)	Ekstrakomptabel
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.000.000,00)	Ekstrakomptabel
11	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	(14.991.981.575,57)	– Mutasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral – Mutasi ke Dinas Kehutanan – Mutasi ke Dinas Pendidikan
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(137.950.000,00)	Mutasi ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah	(7.723.961.196,53)	

f) Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen Rp174.715.999,19

Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp174.715.999,19 merupakan penyesuaian data piutang KUPEM sebesar Rp51.806.619,23 beserta penyisihannya sebesar Rp122.909.379,96.

g) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban (Rp28.540.087.247,48)

Penambahan dan pengurangan kewajiban terdiri dari:

Tabel 5.102 Rincian Penambahan dan Pengurangan Kewajiban
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.000.000.000,00	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah	1.275.000.000,00	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
3	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	(38.483.471.123,48)	Utang Bagi Hasil
4	Dinas Pendidikan	6.144.170.000,00	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	Rumah Sakit Umum Daerah	(8.475.786.124,00)	Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
	Jumlah	(28.540.087.247,48)	

h) Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen Rp41.617.869.617,17

Nilai investasi permanen sebesar Rp41.617.869.617,17 merupakan penyesuaian penambahan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2018.

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2018 adalah sebesar **Rp8.050.788.260.633,50** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	7.575.361.823.497,54
2	Suplus/Defisit LO	Rp	632.703.776.234,11
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(157.277.339.098,15)
4	Ekuitas Akhir	Rp	8.050.788.260.633,50

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 8 Badan, 22 Dinas, dua BUMD, 5 Badan Layanan Umum dengan rincian sebagai berikut.

1. Badan

- 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Badan Keuangan Daerah
- 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 12) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 13) Badan Kepegawaian Daerah
- 14) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 15) Badan Penghubung Daerah
- 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Dinas

- 23) Dinas Pendidikan
- 24) Dinas Kesehatan
- 25) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 26) Dinas Perhubungan
- 27) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 28) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 29) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 30) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 31) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 32) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- 33) Dinas Perkebunan
- 34) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 35) Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
- 36) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 37) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 38) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 39) Dinas Kominfo
- 40) Dinas Lingkungan Hidup
- 41) Dinas Ketahanan Pangan
- 42) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 43) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 44) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4. BUMD

- 1) Bank Jambi
- 2) PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)

4. Badan Layanan Umum Daerah.

- 6) Akademi Farmasi.
- 7) Akademi Analisis Kesehatan (AAK)

- 8) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
- 9) Rumah Sakit Daerah
- 10) Rumah Sakit Jiwa

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2018

Dalam TA 2018 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

6.4. Informasi Lainnya

Dalam TA 2018 terdapat perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2018 sebesar Rp4.213.996.839.621,44 telah direalisasi sebesar Rp4.412.464.565.281,27 atau sebesar 104,71%, dan pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp4.671.068.810.503,80 terealisasi sebesar Rp4.198.255.718.275,31 atau sebesar 89,88%. Dari angka defisit APBD yang ditargetkan sebesar (Rp457.071.970.882,36) dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp214.208.847.005,96 atau sebesar -46,87%. Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp457.071.970.882,36, maka terdapat SILPA sebesar Rp671.280.817.888,32;
- *Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):* Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp671.280.817.888,32, ini berarti ada kenaikan sebesar Rp214.208.847.005,96 dibanding dengan saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36 dan terdapat saldo SAL Tahun 2018 yang tidak digunakan sebesar Rp671.280.817.888,32;
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2018 sebesar Rp8.495.832.583.828,62 bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp593.017.765.663,59 naik sebesar 6,74%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp445.044.323.195,12 bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp347.596.657.213,2 naik sebesar 8,03%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp8.050.788.260.633,50 bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp7.575.361.823.497,54 naik sebesar 5,99%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2018 sebesar Rp4.429.102.691.626,36 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.673.207.723.627,36, pendapatan transfer LO sebesar Rp2.754.346.967.999, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.548.000.000,00. Sedangkan Beban Tahun 2018 sebesar Rp3.796.302.233.200,48 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp3.116.406.690.112,58 Beban Transfer sebesar Rp679.895.543.087,9 sedangkan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional surplus sebesar Rp632.800.458.425,88. Nilai Surplus Kegiatan Non Operasional adalah Nihil. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp632.800.458.425,88. Nilai Pendapatan luar biasa adalah Rp0,00, Beban Luar Biasa Rp96.682.191,77 sehingga Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Defisit (Rp96.682.191,77) sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp632.703.776.234,11.

- *Pada Laporan Arus Kas:* Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp717.180.441.962,78 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp500.862.927.893,66 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp216.317.514.069,12.
- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):* Ekuitas awal sebesar Rp7.575.361.823.497,54 Surplus/Defisit LO sebesar Rp632.703.776.234,11 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar (Rp157.277.339.098,15) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp8.050.788.260.633,50.

Jambi, Juni 2019
GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR